



**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Sumatera Selatan Tahun 2025**

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Sumatera Selatan Tahun 2025**

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Nur Ida Fitrianti	Penyusun Rencana dan Pelaporan	11/07/2025	
2.	Diperiksa	Tulus Raharjo, A.TD., M.Si.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	11/07/2025	
3.	Disetujui	Tulus Raharjo, A.TD., M.Si.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	11/07/2025	



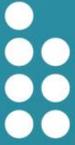
LMCK

(LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA)

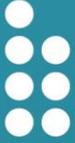


TRIWULAN II | 2025

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI**



• **KATA**

PENGANTAR



KATA PENGANTAR



BPTD Kelas II Sumatera Selatan mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat.

Sebagai institusi publik, BPTD Kelas II Sumatera Selatan bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II BPTD Kelas II Sumatera Selatan merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja BPTD Kelas II Sumatera Selatan yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I BPTD Kelas II Sumatera Selatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Pengukuran Kinerja Triwulan II Tahun 2025 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap Pencapaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025.

Kami berharap Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Palembang, 11 Juli 2025

**KEPALA BALAI PENGELOLA
TRANSPORTASI DARAT KELAS II
SUMATERA SELATAN**



Ditandatangani secara elektronik
NURHADI UNGGUL WIBOWO, ST, MT
NIP. 19711116 199803 1 002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



RINGKASAN EKSEKUTIF



RINGKASAN EKSEKUTIF

Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kepemimpinannya melalui Kabinet Merah Putih periode Tahun 2025-2029 mengusung Visi "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi Presiden RI dirumuskan dalam 8 (delapan) Misi Astacita, dengan 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat. Pencapaian visi Kabinet Merah Putih tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional.

Dalam mendukung Visi Presiden RI, Kementerian Perhubungan mengemban tugas strategis sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2025 tentang Organisasi Kementerian Negara yaitu Kementerian Perhubungan sebagai unsur pelaksana pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perhubungan. Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 berpedoman kepada Visi Presiden terlantik dalam RPJMN dan Visi Renstra Kementerian Perhubungan.

Pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2025-2029 memiliki peran penting sebagai pondasi awal untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Membangun Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar bangsa Indonesia yang tecermin dalam RPJPN 2025-2045 sebagai perayaan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Visi Indonesia Emas 2045 dilandasi oleh Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya.

UU No.59 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 menjelaskan pengertian Visi Indonesia Emas 2045 adalah pandangan bangsa Indonesia mengenai keadaan bangsa yang diinginkan pada 100 (seratus) tahun kemerdekaan.

Visi Indonesia Emas 2045 adalah "**Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**". Empat pilar utama Visi Indonesia Emas 2045 terdiri dari:

- a. Bersatu dimaknai sebagai kesatuan kuat berdasarkan Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Berdaulat dimaknai sebagai ketahanan, kesatuan, mandiri, aman, dan tangguh;
- c. Maju dimaknai sebagai berdaya, modern, tangguh, unggul, inovatif, dan adil; dan
- d. Berkelanjutan dimaknai sebagai lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Visi Presiden Republik Indonesia menjadi landasan untuk penyusunan RPJMN 2025-2029. Visi Presiden periode 2025-2029, yaitu "**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**". Visi ini mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 diturunkan dari Visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang di dalam dokumen RPJPN 2025-2045 dan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029. Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 adalah "**Transportasi Maju menuju Indonesia Emas 2045**". Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 diturunkan dari Visi Indonesia Emas 2045, Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, dan Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 sebagaimana





disajikan pada Gambar 1. Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 adalah **“Transportasi Darat Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**.

Pemaknaan transportasi darat Indonesia maju dengan mengacu pada uraian Naskah Teknokratik Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025 – 2029, yaitu: tersedianya jaringan dan layanan transportasi darat yang modern, handal, inklusif, berdaya saing dan memberikan nilai tambah secara berkelanjutan.



Gambar 1. Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029

Keterangan: *) Transportasi maju: tersedianya jaringan dan layanan transportasi yang modern, handal, inklusif, berdaya saing dan memberikan nilai tambah secara berkelanjutan

Misi menurut UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Visi Presiden RI dirumuskan dalam 8 (delapan) Misi Astacita, dengan 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat. Delapan Misi Asta Cita adalah sebagai berikut:

1. Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.





Pelaksanaan fungsi Kementerian Perhubungan mengacu pada Perpres No. 173 Tahun 2025 tentang tentang Kementerian Perhubungan. Misi Kementerian Perhubungan dirumuskan dengan mempersempit lingkup tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan dengan fokus utama pada 2 (dua) hal sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi; dan
- b. Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi.

Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 disusun dengan membuat pasangan untuk setiap misi pada Asta Cita sebagai berikut:

1. Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan;
2. Mewujudkan dukungan transportasi thdp ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi yg berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara kesisteman;
4. Memperkuat kualitas SDM transportasi dan penerapan kebijakan transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan;
5. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama;
6. Membangun transportasi perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau;
7. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional; dan
8. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 (Asta Cita)	Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029	Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029
<ol style="list-style-type: none">1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	<ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan2. Mewujudkan dukungan transportasi thdp ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi yg berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara kesisteman4. Memperkuat kualitas SDM transportasi dan penerapan kebijakan transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan5. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama6. Membangun transportasi perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau7. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional8. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim	<ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan transportasi darat yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan2. Mewujudkan dukungan transportasi darat terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi yg berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi darat yang merata dan terintegrasi secara kesisteman4. Memperkuat kualitas SDM transportasi darat dan penerapan kebijakan transportasi darat yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan5. Memperkuat konektivitas transportasi darat untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama6. Membangun konektivitas transportasi darat pada wilayah perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau7. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi darat8. Mewujudkan transportasi darat yang ramah lingkungan dan berketahanan iklim

Gambar 2. Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029

Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 diturunkan dari Misi Asta Cita Presiden 2025-2029 dan Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 sebagaimana disajikan pada **Gambar 2** adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan transportasi darat yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan;
2. Mewujudkan dukungan transportasi darat terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi yg berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;





3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi darat yang merata dan terintegrasi secara kesisteman;
4. Memperkuat kualitas SDM transportasi darat dan penerapan kebijakan transportasi darat yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan;
5. Memperkuat konektivitas transportasi darat untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama;
6. Membangun konektivitas transportasi darat pada wilayah perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau;
7. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi darat; dan
8. Mewujudkan transportasi darat yang ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden. Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029. Prioritas Nasional merupakan sasaran pada periode jangka menengah 2025-2029.

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025-2029 menggunakan pendekatan *balanced scorecard* atau BSC. Penggunaan *balanced scorecard* mengacu pada pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029.

Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 yang dirumuskan dengan menggunakan pendekatan *balanced scorecard* adalah sebagai berikut:

- T.1 Terwujudnya nilai tambah transportasi darat untuk mendukung pencapaian sasaran nasional dalam RPJPN 2025-2045;
- T.2 Terwujudnya transportasi darat yang handal, inklusif, dan berdaya saing;
- T.3 Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi darat yang berkualitas; dan
- T.4 Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.

Sasaran utama pembangunan nasional RPJMN 2025-2029 ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung pencapaian sasaran RPJPN 2025-2029. Adapun sasaran Kementerian Perhubungan sebagaimana dihasilkan dari proses analisis *balanced scorecard* mencakup:

- SS1 Meningkatnya konektivitas dan integrasi transportasi nasional;
- SS2 Meningkatnya kualitas dan inklusivitas pelayanan transportasi nasional;
- SS3 Meningkatnya keselamatan transportasi nasional;
- SSp4 Meningkatnya kualitas kebijakan transportasi nasional;
- SSp5 Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten;
- SSp6 Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan.

Pengertian sasaran atau target menurut PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Direktorat Jenderal Perhubungan sebagai Unit Kerja Eselon I menggunakan sasaran program dan indikator kinerja program sebagai alat ukur dalam pencapaian tujuan. Sasaran Program juga merupakan turunan dari Sasaran Strategis yang telah disusun dalam Renstra Kementerian Perhubungan.

Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

- SP1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat;
- SP2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat;



- SP3. Meningkatnya keselamatan transportasi darat;
- SPp4. Meningkatnya kualitas kebijakan transportasi darat;
- SPp5. Meningkatnya SDM transportasi darat yang kompeten;
- SPp6. Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Ditjen Hubdat.

Dari tujuan di atas, dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Kegiatan. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Sasaran Kegiatan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Triwulan II Tahun 2025 masih menggunakan sasaran kegiatan pada tahun sebelumnya dikarenakan belum disahkannya Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan, dimana terdapat 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$) dan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq IKK < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan terealisasi sebesar 4 Trayek (target 4 Trayek);
2. Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A terealisasi sebesar 7 Kegiatan (target 7 Kegiatan);
3. Jumlah terminal tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas terealisasi sebesar 7 Unit (target 7 Unit);
4. Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas terealisasi sebesar 3 Unit (target 3 Unit);
5. Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP terealisasi sebesar 1 Trayek (target 1 Trayek);
6. Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas terealisasi sebesar 1 Unit (target 3 Unit);
7. Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM terealisasi sebesar 7 Unit (target 7 Unit);
8. Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM terealisasi sebesar 3 Unit (target 3 Unit);
9. Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok terealisasi sebesar 0 Kegiatan (target 6 Kegiatan);
10. Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas *Event* Khusus terealisasi sebesar 2 Kegiatan (target 1 Kegiatan);
11. Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM terealisasi sebesar 2 Unit (target 3 Unit);
12. Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM terealisasi sebesar 0 Unit (target 1 Unit);
13. Operasional layanan Kapal Kerja sesuai SPM terealisasi sebesar 0 Unit (target 1 Unit);
14. Operasional dan pemeliharaan pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan terealisasi sebesar 1 Unit (target 1 Unit);
15. Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata terealisasi sebesar 7 Kegiatan (target 7 Kegiatan);
16. Jumlah kegiatan pengawasan operasional angkutan barang terealisasi sebesar 3 Kegiatan (target 3 Kegiatan);
17. Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan terealisasi sebesar 3 Unit (target 3 Unit);
18. Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman terealisasi sebesar 1 Kegiatan (target 1 Kegiatan);
19. Jumlah kegiatan terkait kalibrasi alat uji berkala di daerah terealisasi sebesar 3 Kegiatan (target 12 Kegiatan);





20. Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis terealisasi sebesar 0 Unit (target 5.967 Unit);
21. Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman terealisasi sebesar 0 Lokasi (target 4 Lokasi);
22. Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda terealisasi sebesar 0 Orang (target 150 Orang);
23. Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda terealisasi sebesar 0 Orang (target 180 Orang);
24. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 2 Kegiatan (target 3 Kegiatan);
25. Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 1 Dokumen (target 1 Dokumen);
26. Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan terealisasi sebesar 2 Dokumen (target 2 Dokumen);
27. Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 1 Kegiatan (target 3 Kegiatan);
28. Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan terealisasi sebesar 2 Dokumen (target 2 Dokumen);
29. Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 2 Dokumen (target 2 Dokumen);
30. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 1 Kegiatan (target 5 Kegiatan);
31. Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) terealisasi sebesar 2 Kegiatan (target 2 Kegiatan);
32. Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa terealisasi sebesar 1 Kegiatan (target 1 Kegiatan);
33. Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja terealisasi sebesar 1 Kegiatan (target 9 Kegiatan).

Nilai Kinerja Organisasi dengan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran kegiatan adalah sebesar 61,19%, dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan cukup baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Draft Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025-2029.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), pelaksanaan program reformasi birokrasi, serta adaptasi terhadap teori/praktik terbaik dan terkini.



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	_____
KATA SAMBUTAN	_____
RINGKASAN EKSEKUTIF	_____
DAFTAR ISI	_____
DAFTAR TABEL	_____
DAFTAR GAMBAR	_____
DAFTAR LAMPIRAN	_____
BAB I PENDAHULUAN.....	2
I.1 Latar Belakang	2
I.2 Sumber Daya Manusia	5
I.3 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	6
I.4 Sistematika Laporan	10
I.5 Uraian Singkat Perencanaan Strategis	18
I.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	22
I.7 Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	23
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	29
II.1 Akuntabilitas Kinerja	29
II.2 Pengukuran Capaian Kinerja	31
SASARAN KEGIATAN 2 : MENINGKATNYA KONEKTIVITAS JARINGAN TRANSPORTASI DTPK	
IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	33
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	33
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	34
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	34
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	37
SASARAN KEGIATAN 3 : MENINGKATNYA KONEKTIVITAS JARINGAN TRAYEK ANTAR KOTA DENGAN TERMINAL, PUSAT KEGIATAN (KEK, KSN, & KI), LINTAS NEGARA, DAN PEDESAAN ANTAR PROVINSI	
IKK 3.1 Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP Terhadap Terminal Tipe A	38
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	38
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	38
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	39
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	41
IKK 3.2 Jumlah Terminal Tipe A yang Dibangun dan Beroperasi Untuk Mendukung Konektivitas.....	41

a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	41
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	41
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	42
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	43
SASARAN KEGIATAN 5 : MENINGKATNYA RASIO KONEKTIVITAS JARINGAN TRANSPORTASI ANGKUTAN PENYEBERANGAN	
IKK. 5 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang Dibangun dan Beroperasi Untuk Mendukung Konektivitas.....	44
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	44
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	44
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	45
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	47
IKK. 6 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP.....	47
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	47
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	47
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	48
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	50
SASARAN KEGIATAN 6 : MENINGKATNYA RASIO KONEKTIVITAS JARINGAN TRANSPORTASI ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU	
IKK 7 Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas	51
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	51
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	51
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	52
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	53
SASARAN KEGIATAN 7 : MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK SEKTOR TRANSPORTASI JALAN	
IKK 7.2 Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM.....	53
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	53
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	56
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	56
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	59
IKK 7.4 Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan KB Sesuai SPM.....	59

a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	59
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	61
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	61
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	63
IKK 7.5 Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok.....	64
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	64
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	64
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	65
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	66
IKK 7.6 Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas <i>Event</i> Khusus	67
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	67
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	67
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	68
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	70
SASARAN KEGIATAN 8: MENINGKATNYA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK SEKTOR TRANSPORTASI ASDP	
IKK 8.2 Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	70
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	70
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	76
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	76
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	78
IKK 8.4 Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM	78
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	78
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	78
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	79
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	81
IKK 8.5 Operasional Layanan Kapal Kerja sesuai SPM	81
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	81
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	81
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	82
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	83

IKK 8.6 Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan	83
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	83
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	83
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	84
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	85
SASARAN KEGIATAN 9: MENINGKATNYA KESELAMATAN ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG	
IKK 9.1 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP dan Pariwisata	86
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	86
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	86
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	87
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	89
IKK 9.2 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang.....	89
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	89
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	90
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	90
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	92
IKK 9.3 Jumlah Fasilitas Penimbangan yang Dibangun dan Dioperasionalkan untuk Mendukung Keselamatan	93
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	93
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	93
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	93
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	95
SASARAN KEGIATAN 10 : MENINGKATNYA KEPATUHAN KENDARAAN BERMOTOR MEMENUHI <i>ACTIVE</i> DAN <i>PASSIVE SAFETY</i>	
IKK 10.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai Dengan Pedoman ...	96
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	96
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	96
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	97
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	99
IKK 10.2 Jumlah Kegiatan Terkait Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah	99
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	99

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	99
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	100
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	102
SASARAN KEGIATAN 11 : MENURUNNYA JUMLAH TITIK KONFLIK LALU LINTAS JALAN	
IKK 11.1 Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasionalkan sesuai dengan Spesifikasi Teknis....	102
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	102
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	103
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	104
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	105
IKK 11.2 Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman	106
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	106
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	106
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	107
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	108
SASARAN KEGIATAN 12 : MENINGKATNYA KESADARAN DAN <i>ATTITUDE</i> PENGGUNA JASA BERKESELAMATAN	
IKK 12.1 Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan Sesuai Pedoman Pada Lokasi yang Berbeda.....	109
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	109
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	109
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	110
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	112
IKK 12.2 Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini oleh Anak, Guru, atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi yang Berbeda.....	112
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	112
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	113
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	113
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	116
SASARAN KEGIATAN 4 : MENINGKATNYA INDEKS REFORMASI BIROKRASI KEMENHUB	
IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat.....	116
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	116

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	117
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	117
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	119
IKK 4.2 Kegiatan Terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	119
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	119
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	120
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	120
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	122
IKK 4.3 Kegiatan Terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan.....	122
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	122
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	122
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	123
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	124
IKK 4.4 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	125
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	125
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	125
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	126
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	128
IKK 4.5 Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit / Pemeriksaan	128
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	128
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	128
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	129
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	131
IKK 4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat.....	131
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	131
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	132
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	132
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	134
IKK 4.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah Diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat.....	134
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	134

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	134
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	135
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	137
IKK 4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	138
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	138
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	138
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	138
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	140
IKK 4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa.....	140
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	140
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	141
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	141
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	143
IKK 4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	143
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	143
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025	143
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	144
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	146
II.3 REALISASI ANGGARAN	146
II.2.1.1 Pagu Anggaran	146
II.2.1.2 Revisi Anggaran Tahun 2025.....	147
II.2.1.3 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2024	148
II.2.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025	151
II.2.2.1 Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	151
II.2.2.2 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025.....	152
II.2.2.3 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025.....	153
II.2.2.4 Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja	155
II.2.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025	156
II.2.4 Hambatan dan Kendala	157
PENUTUP	159
III.1 Penutup.....	159
III.1.1 Ringkasan Capaian	159

III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Penanggung Jawab.....	161
LAMPIRAN	168

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan BPTD Kelas II Sumatera Selatan sesuai <i>Draft</i> Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029	18
Tabel I.2	Rencana Kinerja Tahun 2025	21
Tabel I.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	22
Tabel I.4	Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025	24
Tabel II.1	Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Triwulan II Tahun 2025	32
Tabel II.2	Realisasi Ritase IKK 2.I Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	36
Tabel II.3	Realisasi <i>Load Factor</i> IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	37
Tabel II.4	Aspek Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum di Terminal Tipe A (Aspek Keselamatan, Keamanan dan Keandalan/Keteraturan)	54
Tabel II.5	Aspek Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum di Terminal Tipe A (Aspek Kenyamanan, Kemudahan/Keterjangkauan dan Kesenjangan)	55
Tabel II.6	Realisasi Kinerja Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A di Provinsi Sumatera Selatan	58
Tabel II.7	Konversi Nilai Pelayanan	58
Tabel II.8	Aspek Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum di UPPKB	60
Tabel II.9	Realisasi Kinerja Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di UPPKB	63
Tabel II.10	Konversi Nilai Pelayanan	63
Tabel II.11	Aspek Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan Penyeberangan	71
Tabel II.12	Realisasi Kinerja Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan	77
Tabel II.13	Konversi Nilai Pelayanan	77
Tabel II.14	Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2025	146
Tabel II.15	Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2025	146
Tabel II.16	Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu per Triwulan I Tahun 2025	146
Tabel II.17	Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu per Triwulan II Tahun 2025	147
Tabel II.18	Rincian Revisi per Sumber Dana Tahun 2025	147
Tabel II.19	Rincian Revisi per Jenis Belanja Tahun 2025	148
Tabel II.20	Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2025	148
Tabel II.21	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 – Tahun 2025	148
Tabel II.22	Kegiatan Program yang Ada dalam DIPA Tahun 2025	151

Tabel II.23	Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2025	152
Tabel II.24	Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana Triwulan II Tahun 2025	153
Tabel II.25	Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025	155
Tabel II.26	Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025	155
Tabel II.27	Efisiensi Anggaran	156
Tabel III.1	Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab	198

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Grafik Capaian IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	34
Gambar II.2	Grafik Capaian IKK 3.1 Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A	39
Gambar II.3	Grafik Capaian IKK 3.2 Jumlah Terminal Tipe A yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas	42
Gambar II.4	Grafik Capaian IKK 5 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas	45
Gambar II.5	Grafik Capaian IKK 6 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP	48
Gambar II.6	Grafik Capaian IKK 7 Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas	51
Gambar II.7	Grafik Capaian IKK 7.2 Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM	56
Gambar II.8	Grafik Capaian IKK 7.4 Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM	61
Gambar II.9	Grafik Capaian IKK 7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	64
Gambar II.10	Grafik Capaian IKK 7.6 Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas <i>Event</i> Khusus	68
Gambar II.11	Grafik Capaian IKK 8.2 Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	76
Gambar II.12	Grafik Capaian IKK 8.4 Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	79
Gambar II.13	Grafik Capaian IKK 8.5 Operasional Layanan Kapal Kerja sesuai SPM	81
Gambar II.14	Grafik Capaian IKK 8.6 Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan	84
Gambar II.15	Grafik Capaian IKK 9.1 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	87
Gambar II.16	Grafik Capaian IKK 9.2 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang	90
Gambar II.17	Grafik Capaian IKK 9.3 Jumlah Fasilitas Penimbangan yang Dibangun dan Dioperasikan untuk Mendukung Keselamatan	93
Gambar II.18	Grafik Capaian IKK 10.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan Pedoman	97

Gambar II.19	Grafik Capaian IKK 10.2 Jumlah Kegiatan Terkait Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah	100
Gambar II.20	Grafik Capaian IKK 11.1 Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasikan sesuai dengan Spesifikasi Teknis	103
Gambar II.21	Grafik Capaian IKK 11.2 Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan sesuai Pedoman	107
Gambar II.22	Grafik Capaian IKK 12.1 Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda	110
Gambar II.23	Grafik Capaian IKK 12.2 Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini oleh Anak, Guru, atau Pendamping Sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda	113
Gambar II.24	Grafik Capaian IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	117
Gambar II.25	Grafik Capaian IKK 4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	120
Gambar II.26	Grafik Capaian IKK 4.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	123
Gambar II.27	Grafik Capaian IKK 4.4 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	126
Gambar II.28	Grafik Capaian IKK 4.5 Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit / Pemeriksaan	129
Gambar II.29	Grafik Capaian IKK 4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	132
Gambar II.30	Grafik Capaian IKK 4.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah Diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	135
Gambar II.31	Grafik Capaian IKK 4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	138
Gambar II.32	Grafik Capaian IKK 4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	141
Gambar II.33	Grafik Capaian IKK 4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	144
Gambar II.34	Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran 2017 - 2025	149
Gambar II.35	Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran Triwulan II Tahun 2025	154

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Sumber Daya Manusia Tahun 2025

Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Lampiran 4. Rencana Aksi Tahun 2025

Lampiran 5. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2025



B A B I

P E N D A H U L U A N



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan *Prudent*, *Transparan*, *Akuntable*, *Efektif* dan *Efisien* sesuai dengan prinsip - prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraannya.



I.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pengelola Transportasi Darat semula terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2018. Selanjutnya pada Tahun 2023, terdapat perubahan nomenklatur dan pemecahan Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023. Selanjutnya terdapat perubahan jumlah lokasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

Balai Pengelola Transportasi Darat adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi. Tipologi (BPTD) terdiri atas:

1. BPTD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, terminal untuk barang umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian, dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau, dan penyeberangan disebut BPTD Kelas I;
2. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Kelas II;
3. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik kepulauan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Kelas III;

Susunan Organisasi BPTD Kelas I terdiri atas:

1. Bagian Tata Usaha meliputi Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Bidang Prasarana meliputi Seksi Prasarana Jalan dan Seksi Prasarana Sungai, Danau dan Penyeberangan;
3. Bidang Sarana dan Angkutan meliputi Seksi Sarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Seksi Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan;
4. Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan meliputi Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Seksi Pengawasan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi BPTD Kelas II terdiri atas:

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
3. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
4. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi BPTD Kelas III terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

I.1.2 Bagan Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II



Tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi, sub bagian, satuan pelayanan dan kelompok jabatan fungsional pada BPTD Kelas II Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

a. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi, urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

b. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, danau dan Penyeberangan

Mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian terminal tipe A, terminal barang untuk umum, dan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasi moda dan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.

- c. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
Mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala dan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor, pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklauan kapal, analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan dan pelayaran perintis sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.
- d. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
Mempunyai tugas melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau, pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol, pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte, dan rambu sungai danau, pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, kegiatan karoseri, penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor, pelabuhan dan penyelenggara pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersil, operator kapal sungai, danau, dan penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, pemberian subsidi angkutan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan, penyeberangan, ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana bantu navigasi pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, rambu, alur, dan halte sungai danau, kegiatan pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis, pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pada pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta patroli dan pengamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

I.2 Sumber Daya Manusia

Data sumber daya manusia pada satuan kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan pada Tahun 2025 meliputi:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 225 Orang;
- b. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 4 Orang;
- c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 233 Orang; dan
- d. Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 10 Orang.

I.3 Potensi Isu Strategis Permasalahan

I.3.1 Potensi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan sebagai unsur pembantu pimpinan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan kepada pemerintah daerah. Tugas dan fungsi dimaksud meliputi koordinasi kegiatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, pembinaan dan pemberian dukungan di bidang transportasi darat. Potensi pengembangan pada bidang transportasi darat adalah sebagai berikut:

- a. Dalam fenomena perkembangan globalisasi, tingkat pelayanan transportasi darat akan terus diupayakan untuk memenuhi standar nasional maupun internasional sehingga meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global;
- b. Teknologi transportasi darat akan berpengaruh terhadap kapasitas angkut, fleksibilitas pergerakan, kecepatan waktu tempuh, dan bentuk serta kehematannya dalam mengkonsumsi bahan bakar;
- c. Dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan melalui kebijakan deregulasi akan memungkinkan meningkatnya peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan dana investasi yang dibutuhkan bagi pembangunan infrastruktur transportasi darat, serta akan memperluas jangkauan;
- d. Dengan melakukan program pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan maka akan meningkatkan citra Pemerintah Indonesia dalam dunia internasional dan meningkatkan citra bangsa. Pembangunan transportasi darat berkelanjutan dapat dilakukan secara konsisten, misalnya mewajibkan melakukan studi amdal sebelum masa konstruksi bagi setiap program pembangunan transportasi darat yang telah disetujui pendanaannya. Selanjutnya dilakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pasca operasi secara berkala oleh Lembaga-lembaga yang telah ada. Pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah dapat disinergikan menjadi kekuatan yang efektif.

I.3.2 Isu Strategis

- A. Membangun Konektivitas Nasional untuk keseimbangan pembangunan Infrastruktur penunjang konektivitas nasional baik berupa jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi, perlu diintegrasikan dengan pelayanan sarana intermoda transportasi yang terhubung secara efisien dan efektif, termasuk mendorong pembangunan konektivitas antar wilayah, sehingga dapat mempercepat dan memperluas

pembangunan ekonomi Indonesia. Penyediaan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan logistik, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat gerak ekonomi. Kebijakan strategis untuk mewujudkan konektivitas nasional:

1. Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda;
2. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung Kerjasama regional dan global;
3. Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;
4. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri;
5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan;
6. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi; dan
7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas Lembaga pengembangan sumber daya manusia.

B. Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan

Pembangunan perkotaan Indonesia kedepan diarahkan pada peningkatan peran perkotaan sebagai basis pembangunan dan kehidupan yang layak huni, berkeadilan, mandiri, berdayasaing, dan berkelanjutan, sesuai dengan karakter potensi dan budaya lokal. Arah kebijakan pembangunan perkotaan berfokus pada pengembangan kota sebagai suatu kesatuan kawasan/wilayah, yaitu kota sebagai pendorong pertumbuhan nasional dan regional serta kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan penduduk kota. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan transportasi umum massal perkotaan, pembangunan sistem angkutan umum modern yang saling terintegrasi seperti BRT dan LRT diharapkan dapat meningkatkan peran angkutan umum dalam melayani kebutuhan perjalanan penduduk perkotaan serta menciptakan transportasi perkotaan yang praktis, efisien, ramah lingkungan, dan berkeadaban. Arah kebijakandan strategi yang disusun lima tahun kedepan adalah:

1. Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu;
2. Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan; dan
3. Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan.

I.3.3 Permasalahan

A. Permasalahan Transportasi Angkutan Jalan

1. Rendahnya kondisi pelayanan prasarana jalan akibat kerusakan di jalan, belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan, antarkota, perkotaan dan pedesaan.
2. Masih tingginya kerusakan jalan akibat pelanggaran muatan lebih di jalan yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi akibat dari :
 - a. Pengawasan melalui jembatan timbang belum optimal dikarenakan belum semua jembatan timbang beroperasi;
 - b. Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan akibat: disiplin pengguna jalan yang rendah; rendahnya tingkat kelaikan armada; rambu dan fasilitas keselamatan di jalan; law enforcement peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas;
 - c. Masalah mobilitas, terutama rendahnya kelancaran distribusi angkutan jalan, akibat:
 - a) Terbatasnya perkembangan kapasitas prasarana jalan dibandingkan dengan perkembangan armada di jalan;
 - b) Optimalisasi penggunaan kapasitas jalan yang masih rendah, serta banyaknya daerah rawan kemacetan akibat penggunaan badan dan daerah milik jalan untuk kegiatan sosial ekonomi, pasar, parkir, dsb; dan
 - c) Masalah keterjangkauan dan pemerataan pelayanan transportasi jalan; banyaknya pungutan dan retribusi di jalan yang membuat biaya angkut di jalan belum efisien.
3. Masalah peraturan dan kelembagaan, terutama:
 - a. Belum terpadunya tatanan transportasi nasional dan wilayah;
 - b. Masalah pendidikan dan *law enforcement* peraturan yang belum efektif dilihat dari tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas di jalan.

Pelanggaran lalu lintas dibedakan menjadi pelanggaran muatan dan/atau dimensi, pelanggaran perijinan angkutan orang dan/atau barang, pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran kelengkapan dokumen, pelanggaran rambu. Masalah disiplin berlalu lintas juga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas;

- c. Masih terbatasnya pengembangan SDM di bidang transportasi darat baik di tingkat regulator maupun operator, pembinaan usaha angkutan serta pengembangan teknologi sarana dan prasarana transportasi darat yang lebih efisien dan ramah lingkungan;
- d. Masih tingginya dampak lingkungan (polusi udara dan suara) akibat kemacetan dan masih dominannya penggunaan lalu lintas kendaraan pribadi di jalan, terutama di wilayah perkotaan. Rendahnya kualitas dan kuantitas angkutan umum terutama transportasi perkotaan akibat belum berkembangnya keterpaduan rencana tata ruang dan transportasi perkotaan, kesadaran dan kemampuan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan transportasi, rendahnya disiplin masyarakat pengguna, profesionalitas aparat dan operator transportasi, tingginya tingkat kemacetan lalu lintas pada jam sibuk, serta rendahnya kualitas pelayanan transportasi umum.
- e. Permasalahan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - a) Belum ada data yang lengkap mengenai peta alur pelayaran, sungai dan danau;
 - b) Terbatasnya jumlah SDM sehingga pelaksanaan Monitoring dan Pengumpulan Data Transportasi SDP di daerah kurang optimal;
 - c) Belum dilaksanakan penetapan kelas alur-pelayaran sungai dan danau sebagai batas wilayah administrasi dan pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota; dan
 - d) Belum ada buku petunjuk-pelayaran di sungai dan danau.
- f. Permasalahan Transportasi Perkotaan
 - a) Kurangnya panduan tentang penyelenggaraan transportasi perkotaan;
 - b) Kurangnya pemahaman terhadap penyelenggaraan transportasi perkotaan;
 - c) Kurang jelasnya kewenangan penanganan masalah transportasi perkotaan khususnya pada kawasan aglomerasi;

- d) Masih belum terintegrasinya perencanaan tata ruang dengan transportasi;
 - e) Kemacetan lalu lintas;
 - f) Pelayanan angkutan umum belum memadai; dan
 - g) Pencemaran udara akibat kendaraan bermotor.
- g. Permasalahan Keselamatan Transportasi Darat
- a) Ada dua hal yang dihadapi di dalam bidang transportasi, yaitu kemacetan dan keselamatan. Kemacetan terjadi di kota-kota besar di Indonesia, sedangkan kecelakaan terjadi hampir di semua wilayah Indonesia;
 - b) Kurangnya koordinasi dengan instansi-instansi lain terkait dengan masalah keselamatan;
 - c) Belum lengkapnya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan keselamatan jalan; dan
 - d) Bidang keselamatan jalan belum mendapatkan perhatian yang lebih oleh pemerintah daerah sehingga program-program peningkatan keselamatan jalan belum berjalan dengan maksimal.

I.4 Sistematika Laporan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan II Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Tugas Pokok dan Fungsi
 - Bagan Struktur Organisasi
- I.3 Sumber Daya Manusia
- I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I.5 Sistematika Laporan
- I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis
 - Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025
- I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB II Akuntabilitas Kinerja

- II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja
- II.2 Pengukuran Capaian Kinerja

SASARAN KEGIATAN 2 : MENINGKATNYA KONEKTIVITAS JARINGAN TRANSPORTASI DTPK

IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

SASARAN KEGIATAN 3 : MENINGKATNYA KONEKTIVITAS JARINGAN TRAYEK ANTAR KOTA DENGAN TERMINAL, PUSAT KEGIATAN (KEK, KSN & KI), LINTAS NEGARA, DAN PEDESAAN ANTAR PROVINSI

IKK 3.1 Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

IKK 3.2 Jumlah terminal tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

SASARAN KEGIATAN 5 : MENINGKATNYA RASIO KONEKTIVITAS JARINGAN TRANSPORTASI ANGKUTAN PENYEBERANGAN

IKK 5 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

IKK 6 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

SASARAN KEGIATAN 6 : MENINGKATNYA RASIO KONEKTIVITAS JARINGAN TRANSPORTASI ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

IKK 7 Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

SASARAN KEGIATAN 7: MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK SEKTOR TRANSPORTASI JALAN

IKK 7.2 Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

IKK 7.4 Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

IKK 7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

IKK 7.6 Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas *Event* Khusus

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

SASARAN KEGIATAN 8 : MENINGKATNYA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK SEKTOR TRANSPORTASI ASDP

IKK 8.2 Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

IKK 8.4 Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

IKK 8.5 Operasional layanan Kapal Kerja sesuai SPM

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

IKK 8.6 Operasional dan pemeliharaan pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

SASARAN KEGIATAN 9 : MENINGKATNYA KESELAMATAN ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG

IKK 9.1 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

IKK 9.2 Jumlah kegiatan pengawasan operasional angkutan barang

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

IKK 9.3 Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

SASARAN KEGIATAN 10 : MENINGKATNYA KEPATUHAN KENDARAAN BERMOTOR MEMENUHI *ACTIVE* DAN *PASSIVE SAFETY*

IKK 10.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

IKK 10.2 Jumlah kegiatan terkait kalibrasi alat uji berkala di daerah

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

SASARAN KEGIATAN 11 : MENURUNNYA JUMLAH TITIK KONFLIK LALU LINTAS JALAN

IKK 11.1 Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

IKK 11.2 Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

SASARAN KEGIATAN 12 : MENINGKATNYA KESADARAN & *ATTITUDE* PENGGUNA JALAN BERKESELAMATAN

IKK 12.1 Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

IKK 12.2 Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

SASARAN KEGIATAN 4 : MENINGKATNYA INDEKS REFORMASI BIROKRASI KEMENHUB

IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

IKK 4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

IKK 4.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

IKK 4.4 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

IKK 4.5 Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

IKK 4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

IKK 4.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

IKK 4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

IKK 4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

IKK 4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja

- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

II.3 Realisasi Anggaran

III.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2025

- Pagu Anggaran
- Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025
- Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025
- Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2017 – 2025

III.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

- Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025
- Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025
- Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025
- Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

III.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

III.3.4 Hambatan dan Kendala

BAB III PENUTUP

III.1 Penutup

III.1.1 Ringkasan Capaian

III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Lampiran

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
3. Rencana Aksi Tahun 2025;
4. Lain – lain yang dianggap perlu.

I.5 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020 - 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program BPTD Kelas II Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2025 - 2029 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2025 – 2029 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, BPTD Kelas II Sumatera Selatan adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja program BPTD Kelas II Sumatera Selatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel I.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan BPTD Kelas II Sumatera Selatan sesuai *Draft* Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	
SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100	100	100	100
	IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1	1	1	1	1
	IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7	7	7	7	7
	IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan	%	100	100	100	100	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
		angkutan penyeberangan						
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6	6	6	6	6
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	50	55	55	55	55
		IKK2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	50	55	55	55	55
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	30	30	30	50	50
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	90	90	90	90
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	55	50	50	45	40
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	1	2	1	1	2
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1400	1500	1500	1600	1600
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala	%	82,35	88,2	88,2	94,1	100

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET						
			2025	2026	2027	2028	2029		
		kendaraan bermotor							
	IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	1	1	1	1	1	
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	90	90	90	90
WA			PROGRM DUKUNGAN MANAJEMEN						
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	90	90	90	90

I.5.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahunan BPTD Kelas II Sumatera Selatan merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2025 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Kegiatan BPTD Kelas II Sumatera Selatan melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat.

Tabel I.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	25
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	60
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	16
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	82
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
SK1	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

I.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Sumatera Selatan merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2025 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Kinerja BPTD Kelas II Sumatera Selatan memiliki total anggaran Rp. 118.580.021.000,- (*Seratus Delapan Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*), dimana rinciannya sebagai berikut.

Tabel I.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2025
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7
			IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
			IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	25
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	60
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	16

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2025
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000
			IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	82
4	SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK1	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

Kegiatan	Anggaran
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 34.197.678.000,-
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 19.754.451.000,-
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 26.783.621.000,-
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 5.231.690.000,-
5. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 5.559.179.000,-
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 27.053.402.000,-

I.7 Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dengan terjadinya perubahan regulasi Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat sesuai PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, pergantian Pimpinan, perubahan / pergeseran anggaran, serta perubahan beberapa target Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan yang mengacu pada Renstra Ditjen Perhubungan Darat 2025–2029, maka mengakibatkan disesuaikan kembali Perjanjian Kinerja pada Bulan Juni 2025 berdasarkan Revisi DIPA ke-3 tanggal 24 April 2025.

Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan dengan total anggaran sebesar Rp. 118.580.021.000,- (*Seratus Delapan Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*).

Tabel I.4 Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK2 Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	4
2.	SK 3 Meningkatnya konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 3.1 Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A	Kegiatan	7
		IKK 3.2 Jumlah terminal tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	7
3.	SK 5 Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK 5 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	3
		IKK 6 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Trayek	1
4.	SK 6 Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan sungai dan danau	IKK 7 Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	3
5.	SK 7 Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 7.2 Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM	Unit	7
		IKK 7.4 Jumlah operasional layanan Fasilitas	Unit	3

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Penimbangan KB sesuai SPM		
		IKK 7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	6
		IKK 7.6 Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas <i>Event</i> Khusus	Kegiatan	2
6.	SK 8 Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK 8.2 Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Unit	3
		IKK 8.4 Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Unit	1
		IKK 8.5 Operasional layanan Kapal Kerja sesuai SPM	Unit	1
		IKK 8.6 Operasional dan pemeliharaan pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan	Unit	1
7.	SK 9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.1 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Kegiatan	7
		IKK 9.2 Jumlah kegiatan pengawasan operasional angkutan barang	Kegiatan	3
		IKK 9.3 Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan	Unit	3
8.	SK 10 Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor	IKK 10.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun	Kegiatan	1

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	memenuhi <i>active</i> dan <i>passive safety</i>	Kendaraan sesuai dengan pedoman		
		IKK 10.2 Jumlah kegiatan terkait kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan	12
9.	SK 11 Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 11.1 Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis	Unit	5.967
		IKK 11.2 Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman	Lokasi	4
10.	SK 12 Meningkatnya kesadaran & <i>attitude</i> pengguna jalan berkeselamatan	IKK 12.1 Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	150
		IKK 12.2 Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	180
11.	SK 4 Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub	IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3
		IKK 4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1
		IKK 4.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Dokumen	2

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
		IKK 4.4 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3
		IKK 4.5 Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	2
		IKK 4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	2
		IKK 4.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	5
		IKK 4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	2
		IKK 4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	1
		IKK 4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	9



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

1. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu Instansi Pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya.



Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web *e-Performance* yang menyediakan fasilitas inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025;
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2025 Dalam Draft Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan. Untuk mewujudkan 4 (empat) tujuan strategis yang tertuang dalam Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029, bermuara pada terwujudnya 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai BPTD Kelas II Sumatera Selatan.

Tabel II. 1 Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Triwulan II Tahun 2025

SA SARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PAGU TAHUNAN	TRIWULAN II						
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET PROGNOSA KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	CAPAIAN KEUANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
SK 2	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK					100,00%			133,70%	
IKK 2.1	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	4	4.289.575.000	4	4	100,00%	2.144.787.500	2.867.655.750	133,70%
SK 3	Meningkatnya konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi					100,00%			35,03%	
IKK 3.1	Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A	Kegiatan	7	907.170.000	7	7	100,00%	453.585.000	0,00	0,00%
IKK 3.2	Jumlah terminal tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	7	12.675.973.000	7	7	100,00%	6.337.986.500	4.439.955.826	70,05%
SK 5	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan					100,00%			82,47%	
IKK 5	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	3	1.276.116.000	3	3	100,00%	638.058.000	426.481.632	66,84%
IKK 6	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Trayek	1	3.628.283.000	1	1	100,00%	1.814.141.500	1.779.676.000	98,10%
SK 6	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan sungai dan danau					33,33%			0,00%	
IKK 7	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	3	26.279.820.000	3	1	33,33%	13.139.910.000	0,00	0,00%
SK 7	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan					62,50%			42,67%	
IKK 7.2	Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM	Unit	7	214.000.000	7	7	100,00%	107.000.000	0,00	0,00%
IKK 7.4	Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM	Unit	3	114.830.000	3	3	100,00%	57.415.000	0,00	0,00%
IKK 7.5	Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	6	5.231.690.000	6	0	0,00%	2.615.845.000	0,00	0,00%
IKK 7.6	Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Event Khusus	Kegiatan	2	60.000.000	2	1	50,00%	30.000.000	51.205.000	170,68%
SK 8	Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP					41,67%			6,19%	
IKK 8.2	Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Unit	3	237.000.000	3	2	66,67%	118.500.000	0,00	0,00%
IKK 8.4	Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Unit	1	237.000.000	1	0	0,00%	118.500.000	0,00	0,00%
IKK 8.5	Operasional layanan Kapal Kerja sesuai SPM	Unit	1	2.669.021.000	1	0	0,00%	1.334.510.500	330.211.510	24,74%
IKK 8.6	Operasional dan pemeliharaan pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan	Unit	1	250.000.000	1	1	100,00%	125.000.000	0,00	0,00%
SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang					100,00%			32,46%	
IKK 9.1	Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Kegiatan	7	907.170.000	7	7	100,00%	453.585.000	0,00	0,00%
IKK 9.2	Jumlah kegiatan pengawasan operasional angkutan barang	Kegiatan	3	45.000.000	3	3	100,00%	1.620.728.500	789.030.086	48,68%
IKK 9.3	Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan	Unit	3	3.241.457.000	3	3	100,00%	1.620.728.500	789.030.086	48,68%
SK 10	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety					62,50%			0,00%	
IKK 10.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Kegiatan	1	806.670.000	1	1	100,00%	403.335.000	0,00	0,00%
IKK 10.2	Jumlah kegiatan terkait kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan	12	1.136.670.000	12	3	25,00%	568.335.000	0,00	0,00%
SK 11	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan					0,00%			0,00%	
IKK 11.1	Jumlah Perengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis	Unit	5967	18.491.975.000	5967	0	0,00%	9.245.987.500	0,00	0,00%
IKK 11.2	Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganannya sesuai pedoman	Lokasi	4	1.694.025.000	4	0	0,00%	847.012.500	0,00	0,00%
SK 12	Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan					0,00%			0,00%	
IKK 12.1	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	150	250.000.000	150	0	0,00%	125.000.000	0,00	0,00%
IKK 12.2	Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	180	107.143.000	180	0	0,00%	53.571.500	0,00	0,00%
SK 4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Kemhub					73,11%			0,00%	
IKK 4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3		3	2	66,67%			0,00%
IKK 4.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1		1	1	100,00%			0,00%
IKK 4.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Dokumen	2		2	2	100,00%			0,00%
IKK 4.4	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3		3	1	33,33%			0,00%
IKK 4.5	Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	2		2	2	100,00%			0,00%
IKK 4.6	Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	2	2.711.180.000	2	2	100,00%	1.355.590.000	0,00	0,00%
IKK 4.7	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	5		5	1	20,00%			0,00%
IKK 4.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	2		2	2	100,00%			0,00%
IKK 4.9	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	1		1	1	100,00%			0,00%
IKK 4.10	Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	9		9	1	11,11%			0,00%
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan										30,23%
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan										63,82%
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKK≥100%)										18
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0%≤IKK<100%)										15

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)



Pada Triwulan II Tahun 2025, ada 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya ada 33 (tiga puluh tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan. Penjelasan capaian IKK untuk setiap Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DTPK

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang mempunyai peran dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025-2029. Kegiatan pembangunan dan pelayanan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan direncanakan dan dilaksanakan untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat umum. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan dalam IKK membangun negara sesuai dengan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 2.1 : Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan.

IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan merupakan Layanan Subsidi Perintis pada 4 (empat) Trayek yaitu: 1) Terminal Simpang Periuk – Simpang 9 Cekar, 2) Terminal Simpang Periuk – Muara Rupit – Simpang Nibung, 3) Terminal Simpang Periuk – Karang Dapo – Rawas Ilir, 4) Terminal Jakabaring – Mariana – Muara Padang. Layanan subsidi transportasi angkutan jalan nasional merupakan strategi penting untuk menjangkau masyarakat di wilayah yang belum terlayani secara komersial. Meskipun menghadapi tantangan seperti medan berat, keterbatasan anggaran, dan minat operator yang rendah, program ini terus diperkuat melalui evaluasi rute, digitalisasi, sinergi pusat-daerah, dan penyesuaian kebijakan subsidi.

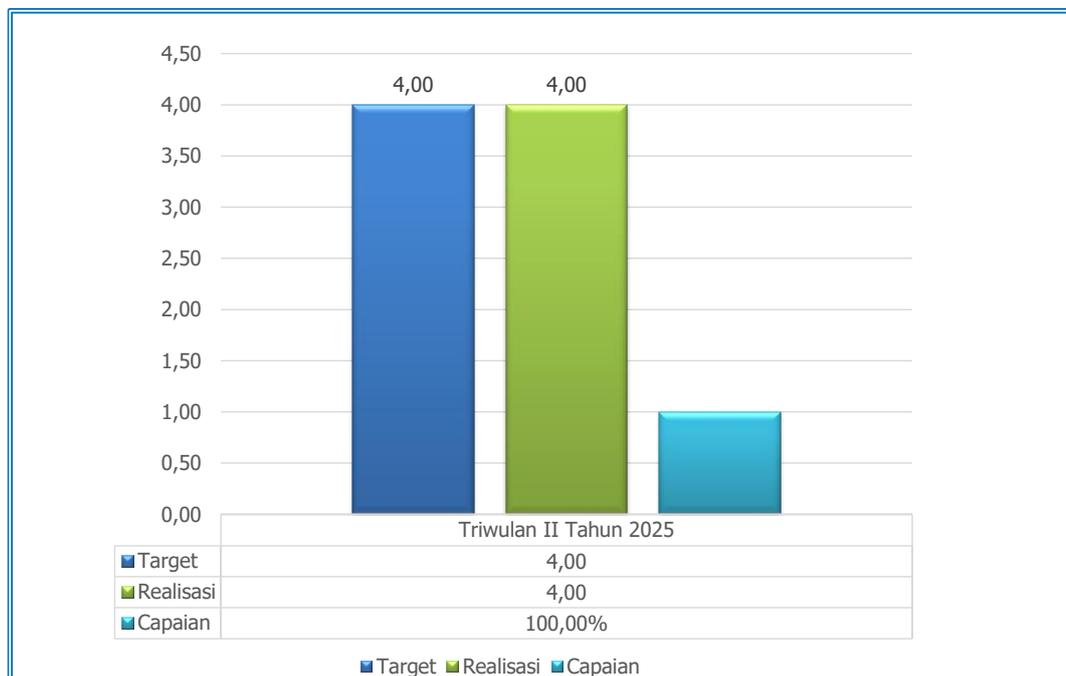
Pelaksanaan Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau angkutan umum, dan untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan bahwa Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan adalah bantuan biaya pengoperasian untuk Angkutan Perkotaan dengan tarif yang ditetapkan pada trayek tertentu, dimana pemberian subsidi ini memiliki tujuan untuk:

1. Stimulus pengembangan angkutan penumpang umum perkotaan dengan jangka waktu yang ditentukan berdasarkan hasil evaluasi;
2. Meningkatkan minat penggunaan angkutan umum; dan
3. Kemudahan mobilitas Masyarakat di Kawasan Perkotaan.

Capaian kinerja Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan dihitung berdasarkan perbandingan realisasi jumlah trayek terhadap target trayek yang telah ditetapkan.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian kinerja Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan pada Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 4 Trayek jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebanyak 4 Trayek, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.1**. Grafik Capaian IKK Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan.



Gambar II.1. Grafik Capaian IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ **Dasar Hukum**

Dasar hukum Indikator Kinerja Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan yaitu:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis;
2. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 630 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemberian Subsidi Berupa Bantuan Biaya Operasional Angkutan Jalan Perintis; dan

3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP – DRJD 5954 Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2025, yaitu sebanyak 4 (empat) trayek ditetapkan untuk dilayani Angkutan Jalan Perintis di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun rute angkutan perintis sebagai berikut:
 - a) Terminal Simpang Periuk – Simpang 9 Cekar;
 - b) Terminal Simpang Periuk – Muara Rupit – Simpang Nibung;
 - c) Terminal Simpang Periuk – Rupit – Karang Dapo – Rawas Ilir; dan
 - d) Terminal Jakabaring – Mariana – Muara Padang.

▪ **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi pada Tahun 2025 memiliki target 4 Trayek yang diperoleh dari capaian terhadap PK di tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan pada pembahasan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025.

▪ **Faktor Keberhasilan**

Adapun faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan antara lain:

1. Adanya minat masyarakat terhadap penggunaan transportasi angkutan jalan yang disubsidi di setiap trayek;
2. Tercapainya target ritase per bulan sesuai dengan perjanjian kerja pada pelaksanaan layanan subsidi transportasi angkutan jalan;
3. Dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan dan Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan pelayanan keperintisan angkutan jalan;
4. Masih diperlukannya angkutan keperintisan di daerah yang belum terjangkau oleh angkutan umum; dan
5. Angkutan keperintisan menjadi salah satu pilihan transportasi dengan biaya yang terjangkau.

▪ **Faktor Kegagalan**

Adapun faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan antara lain:

1. Terdapat kondisi jalan yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan bus sedang;
2. Belum terdapat perangkat tambahan pengawasan berbasis digital;
3. Adanya kerusakan komponen kendaraan;
4. Nilai Load factor relatif masih rendah; dan
5. Terjadinya kahar (banjir).

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 4 Trayek meliputi:

1. Terminal Simpang Periuk – Simpang 9 Cekar;
2. Terminal Simpang Periuk – Muara Rupit – Simpang Nibung;
3. Terminal Simpang Periuk – Karang Dapo – Rawas Ilir; dan
4. Terminal Jakabaring – Mariana – Muara Padang.

- **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu tercapainya target trayek pada layanan subsidi transportasi angkutan jalan dan kebermanfaatan dalam 1 (satu) tahun pelayanan yang diinterpretasikan melalui data kinerja berupa capaian ritase dan/atau faktor muat (*load factor*) sebagaimana tabel berikut ini.

$$\text{IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan} = \frac{\text{Realisasi Trayek}}{\text{Target Trayek}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{4 \text{ Trayek}}{4 \text{ Trayek}} \times 100\% = 100\%$$

Tabel II. 2 Realisasi Ritase IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan

No.	Trayek	Target Volume (1 Tahun)	Satuan	Total Realisasi s.d. Triwulan II	%
1.	Terminal Simpang Periuk – Simpang 9 Cekar	597	Rit	228	38,19%
2.	Terminal Simpang Periuk – Muara Rupit – Simpang Nibung	545	Rit	175	32,11%
3.	Terminal Simpang Periuk – Karang Dapo – Rawas Ilir	534	Rit	163	30,52%
4.	Terminal Jakabaring – Mariana – Muara Padang	518	Rit	93	17,95%
Total		2.194	Rit	659	29,69%

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumsel (2025)

Tabel II. 3 Realisasi *Load Factor* IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan

No.	Trayek	Jumlah Penumpang	Kapasitas Angkut x Total Ritase	%
1.	Terminal Simpang Periuk – Simpang 9 Cekar	3.885	17.328	22,42%
2.	Terminal Simpang Periuk – Muara Rupit – Simpang Nibung	2.497	11.134	22,43%
3.	Terminal Simpang Periuk – Karang Dapo – Rawas Ilir	2.947	10.640	27,70%
4.	Terminal Jakabaring – Mariana – Muara Padang	1.030	2.604	39,55%
Total		10.359	41.706	24.83%

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumsel (2025)

Faktor Muat Penumpang (*Load Factor*) merupakan Perbandingan Jumlah Penumpang dengan Kapasitas Angkut dan Total Ritase (Jumlah Kapasitas dikalikan 100%) dengan rumus:

$$LF = \frac{\text{Jumlah Penumpang}}{\text{Kapasitas Angkut x Total Ritase}} \times 100\%$$

▪ **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 4.289.575.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 2.867.655.750,- atau mencapai 66,85%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan yaitu:

1. Perencanaan yang komprehensif dalam menentukan rute / trayek angkutan perintis di Provinsi Sumatera Selatan dengan memperhatikan RPJMN, Renstra serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan angkutan perintis di lapangan;
2. Komitmen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam kegiatan peningkatan konektivitas transportasi darat terutama di daerah-daerah terisolir dan belum terlayani angkutan umum;
3. Merubah spesifikasi kendaraan menjadi bus kecil;
4. Menambah perangkat pengawasan berbasis digital (CCTV);
5. Memaksimalkan kendaraan cadangan;
6. Melaksanakan mitigas; dan
7. Terus berupaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar yang dilalui oleh rute angkutan perintis jalan.

Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Konektivitas Jaringan Trayek Antar Kota Dengan Terminal, Pusat Kegiatan (KEK, KSN & KI), Lintas Negara, dan Pedesaan Antar Provinsi

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 3.1 : Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A; dan
2. IKK 3.2 : Jumlah terminal tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas.

IKK 3.1 Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A

a.1. Definisi Indikator Kinerja

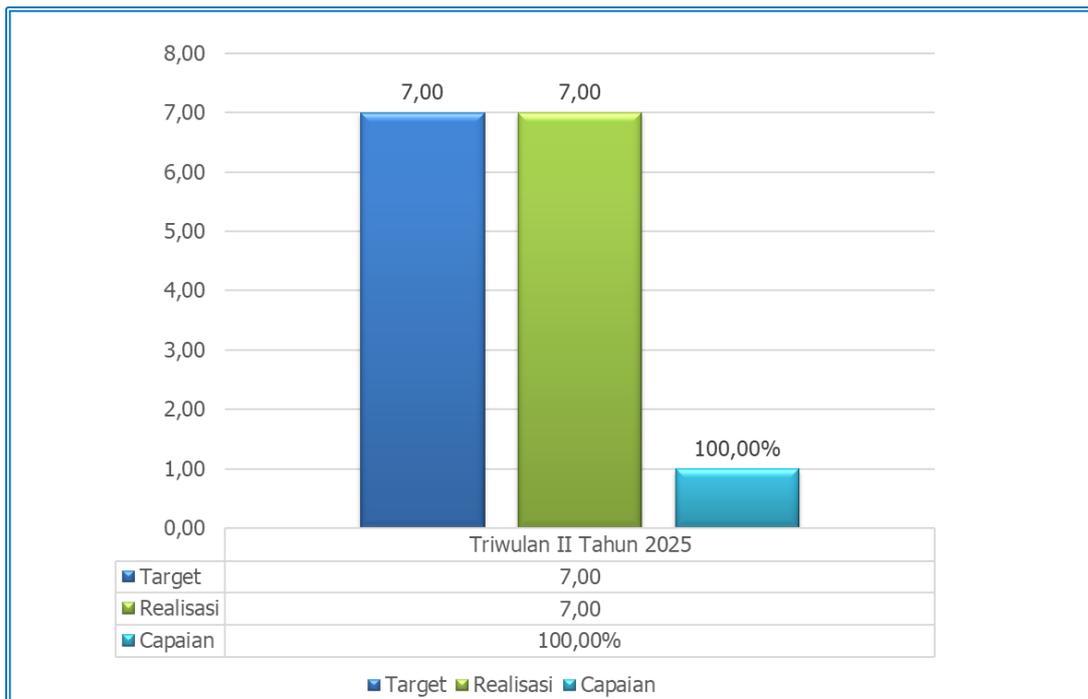
Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A merupakan Monitoring dan Evaluasi layanan Antar Kota Antar Provinsi pada Terminal Tipe A Alang - Alang Lebar, Karya Jaya, Kayu Agung, Batu Kuning, Batay, Simpang Periuk dan Betung.

Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP dilaksanakan di 7 (tujuh) Terminal Tipe A, antara lain:

1. Terminal Tipe A Alang-alang Lebar (Kota Palembang);
2. Terminal Tipe A Karya Jaya (Kota Palembang);
3. Terminal Tipe A Betung (Kab. Banyuasin);
4. Terminal Tipe A Kayu Agung (Kab. OKI);
5. Terminal Tipe A Batu Kuning (Kab. OKU);
6. Terminal Tipe A Batai (Kab. Lahat); dan
7. Terminal Tipe A Simpang Periuk (Kota Lubuklinggau).

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Kinerja Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A pada Tahun 2025 sebanyak 7 Kegiatan jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 7 Kegiatan, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.2**. Grafik Capaian IKK 3.1 Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A.



Gambar II.2. Grafik Capaian IKK 3.1 Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A mengacu pada peraturan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPTD yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PM 20 Tahun 2018, PM 6 Tahun 2023 dan dan terakhir diubah dengan PM 1 Tahun 2025 tentang tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A memiliki target 7 Kegiatan, dimana kegiatan ini dilaksanakan di 7 (tujuh) Lokasi Terminal Tipe A. Target kinerja ini diperoleh dari capaian tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan pada pembahasan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025.

▪ Faktor Keberhasilan

Keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A antara lain yaitu:

1. Ketersediaan data keberangkatan/kedatangan yang akurat dan *real time*;
2. Penggunaan sistem informasi dan teknologi digital seperti *e-ticketing*, *GPS* dan data layanan berbasis digital;

3. SDM yang berkompeten dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan AKAP;
4. Dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi layanan AKAP; dan
5. Koordinasi yang baik antar instansi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi antara Dinas Perhubungan, BPTD, Kepolisian, dan operator angkutan AKAP.

▪ **Faktor Kegagalan**

Kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A antara lain yaitu:

1. Keterbatasan anggaran kegiatan monitoring dan evaluasi pada masa efisiensi anggaran;
2. Bus angkutan AKAP tidak banyak yang ingin masuk ke Terminal Tipe A dikarenakan Terminal Tipe A masih sepi dan tidak berada di pusat kota;
3. Kegiatan monitoring dan evaluasi layanan belum menggunakan sistem informasi dan teknologi digital, sehingga data layanan yang dihasilkan masih bersifat manual;
4. Belum adanya SOP Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP di Terminal Tipe A; dan
5. Kurang terjalannya koordinasi antar instansi.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 7 Kegiatan yang diperoleh dari realisasi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi layanan AKAP di 7 (tujuh) Terminal Tipe A.

▪ **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 100%.

$$\begin{aligned} & \text{IKK 3.1 Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A} \\ & = \frac{\text{Realisasi Jumlah Kegiatan Monev Layanan AKAP di Terminal Tipe A}}{\text{Target Jumlah Kegiatan Monev Layanan AKAP di Terminal Tipe A}} \times 100 \% \\ & \text{\% Capaian Kinerja} = \frac{7 \text{ Kegiatan}}{7 \text{ Kegiatan}} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

▪ **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Jumlah Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A Tahun 2025 sebesar Rp. 12.675.973.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 0 atau mencapai 0%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A yaitu:

1. Meningkatkan fasilitas di Terminal Tipe A melalui pemeliharaan/perawatan terhadap fasilitas utama dan/atau fasilitas penunjang;
2. Melakukan pengawasan layanan AKAP di Terminal Tipe A secara berkala; dan
3. Meningkatkan kapasitas SDM di Terminal Tipe A melalui kegiatan diklat petugas terminal dan diklat lainnya.

IKK 3.2 Jumlah Terminal Tipe A yang Dibangun dan Beroperasi Untuk Mendukung Konektivitas

a.1. Definisi Indikator Kinerja

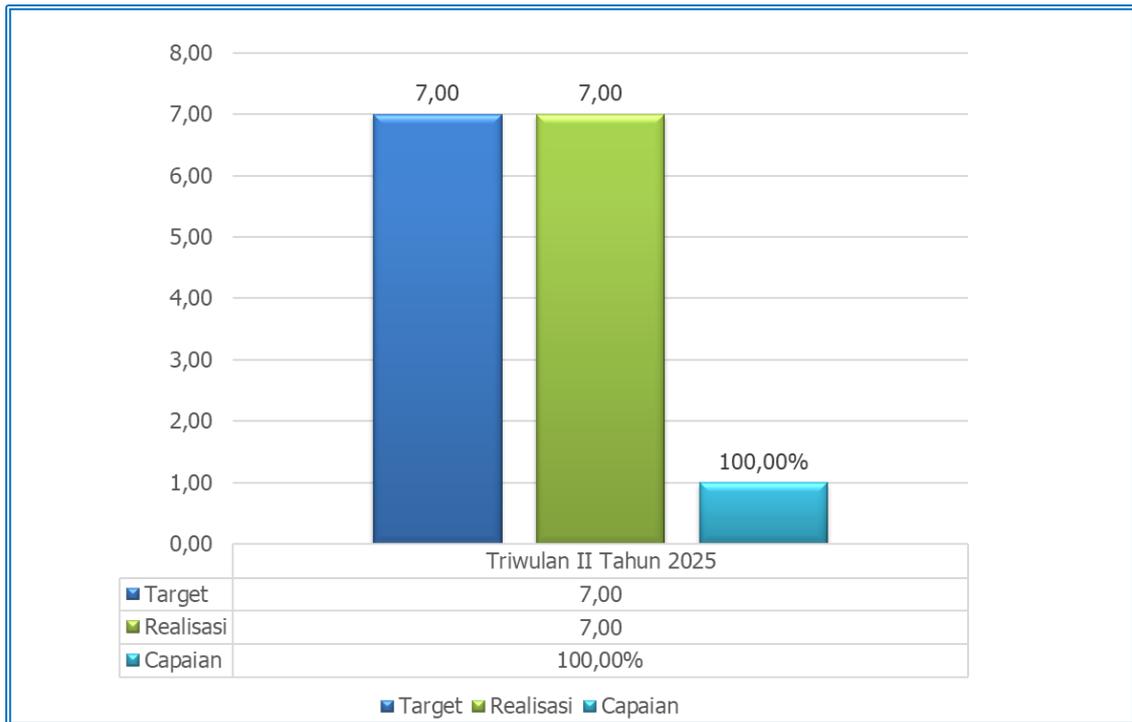
Jumlah terminal tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas merupakan Pembangunan Terminal Penumpang yang menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan yang meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Pengoperasian Terminal Penumpang meliputi kegiatan Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan operasional Terminal.

Jumlah Terminal Tipe A yang berada di wilayah kerja BPTD Kelas II Sumatera Selatan sebanyak 7 (tujuh) lokasi, sebagai berikut:

1. Terminal Tipe A Alang-alang Lebar (Kota Palembang);
2. Terminal Tipe A Karya Jaya (Kota Palembang);
3. Terminal Tipe A Betung (Kab. Banyuasin);
4. Terminal Tipe A Kayu Agung (Kab. OKI);
5. Terminal Tipe A Batu Kuning (Kab. OKU);
6. Terminal Tipe A Batai (Kab. Lahat); dan
7. Terminal Tipe A Simpang Periuk (Kota Lubuklinggau).

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian kinerja Jumlah Terminal Tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas pada tahun 2025 sebanyak 7 Unit jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 7 Unit, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.3**. Grafik Capaian IKK Jumlah Terminal Tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas.



Gambar II.3. Grafik Capaian IKK 3.2 Jumlah Terminal Tipe A yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas memiliki target 7 Unit yang diperoleh dari capaian terhadap PK di tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan pada pembahasan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025.

▪ Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Jumlah Terminal Tipe A yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas antara lain:

1. Tingginya antusias masyarakat untuk menggunakan angkutan umum;
2. Informasi tentang pelayanan di terminal tersampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi ke berbagai media sosial; dan
3. Banyak masyarakat yang menggunakan terminal sebagai tempat naik dan turun penumpang dan sebagai tempat perpindahan moda.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Jumlah Terminal Tipe A yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas antara lain:

1. Masih banyak terdapat loket penjualan tiket PO Bus yang berada di luar Terminal Tipe A dikarenakan loket di dalam terminal tidak memadai;
2. Minimnya fasilitas pendukung sarana dan prasarana seperti lajur bus, penerangan, air bersih, tidak tersedianya tempat istirahat ,ruang tunggu, akses jalan masuk, toilet, musholah dan fasilitas lainnya;
3. Minimnya personil yang memiliki kompetensi tersertifikasi;
4. Kurangnya kesadaran operator Bus AKAP secara mandiri masuk ke dalam Terminal Tipe A walaupun sudah ada petugas di pintu masuk terminal yang mengarahkan masuk;
5. Bangunan lama terminal masih banyak yang terbelengkalai, dan belum ada renovasi sehingga memungkinkan kendaraan umum tidak mau masuk ke dalam terminal.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kinerja Jumlah Terminal Tipe A yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas Tahun 2025 yaitu 7 Unit Terminal Tipe A yang beroperasi.

▪ **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Kinerja Jumlah Terminal Tipe A yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas yaitu sebesar 100%.

$$\begin{aligned}
 & \text{IKK 3.2 Jumlah Terminal Tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas} \\
 & = \frac{\text{Realisasi Jumlah Terminal Tipe A yang beroperasi}}{\text{Target Jumlah Terminal Tipe A yang beroperasi}} \times 100\% \\
 & \text{\% Capaian Kinerja} = \frac{7 \text{ Unit}}{7 \text{ Unit}} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

▪ **Realisasi Anggaran**

Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk Mendukung Konektivitas Tahun 2025 sebesar Rp. 12.675.973.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 4.439.955.826,- atau mencapai 35,02%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk Mendukung Konektivitas yaitu:

1. Perlu dilakukan perbaikan dan perawatan fasilitas yang ada di Terminal Tipe A;

2. Perlu dilakukan pemenuhan sarana dan prasarana di Terminal Tipe A;
3. Perlu dilakukan sosialisasi ke Perusahaan Outo Bus;
4. Perlu dilakukan bimbingan dan pelatihan untuk peningkatan SDM di Terminal Tipe A.

Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 5 : Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas; dan
2. IKK 6 : Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP.

IKK 5 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas

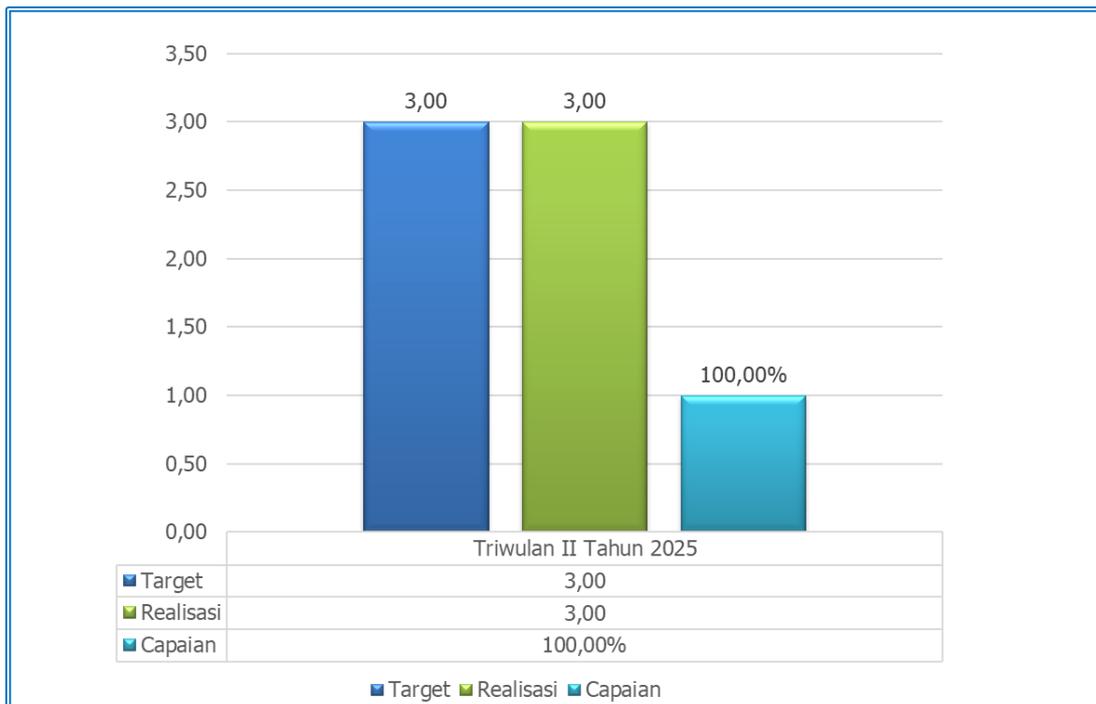
a.1. Definisi Indikator Kinerja

Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas merupakan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan sesuai dengan rancangan desain teknis yang telah ditetapkan dan pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan yang dioperasikan untuk melayani angkutan penyeberangan yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2021 tentang Zonasi di Kawasan Pelabuhan yang Digunakan untuk Melayani Angkutan Penyeberangan adalah Pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul untuk menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang Dibangun dan Beroperasi Untuk Mendukung Konektivitas sebanyak 7 Unit jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebanyak 3 Unit, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.4.** Grafik Capaian IKK 5 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang Dibangun dan Beroperasi Untuk Mendukung Konektivitas.



Gambar II.4. Grafik Capaian IKK 5 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang Dibangun dan Beroperasi Untuk Mendukung Konektivitas

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang Dibangun dan Beroperasi Untuk Mendukung Konektivitas mengacu pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan; dan
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2021 tentang Zonasi di Kawasan Pelabuhan yang Digunakan untuk Melayani Angkutan Penyeberangan;

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang Dibangun dan Beroperasi Untuk Mendukung Konektivitas yaitu sebanyak 3 Unit Pelabuhan Penyeberangan yang diperoleh dari pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api (Kabupaten Banyuasin), Pelabuhan Penyeberangan Sri Menanti (Kabupaten Banyuasin), Pelabuhan Penyeberangan Karang Baru (Kabupaten Banyuasin) dan berdasarkan arahan pimpinan pada pembahasan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025.

▪ **Faktor Keberhasilan**

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas antara lain:

1. Petugas di Pelabuhan SDP memiliki kompetensi di bidangnya;
2. Koordinasi yang baik dengan instansi/*stakeholder* terkait; dan
3. BPTD Kelas II Sumsel selalu melaksanakan monitoring pelaksanaan operasional di pelabuhan SDP.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas antara lain:

1. Adanya kondisi alam seperti pasang air laut, cuaca dan ombak yang tinggi;
2. Masyarakat lebih memilih menggunakan kapal rakyat yang disebabkan *waiting time* dan waktu sandar yang terlalu lama;
3. Belum tersedianya fasilitas yang lengkap di Satuan Pelayanan Pelabuhan SDP;
4. Tidak ada petugas keamanan (*Security*) yang standby; dan
5. Tidak tersedianya APAR Sesuai dengan kebutuhan minimal 1 Unit dan P3K.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas yaitu sebesar 3 Unit meliputi Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api, Pelabuhan Penyeberangan Sri Menanti, dan Pelabuhan Penyeberangan Karang Baru.

▪ **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas Tahun 2025 yaitu sebesar 100%.

IKK 5 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang Dibangun dan Beroperasi Untuk Mendukung Konektivitas

$$= \frac{\text{Realisasi Jumlah Pelabuhan Peneberangan yang beroperasi}}{\text{Target Jumlah Pelabuhan Peneberangan yang beroperasi}} \times 100 \%$$

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{3 \text{ Unit}}{3 \text{ Unit}} \times 100\% = 100\%$$

▪ **Realisasi Anggaran**

Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas Tahun 2025 sebesar Rp. 1.276.116.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 426.481.632,- atau mencapai 33,42%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas antara lain:

1. Mengalokasikan anggaran operasional dan anggaran pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan dan fasilitasnya melalui perencanaan anggaran yang komprehensif;
2. Meningkatkan fasilitas pelayanan di Pelabuhan Penyeberangan;
3. Personil Satuan Pelayanan harus *standby* untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Pelabuhan; dan
4. Perlunya pengadaan APAR dan P3K sesuai dengan kebutuhan.

IKK 6 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP

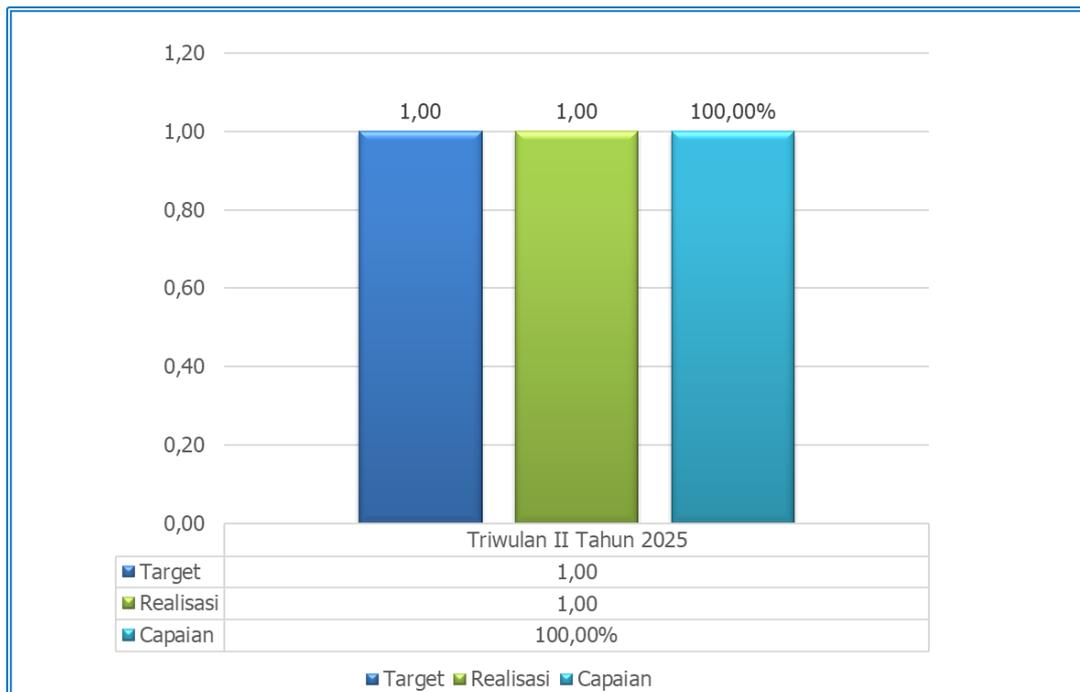
a.1. Definisi Indikator Kinerja

Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP merupakan layanan subsidi perintis angkutan penyeberangan pada trayek Sri Menanti – Karang Baru. Tujuan Utama Subsidi Angkutan SDP antara lain menjamin konektivitas wilayah perairan yang belum dilayani swasta, menurunkan biaya logistik dan akses transportasi masyarakat daerah terpencil dan Mendukung pembangunan kawasan perbatasan dan daerah wisata perairan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DJPD 6838 Tahun 2024 tentang Penetapan Pelayanan Angkutan Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Sumatera Selatan yaitu lintas Sri Menanti – Karang Baru dengan target 1.320 trip, dan kemudian diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 536 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DJPD 6838 Tahun 2024 tentang Penetapan Pelayanan Angkutan Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2025 dengan target 1.340 trip.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP sebanyak 1 Trayek, jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 1 Trayek, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.5**. Grafik Capaian IKK Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP.



Gambar II.5. Grafik Capaian IKK 6 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, dimana ditetapkan Lintas Penyeberangan (antar Provinsi, antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dan lintas penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota) yang berfungsi untuk menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/ atau jaringan jalur kereta api. Dasar hukum lainnya yaitu Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DJPD 6838 Tahun 2024 tentang Penetapan Pelayanan Angkutan Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Sumatera Selatan yaitu lintas Sri Menanti – Karang Baru.

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP memiliki target sebanyak 1 Trayek yaitu Lintas Sri Menanti – Karang Baru.

▪ Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP antara lain:

1. Koordinasi yang baik antar stakeholder terkait yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Penyedia Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP;
2. Ketepatan trayek layanan subsidi sesuai dengan kebutuhan pelayanan;
3. Kepastian jam operasional layanan subsidi angkutan ASDP;
4. Penggunaan sistem informasi dan teknologi digital yang dapat memantau pelaksanaan layanan subsidi angkutan ASDP; dan
5. Jalur yang dilayani merupakan daerah terisolir dan belum dilayani angkutan penyeberangan.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP antara lain:

1. Masih rendahnya pengguna layanan subsidi angkutan penyeberangan pada lintas Sri Menanti – Karang Baru yaitu di bawah 5%;
2. Faktor cuaca seperti tingginya ombak laut sehingga jadwal keberangkatan kapal ditunda; dan
3. Jadwal operasional kapal penyeberangan tidak terlalu banyak.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 1 Trayek Sri Menanti – Karang Baru.

▪ **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Jumlah Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 100%.

$$\begin{aligned} \text{IKK 6 Jumlah Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP} \\ &= \frac{\text{Realisasi Jumlah Trayek Angkutan ASDP}}{\text{Target Jumlah Trayek Angkutan ASDP}} \times 100\% \\ \\ \% \text{ Capaian Kinerja} &= \frac{1 \text{ Trayek}}{1 \text{ Trayek}} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Faktor Muat Penumpang (*Load Factor*) merupakan Perbandingan Jumlah Penumpang dengan Kapasitas Angkut dan Total Trip (Jumlah Kapasitas dikalikan 100%). Adapun rincian *load factor* pada lintasan Sri Menanti – Karang Baru meliputi:

$$LF = \frac{\text{Jumlah Penumpang}}{\text{Kapasitas Angkut} \times \text{Total Trip}} \times 100\%$$

$$LF \text{ Penumpang} = \frac{337}{72 \times 160} \times 100 \% = 2,93\%$$

Faktor Muat Kendaraan (*Load Factor*) merupakan Perbandingan Jumlah Kendaraan dengan Kapasitas Angkut dan Total Trip (Jumlah Kapasitas dikalikan 100%). Adapun rincian *load factor* pada lintasan Sri Menanti – Karang Baru meliputi:

$$LF = \frac{\text{Jumlah Kendaraan}}{\text{Kapasitas Angkut} \times \text{Total Trip}} \times 100\%$$

$$LF \text{ Kendaraan} = \frac{92}{8 \times 160} \times 100 \% = 3,15\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP Tahun 2025 sebesar Rp. 3.628.283.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 1.779.676.000,- atau mencapai 49,05%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan Pihak Penyedia Layanan terkait kendala teknis dan administrasi dalam pelaksanaan layanan subsidi angkutan ASDP;
2. Percepatan pelaksanaan kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran setiap bulan; dan
3. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan layanan subsidi angkutan SDP untuk meningkatkan pengguna layanan.

Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Sungai dan Danau

Pencapaian Sasaran Kegiatan 6 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 7 : Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas.

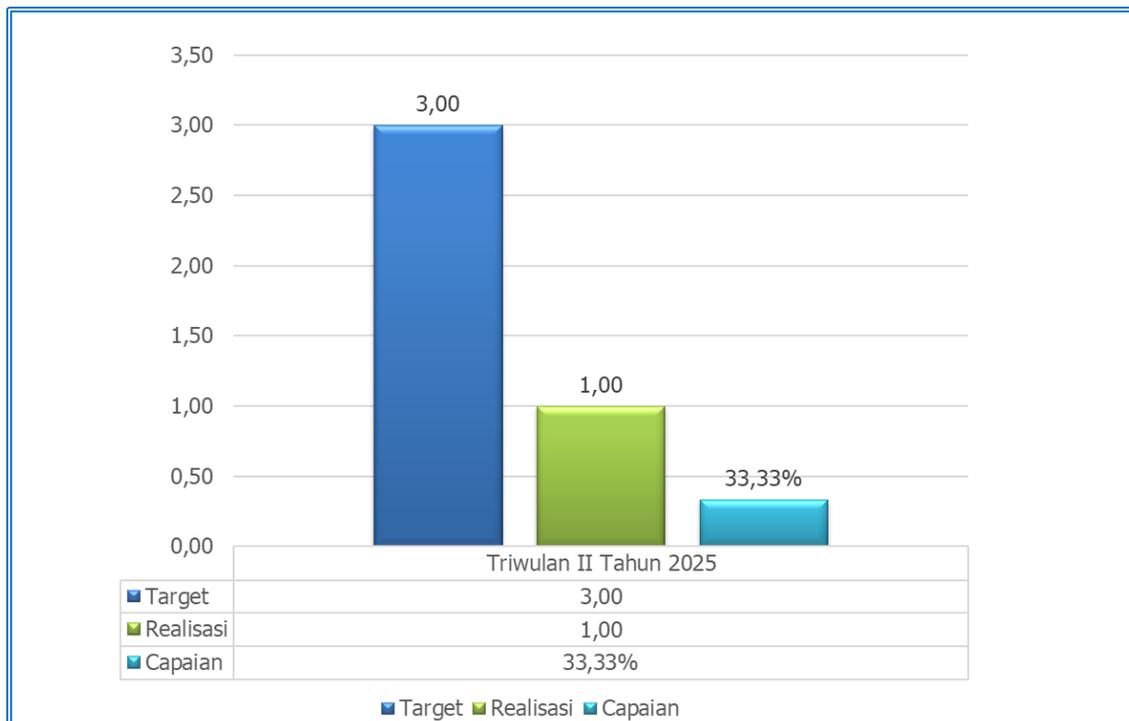
IKK 7 Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas merupakan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai dengan rancangan desain teknis yang telah ditetapkan dan pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang dioperasikan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau di Provinsi Sumatera Selatan.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas sebanyak 1 Unit jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 3 Unit, maka capaian kinerja mencapai 33,33%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.6**. Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas.



Gambar II.6. Grafik Capaian IKK 7 Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai Dan Danau.

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun dan Beroperasi untuk Mendukung Konektivitas memiliki target 3 Unit yaitu Pelabuhan Sungai Upang (Kabupaten Banyuasin), Pelabuhan Sungai Salek (Kabupaten Banyuasin), dan Pelabuhan Sungai Lumpur (Kabupaten Banyuasin), dimana target kinerja diperoleh berdasarkan kondisi eksisting dan arahan pimpinan pada pembahasan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025.

▪ Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas antara lain:

1. Petugas di Pelabuhan SDP memiliki kompetensi di bidangnya;
2. Koordinasi yang baik dengan instansi/stakeholder terkait; dan
3. BPTD Kelas II Sumatera Selatan selalu melaksanakan monitoring pelaksanaan operasional di pelabuhan SDP.

▪ Faktor Kegagalan

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas antara lain:

1. Kurangnya SDM di Pelabuhan SDP;
2. Adanya kondisi alam seperti pasang air laut, cuaca dan ombak yang tinggi; dan
3. Belum tersedianya fasilitas yang lengkap di Satuan Pelayanan Pelabuhan SDP.

▪ Realisasi Kinerja

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 1 Unit yaitu Pelabuhan Sungai Lumpur.

▪ Capaian Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas Tahun 2025 yaitu sebesar 33,33%.

IKK 7 Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas

$$= \frac{\text{Realisasi Jumlah Pelabuhan Sungai yang dibangun dan dioperasikan}}{\text{Target Jumlah Pelabuhan Sungai yang dibangun dan dioperasikan}} \times 100 \%$$

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{1 \text{ Pelabuhan Sungai}}{3 \text{ Pelabuhan Sungai}} \times 100\% = 33,33\%$$

▪ **Realisasi Anggaran**

Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas Tahun 2025 sebesar Rp. 26.279.820.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 0 atau mencapai 0%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas antara lain:

1. Mengalokasikan anggaran operasional dan anggaran pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau dan fasilitasnya melalui perencanaan anggaran yang komprehensif; dan
2. Meningkatkan fasilitas pelayanan di Pelabuhan Penyeberangan.

Sasaran Kegiatan 7: Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 7 diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

IKK 7.2 : Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM;

IKK 7.4 : Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM;

IKK 7.5 : Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok; dan

IKK 7.6 : Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas *Event* Khusus.

IKK 7.2 Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Jumlah Operasional Layanan Terminal tipe A sesuai SPM merupakan penyelenggaraan terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan bermotor umum untuk angkutan lintas batas negara dan/ atau angkutan antar kota antar provinsi sesuai dengan pedoman bagi penyelenggaraan terminal angkutan jalan dalam memberikan pelayanan jasa kepada seluruh pengguna terminal.

Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup jenis (1) pelayanan keselamatan, (2) pelayanan keamanan, (3) pelayanan kehandalan/keteraturan, (4) pelayanan kenyamanan, (5) pelayanan kemudahan/keterjangkauan, dan (6) pelayanan kesetaraan. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung berdasarkan jumlah nilai yang

diperoleh dari 6 (enam) indikator jenis pelayanan di 7 (tujuh) Terminal Tipe-A di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan aspek penilaian sebagai berikut.

Tabel II.4 Aspek Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum di Terminal Tipe A
(Aspek Keselamatan, Keamanan dan Kehandalan/Keteraturan)

No.	Jenis Pelayanan	Uraian	Indikator	Tolok Ukur Indikator
1. Keselamatan				
1	Lajur Pejalan Kaki	Lajur Pejalan Kaki yang meminimalkan crossing dengan kendaraan bermotor	Ketersediaan	Tersedia lajur pejalan kaki yang meminimalkan crossing dengan kendaraan bermotor
2	Fasilitas Keselamatan Jalan	Fasilitas Keselamatan Jalan (rambu, marka, penerangan jalan, pagar)	Ketersediaan	Tersedia fasilitas Keselamatan Jalan rambu marka penerangan jalan pagar
3	Jalur Evakuasi	Jalur evakuasi	Ketersediaan	Tersedia jalur evakuasi
4	Alat Pemadam Kebakaran	Alat pemadam kebakaran	Ketersediaan	Tersedia alat pemadam kebakaran
5	Pos, fasilitas dan petugas kesehatan	Pos, fasilitas dan petugas kesehatan	Ketersediaan	Tersedia fasilitas Kesehatan Pos Fasilitas, dan Petugas kesehatan
6	Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum	Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum	Ketersediaan	Tersedia pos fasilitas, dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum
7	Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum	Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum	Ketersediaan	Tersedia fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum
8	Informasi fasilitas keselamatan	Informasi ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan)	Ketersediaan	Tersedia informasi fasilitas keselamatan, petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul yang mudah terlihat dengan jelas
9	Informasi fasilitas kesehatan	Informasi ketersediaan fasilitas untuk penanganan darurat	Ketersediaan	Tersedia informasi fasilitas kesehatan yang mudah terlihat dengan jelas
10	Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor	informasi ketersediaan fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor	Ketersediaan	Tersedia informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor yang mudah terlihat dengan jelas
2. Keamanan				
1	Fasilitas Keamanan	Fasilitas pencegah tindak kriminal	Ketersediaan	Tersedia pos keamanan kamera pengawas, dan titik pengamanan tertentu
2	Media pengaduan gangguan keamanan	Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat	Ketersediaan	Tersedia stiker pada tempat yang strategis, mudah terlihat dan jelas terbaca
3	Petugas Keamanan	Orang yang menjaga ketertiban dan keamanan bagi jasa pengguna jasa	Ketersediaan petugas	Minimal 2 (dua) petugas berseragam dan mudah terlihat
3. Kehandalan/Keteraturan				
1	Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis	Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis	Ketersediaan Keteraturan	Tersedianya Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis
2	Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis	jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis	Ketersediaan Keteraturan	Tersedianya jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis
3	Loket penjualan tiket	Loket tempat calon penumpang membeli tiket	Ketersediaan Keteraturan	Loket penjualan tiket tetap dan teratur
4	Kantor Penyelenggara terminal, ruang kendali dan manajemen sistem informasi terminal	Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal	Ketersediaan luas	Tersedia kantor penyelenggara terminal <i>control room</i> , dan SIM terminal Luas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pegawai
5	Petugas Operasional Terminal	Petugas Operasional Terminal yang mengatur operasional terminal	Ketersediaan Keteraturan	Tersedia petugas Operasional Terminal yang mengatur operasional terminal

Sumber : BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

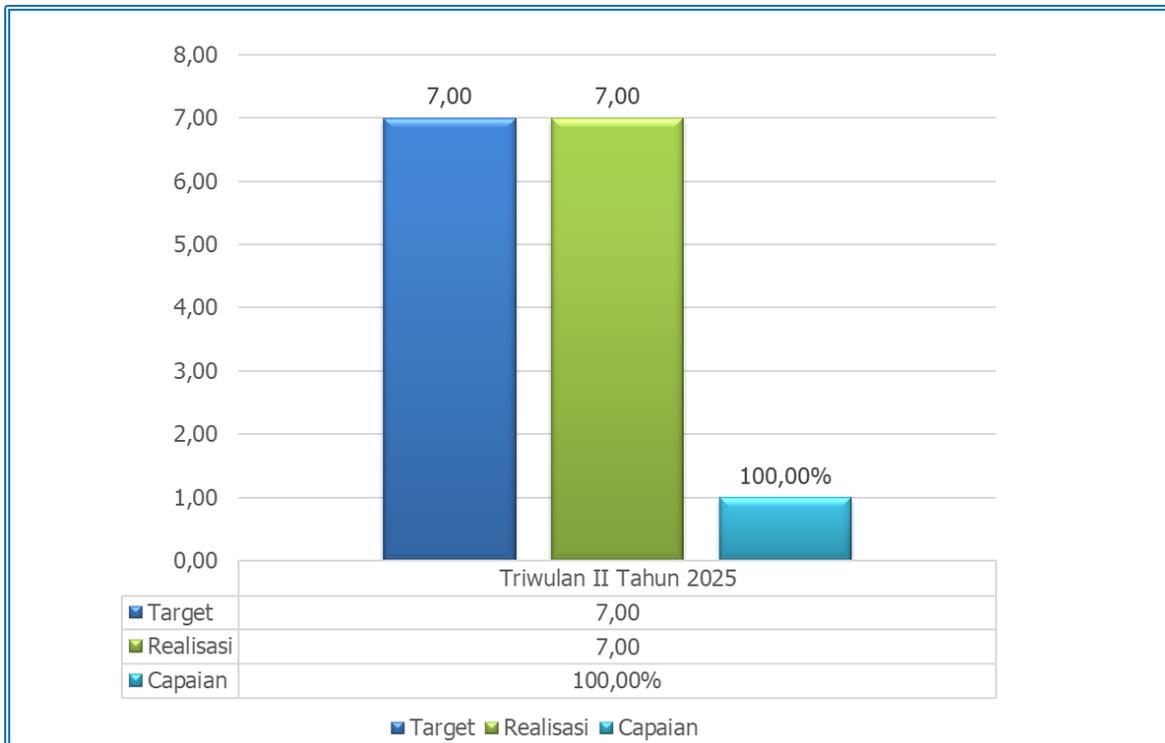
Tabel II.5 Aspek Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum di Terminal Tipe A
(Aspek Kenyamanan, Kemudahan/Keterjangkauan dan Kesetaraan)

No.	Jenis Pelayanan	Uraian	Indikator	Tolok Ukur Indikator
4. Kenyamanan				
1	Ruang Tunggu	Ruangan/tempat yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka)	Ketersediaan	Tersedia tempat duduk
			Kondisi	Area Bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal
2	Toilet	Tersedianya Toilet	Keteraturan	dilakukan kanalisasi penumpang, dan diklasifikasikan berdasarkan zona
			Jumlah	Pria (4 Urinoir, 3 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel) Wanita (6 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel)
3	Fasilitas peribadatan/mushola	Fasilitas untuk melakukan ibadah	Kondisi	Area bersih 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal
			Luas	Pria (11 normal dan 2 penyandang disabilitas) Wanita (9 normal dan 2 penyandang disabilitas)
4	Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau disediakan untuk area penghijauan	Kondisi	Area bersih 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal
			Ketersediaan	Tersedia ruang terbuka hijau minimum 30% luas lahan
5	Rumah makan	Rumah makan	Luas	Terdapat alat-alat kebersihan, penyiraman taman
6	Fasilitas dan petugas kebersihan	Fasilitas dan petugas kebersihan	Kondisi	Tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah
7	Tempat istirahat awak kendaraan	Tempat istirahat awak kendaraan	Ketersediaan	Tersedia fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan
8	Area merokok (smoking area)	Tempat khusus untuk merokok	Ketersediaan	Tersedia fasilitas dan petugas kebersihan
9	Drainase	Drainase yang memadai	Ketersediaan	Tempat istirahat awak kendaraan
10	Area dengan jaringan internet (hotspot area)	Area yang tersedia jaringan internet (hotspot area)	Ketersediaan	Tersedia smoking area
11	Ruang Baca (reading corner)	Ruang Baca (reading corner)	Ketersediaan	Tersedia drainase yang memadai
12	Lampu penerangan ruangan	Lampu penerangan ruangan	Ketersediaan	Tersedia hotspot area
5. Kemudahan/Keterjangkauan				
1	Letak jalur pemberangkatan	Kapasitas letak jalur pemberangkatan kendaraan	Keteraturan	Tersedia ruang baca (reading corner)
			Kondisi	Tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi
2	Letak jalur kedatangan	Kepastian letak kedatangan kendaraan	Keteraturan	Letak jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur
			Kondisi	Terpisah dengan jalur penurunan penumpang
3	Informasi pelayanan	Visual : Denah/layout terminal. Nomor trayek, nama PO dan kelas pelayannya. Nama terminal keberangkatan. Jadwal. Tarif. Peta jaringan Audio : Informasi pelayanan (disebutkan apa saja). Kejadian khusus dan gangguan	Tempat/ruang	Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain
			Tempat Intensitas Cahaya	Letak jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur
4	Informasi angkutan lanjutan	Informasi yang disampaikan dalam terminal kepada pengguna jasa sekurang-kurangnya memuat : Jenis angkutan, lokasi angkutan lanjutan, jam pelayanan angkutan lanjutan, jurusan/rute, tarif	Tempat Kondisi	Terpisah dengan jalur penurunan penumpang
			Tempat Intensitas Cahaya	Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain
5	Informasi gangguan perjalanan mobil bus	Fasilitas dalam terminal yang memberikan informasi penyebab keterlambatan jadwal perjalanan mobil bus seperti gangguan keamanan, operasional, dan keselamatan.	Tempat/ruang	Diletakkan di tempat yang strategis antara lain dekat loket, di pintu masuk dan di ruang tunggu umum, mudah dilihat dan jelas terbaca
			Tempat Kondisi	Diletakkan di tempat yang mudah didengar oleh pengguna jasa dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada
6	Tempat penitipan barang	Tempat penitipan barang	Tempat Intensitas Cahaya	Penempatan mudah terlihat dan jelas terbaca
			Tempat Kondisi	Informasi diumumkan maksimal 10 menit setelah terjadi gangguan dan jelas terdengar dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada
7	Fasilitas pengisian baterai (charging corner)	Fasilitas pengisian baterai (charging corner)	Ketersediaan	Tersedia tempat penitipan barang sesuai kebutuhan
			Ketersediaan	Fasilitas pengisian baterai (charging corner)
8	Tempat naik/turun penumpang	Memberikan kemudahan penumpang untuk naik ke bus atau turun dari bus	Aksesibilitas	Tinggi platform sama dengan tinggi lantai bus
			Ketersediaan	Tersedia tempat parkir dengan luas disesuaikan dengan lahan yang tersedia
9	Tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi	Tempat parkir untuk kendaraan baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)	Ketersediaan	Tersedia tempat parkir dengan luas disesuaikan dengan lahan yang tersedia
			Ketersediaan	Tersedia tempat parkir dengan luas disesuaikan dengan lahan yang tersedia
6. Kesetaraan				
1	Fasilitas penyandang cacat (difabel)	Fasilitas yang disediakan untuk pengguna jasa difabel	Aksesibilitas	Terdapat ramp portable atau ramp permanen dengan kemiringan maksimum 20° untuk penyambung dari Toilet pengguna difabel
			Ketersediaan	Kursi roda difabel.
2	Ruang ibu menyusui	Ruangan/tempat yang disediakan khusus bagi ibu menyusui dan bayi	Ketersediaan	Tersedia ruang tertutup khusus beserta fasilitas lengkap untuk ibu menyusui dan bayi

Sumber : BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM Tahun 2025 sebesar 7 Unit jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 7 Unit, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.7**. Grafik Capaian IKK 7.2 Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM



Gambar II.7. Grafik Capaian IKK 7.2 Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ **Dasar Hukum**

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

▪ **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM memiliki target 7 Unit yang diperoleh dari arahan pimpinan pada pembahasan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025.

▪ **Faktor Keberhasilan**

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM antara lain:

1. Komitmen yang kuat antara BPTD Kelas II Sumatera Selatan, Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya dalam kegiatan peningkatan layanan di Terminal Tipe A;
2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A secara berkala; dan
3. Terwujudnya aspek pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kehandalan/keteraturan, pelayanan kenyamanan, pelayanan kemudahan/keterjangkauan, dan pelayanan kesetaraan di Terminal Tipe A dengan melakukan monitoring secara berkala.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM antara lain:

1. Kendala alam seperti asap dari kebakaran hutan menyebabkan jarak pandang yang sulit terlihat jelas di akses keluar masuk kendaraan di Terminal Tipe A;
2. Kurang berkenannya penumpang untuk mengisi kuesioner terkait survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A;
3. Terdapat tempat pembuangan sampah di pintu masuk Terminal Tipe A; dan
4. Terdapat bus-bus yang sudah rusak milik Pemkot Palembang yang berdekatan dengan Terminal Tipe A sehingga mengganggu estetika di Terminal Tipe A.

▪ **Realisasi Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM Tahun 2025 yaitu sebesar 7 Unit meliputi:

1. Pemenuhan SPM di Terminal Tipe A Alang-alang Lebar;
2. Pemenuhan SPM di Terminal Tipe A Karya Jaya;
3. Pemenuhan SPM di Terminal Tipe A Kayu Agung;
4. Pemenuhan SPM di Terminal Tipe A Batu Kuning;
5. Pemenuhan SPM di Terminal Tipe A Batay;
6. Pemenuhan SPM di Terminal Tipe A Simpang Periuk; dan
7. Pemenuhan SPM di Terminal Tipe A Betung.

Berdasarkan hasil pelaksanaan SPM di 7 (tujuh) Terminal Tipe A, diperoleh nilai rata-rata pelaksanaan SPM sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada 6 (enam) aspek yang meliputi aspek (1) pelayanan keselamatan, (2) pelayanan keamanan, (3) pelayanan kehandalan/keteraturan, (4) pelayanan kenyamanan, (5) pelayanan kemudahan/keterjangkauan, dan (6) pelayanan kesetaraan yaitu 34,76 dengan mutu pelayanan E sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel II.6 Realisasi Kinerja Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Terminal Tipe A	Triwulan I			Triwulan II		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Alang-Alang Lebar	51,91	58,02	58,02	58,02	58,02	58,02
2	Karya Jaya	39,52	39,52	39,52	39,52	40,14	40,14
3	Kayu Agung	24,10	24,10	24,10	30,06	31,99	30,83
4	Batu Kuning	22,21	22,21	22,21	25,31	21,40	21,40
5	Batay	36,06	36,06	36,06	36,06	36,06	36,06
6	Simpang Periuk	27,04	27,04	27,04	34,95	34,95	34,95
7	Betung	20,06	20,06	20,06	21,93	21,93	21,93
Nilai Rata-rata		31,56	32,43	32,43	35,12	34,93	34,76

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

Tabel II.7 Konversi Nilai Pelayanan

Konversi Nilai	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
0 - 55	E	Buruk
56 - 65	D	Kurang
66 - 75	C	Cukup
76 - 85	B	Baik
86 - 100	A	Baik Sekali

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

▪ Capaian Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 100%.

$$\begin{aligned}
 & \text{IKK 7.2 Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM} \\
 & = \frac{\text{Realisasi Jumlah Terminal Tipe A sesuai SPM}}{\text{Target Jumlah Terminal Tipe A sesuai SPM}} \times 100 \% \\
 & \% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{7 \text{ Unit}}{7 \text{ Unit}} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

▪ Realisasi Anggaran

Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM sebesar Rp. 214.000.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 0 atau mencapai 0%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM yaitu:

1. Melakukan peningkatan pelayanan dan fasilitas di Terminal Tipe-A yang didukung oleh sistem informasi dan teknologi *digital*;
2. Melakukan upaya peningkatan secara berkelanjutan terhadap 6 (enam) aspek di Terminal Tipe A yaitu (1) pelayanan keselamatan, (2) pelayanan keamanan, (3) pelayanan kehandalan/keteraturan, (4) pelayanan kenyamanan, (5) pelayanan kemudahan/keterjangkauan, dan (6) pelayanan kesetaraan; dan
3. Melaksanakan pelayanan di Terminal Tipe A sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal; dan
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A.

IKK 7.4 Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan KB Sesuai SPM

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM merupakan penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan oleh UPPKB terhadap mobil barang menggunakan alat penimbangan, baik yang terpasang tetap maupun yang dapat dipindahkan sesuai dengan pedoman bagi penyelenggaraan UPPKB dalam melaksanakan pengawasan dan pengamanan jalan kepada seluruh pengguna UPPKB.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan bahwa Penimbangan Kendaraan Bermotor adalah proses pengawasan yang dilakukan oleh UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) terhadap mobil barang menggunakan alat penimbangan, baik yang terpasang tetap maupun yang dapat dipindahkan.

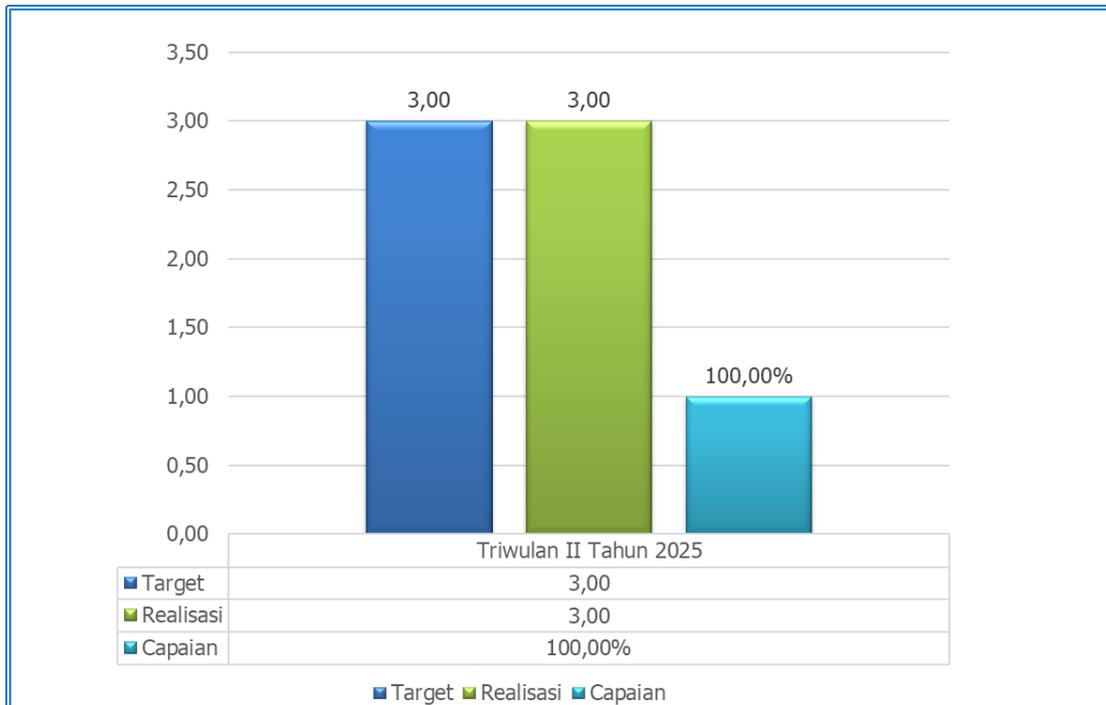
Tabel II.8 Aspek Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum di UPPKB

No.	Jenis Pelayanan	Uraian	Indikator	Tolok Ukur Indikator
1	Jaminan Kepastian Hukum Terhadap Penindakan Pelanggaran			
1	Ketentuan Perundang-undangan yang mengatur penindakan pelanggaran di UPPKB	Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yang mengatur penindakan pelanggaran di UPPKB, yaitu antara lain ketentuan tentang jenis pelanggaran, sanksi administratif, dan ketentuan pidana terhadap pelanggaran di	Ketersediaan	Adanya Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan menteri dan/atau Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang berlaku yang mengatur penindakan pelanggaran di UPPKB
2	Penggunaan Kaidah Keteknikan yang Baik			
1	SOP Tata Cara Penimbangan Kendaraan Bermotor	SOP Tata Cara Penimbangan Kendaraan Bermotor sebagai pedoman kerja Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor	Ketersediaan	Tersedianya SOP Tata Cara Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2	Pemeliharaan Fasilitas di UPPKB	Fasilitas Utama dan penunjang UPPKB dipelihara secara berkala dan insidental	Pelaksanaan	Pelaksanaan pemeliharaan fasilitas Utama dan penunjang yang dilakukan secara berkala dan insidental sesuai waktu yang ditentukan
3	Standar dan Spesifikasi Alat Penimbangan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan Ur			
1	Kapasitas Alat Penimbangan yang dipasang secara tetap (statis)	Alat penimbangan statis yang dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan	Kesesuaian	Alat penimbangan statis yang dioperasikan memiliki kapasitas sekurang-kurangnya 80 ton
2	Dimensi alat penimbangan statis	Alat penimbangan statis yang dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan	Kesesuaian	Alat penimbangan statis yang dioperasikan memiliki dimensi panjang sekurang-kurangnya 18m dan lebar sekurang-kurangnya 2,5m
4	Keselamatan, Keamanan dan Kenyamanan Pengemudi dan/atau Pemilik Kendaraan			
1	Tempat parkir kendaraan mobil barang	Tempat parkir kendaraan mobil barang yang sedang dilakukan penindakan pelanggaran maupun kendaraan barang yang pengemudinya sedang beristirahat	Ketersediaan dan luasan	Tersedianya lahan parkir kendaraan mobil barang dengan luasan sekurang-kurangnya 20 SRP
2	Ruang terbuka hijau	Ruang terbuka hijau berupa taman/kebun di dalam lokasi	Ketersediaan	Tersedianya ruang terbuka hijau dengan luasan
3	Tempat Ibadah	Tempat ibadah sesuai dengan kearifan lokal UPPKB	Ketersediaan	Tersedianya tempat ibadah
4	Toilet Umum	Toilet umum yang bersih untuk pegawai dan pengunjung	Ketersediaan	Tersedianya toilet umum yang bersih
5	Kantin	Kantin yang bersih untuk pegawai dan pengunjung UPPKB	Ketersediaan	Tersedianya kantin yang bersih
6	Mess Petugas	Mess petugas yang bersih dan rapi untuk pegawai UPPKB	Ketersediaan	Tersedianya mess petugas yang bersih dan rapi
7	Tempat Istirahat Pengemudi	Tempat istirahat pengemudi yang bersih berupa ruangan yang untuk istirahat atau tidur sejenak	Ketersediaan	Tersedianya tempat istirahat pengemudi yang bersih
8	Jalan Akses Keluar Masuk Kendaraan	Jalan akses keluar masuk kendaraan yang mudah dijangkau	Ketersediaan	Tersedianya jalan akses keluar masuk kendaraan
9	Jalan Sirkulasi di Dalam Wilayah UPPKB	Jalan sirkulasi di dalam wilayah UPPKB yang mudah	Ketersediaan	Tersedianya jalan sirkulasi di dalam wilayah
5	Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Ke			
1	Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Peralatan dan obat-obatan yang digunakan untuk tindakan awal kepada korban kecelakaan	Ketersediaan	Tersedianya peralatan dan obat-obatan yang digunakan untuk tindakan awal kepada korban kecelakaan
2	Fasilitas keselamatan berlalu lintas di jalan	Fasilitas keselamatan berlalu lintas di jalan (rambu, marka, rubber barrier, lampu penerangan dan warning light)	Ketersediaan	Tersedianya fasilitas keselamatan berlalu lintas di jalan (rambu, marka, rubber barrier, lampu penerangan dan warning light)
3	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Peralatan yang digunakan untuk memadamkan kebakaran	Ketersediaan	Tersedianya peralatan yang digunakan untuk
4	Pertolongan terhadap kendaraan (derek)	Alat yang digunakan dalam mendorong kendaraan (derek)	Ketersediaan	Tersedianya peralatan yang digunakan dalam
5	Alat Bongkar Muat Forklift	Alat yang digunakan untuk melakukan bongkar muat barang	Ketersediaan	Tersedianya peralatan forklift yang digunakan
6	Ketepatan Waktu Pelayanan Yang Tertulis Dengan Waktu Pelayanan Yang Terealisasi			
1	Waktu Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor	Waktu yang diperlukan untuk proses penimbangan kendaraan bermotor sampai dikeluarkannya bukti hasil penimbangan	Ketepatan	Realisasi waktu yang diperlukan untuk proses penimbangan kendaraan bermotor paling lama 1 menit
2	Waktu Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran di UPPKB	Waktu yang diperlukan untuk proses penindakan pelanggaran di UPPKB sampai dikeluarkannya bukti hasil penindakan pelanggaran	Ketepatan	Realisasi waktu yang diperlukan untuk proses penindakan pelanggaran di UPPKB paling lama 10 menit
7	Informasi Biaya Penurunan dan/atau Penyimpanan Muatan Lebih			
1	Informasi Biaya Penurunan dan/atau Penyimpanan Muatan Lebih	Jika ada ketentuan biaya penurunan dan/atau penyimpanan muatan lebih sebagai bagian dari penindakan pelanggaran di UPPKB	Ketersediaan	Tersedianya papan informasi biaya penurunan dan/atau penyimpanan muatan lebih yang dipasang di tempat-tempat yang dapat dengan mudah dibaca oleh pelanggar
2	Tanda Terima Biaya Penurunan dan/atau Penyimpanan Muatan Lebih	Adanya tanda terima sebagai bukti pembayaran biaya penurunan dan/atau penyimpanan muatan lebih jika atas perintah PPNS harus menurunkan dan/atau menyimpan muatan lebih sebagai bagian dari penindakan pelanggaran di	Ketersediaan	Tersedianya tanda terima biaya penurunan dan/atau penyimpanan muatan lebih yang diberikan kepada pelanggar
8	Informasi Besaran Nilai Denda atas Pelanggaran Tata Cara Pemuatan, Daya Angkut dan Dimensi Kendaraan			
1	Informasi sanksi hukum pelanggaran tata cara pemuatan, daya angkut dan dimensi kendaraan	Adanya informasi sanksi hukum pelanggaran tata cara pemuatan, daya angkut dan dimensi kendaraan	Ketersediaan	Tersedianya papan informasi sanksi hukum pelanggaran tata cara pemuatan, daya angkut dan dimensi kendaraan yang dipasang di tempat-tempat yang dapat dengan mudah dibaca oleh pelanggar
2	Tanda terima pembayaran denda atas pelanggaran tata cara pemuatan, daya angkut dan dimensi kendaraan	Adanya tanda terima sebagai bukti pembayaran denda atas pelanggaran tata cara pemuatan, daya angkut dan dimensi kendaraan atas perintah PPNS sebagai bagian dari penindakan pelanggaran di UPPKB	Ketersediaan	Tersedianya tanda terima pembayaran denda atas pelanggaran tata cara pemuatan, daya angkut dan dimensi kendaraan yang diberikan kepada pelanggar
9	Kesesuaian Hasil Penimbangan Terhadap Berat Kendaraan Yang Sebenarnya			
1	Tata cara penimbangan kendaraan bermotor	Penimbangan kendaraan bermotor dilakukan sesuai dengan tata cara penimbangan kendaraan bermotor yang berlaku	Kepatuhan	Petugas melakukan penimbangan kendaraan bermotor dilakukan sesuai dengan tata cara penimbangan kendaraan bermotor yang berlaku
2	Kalibrasi alat penimbangan	Kalibrasi alat penimbangan dilakukan secara berkala untuk menjamin akurasi hasil penimbangan	Ketepatan	Kalibrasi dilakukan ada waktu yang telah ditentukan oleh petugas kalibrasi
10	Prosedur Pelayanan Yang Mudah dan Sederhana, Termasuk Memberikan Bukti Administratif Kepada Pengguna Jasa Penurunan dan/atau Penyimpanan			
1	Prosedur Pelayanan Yang Mudah dan Sederhana, Termasuk Memberikan Bukti Administratif Kepada Pengguna Jasa Penurunan dan/atau Penyimpanan	Prosedur pelayanan yang mudah dan sederhana, termasuk memberikan bukti administratif kepada pengguna jasa penurunan dan/atau penyimpanan	Ketersediaan	Tersedianya prosedur pelayanan yang mudah dan sederhana, termasuk memberikan bukti administratif kepada pengguna jasa penurunan dan/atau penyimpanan
11	Sarana Pengaduan Masyarakat Berupa PO BOX, Nomor Telpon, Faksimile, Alamat Website dan/atau Alamat Surat Elektronik Yang Mudah Diketahui Oleh Masyarakat			
1	Sarana pengaduan masyarakat berupa PO BOX, nomor telpon, faksimile, alamat website dan/atau alamat surat elektronik yang mudah diketahui oleh masyarakat	Sarana pengaduan masyarakat berupa PO BOX, nomor telpon, faksimile, alamat website dan/atau alamat surat elektronik yang mudah diketahui oleh masyarakat	Ketersediaan	Tersedianya sarana pengaduan masyarakat berupa PO BOX, nomor telpon, faksimile, alamat website dan/atau alamat surat elektronik yang mudah diketahui oleh masyarakat
12	Jumlah dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Yang Sesuai dan Berkompeten			
1	Jumlah dan kualifikasi Sumber Daya Manusia yang sesuai dan berkompeten	Jumlah dan kualifikasi Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kebutuhan, kompetensi, dan kualifikasi yang dipersyaratkan	Ketersediaan	Tersedianya jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan, kompetensi, dan kualifikasi yang dipersyaratkan

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM Tahun 2025 sebesar 3 Unit jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar Unit, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.8.** Grafik Capaian IKK 7.4 Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM



Gambar II. 8. Grafik Capaian IKK 7.4 Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ **Dasar Hukum**

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM yaitu mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

▪ **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM memiliki target 3 Unit yang diperoleh dari jumlah UPPKB yang beroperasi dengan berdasarkan arahan pimpinan pada pembahasan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025.

▪ **Faktor Keberhasilan**

Keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM antara lain:

1. Berkurangnya jumlah pelanggaran muatan dan dimensi kendaraan angkutan barang;
2. Berkurangnya kerusakan jalan akibat kendaraan over dimension and over loading (ODOL);
3. Pemenuhan SPM layanan fasilitas UPPKB sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Koordinasi yang baik antar instansi dan *stakeholder* terkait dalam penindakan pelanggaran angkutan barang;
5. Adanya pemberian sanksi yang tegas dalam upaya penindakan pelanggaran angkutan barang; dan
6. Kualitas SDM yang berkompeten sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menindak pelanggaran angkutan barang.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM antara lain:

1. Rusaknya fasilitas dan peralatan penimbangan kendaraan bermotor;
2. Tidak tersedianya kecukupan anggaran untuk melakukan pemeliharaan peralatan penimbangan kendaraan bermotor;
3. Tidak adanya pemberlakuan sanksi yang tegas terhadap perusahaan angkutan barang yang melakukan pelanggaran muatan dan dimensi kendaraan (ODOL); dan
4. Belum terpenuhinya SPM penimbangan kendaraan bermotor di 3 (tiga) Unit UPPKB yang beroperasi.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 3 Unit meliputi:

1. Pemenuhan SPM UPPKB Merapi (Beroperasi);
2. Pemenuhan SPM UPPKB Talang Kelapa (Beroperasi); dan
3. Pemenuhan SPM UPPKB Kertapati (Beroperasi).

▪ **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 100%, dimana 3 (tiga) UPPKB beroperasi dengan realisasi pelaksanaan SPM sebagaimana tabel berikut.

IKK 7.4 Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM

$$= \frac{\text{Realisasi Jumlah Fasilitas Penimbangan KB}}{\text{Target Jumlah Fasilitas Penimbangan KB}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{3 \text{ Unit}}{3 \text{ Unit}} \times 100\% = 100\%$$

Tabel II.9 Realisasi Kinerja Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di UPPKB

No.	UPPKB	Triwulan II
		Juni
1	UPPKB Kertapati	70,74
2	UPPKB Talang Kelapa	71,67
3	UPPKB Merapi	48,98
4	UPPKB Pematang Panggang	14,81
5	UPPKB Simpang Nibung	10,65
6	UPPKB Kota Baru	16,48
7	UPPKB Senawar Jaya	0,00
Nilai Rata-rata		33,33

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

Tabel II.10 Konversi Nilai Pelayanan

Konversi Nilai	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
0 - 55	E	Buruk
56 - 65	D	Kurang
66 - 75	C	Cukup
76 - 85	B	Baik
86 - 100	A	Baik Sekali

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

▪ **Realisasi Anggaran**

Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM Tahun 2025 sebesar Rp. 114.830.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp.0 atau mencapai 0%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM di bidang PPNS melalui diklat PPNS;
2. Memperkuat koordinasi antar instansi dan *stakeholder* terkait dalam mengimplementasikan *Program Zero ODOL 2026*;
3. Memberikan sanksi tilang kepada perusahaan angkutan barang yang melakukan pelanggaran angkutan barang; dan

4. Sosialisasi secara berkala terkait *Program Zero ODOL* ke perusahaan-perusahaan angkutan barang.

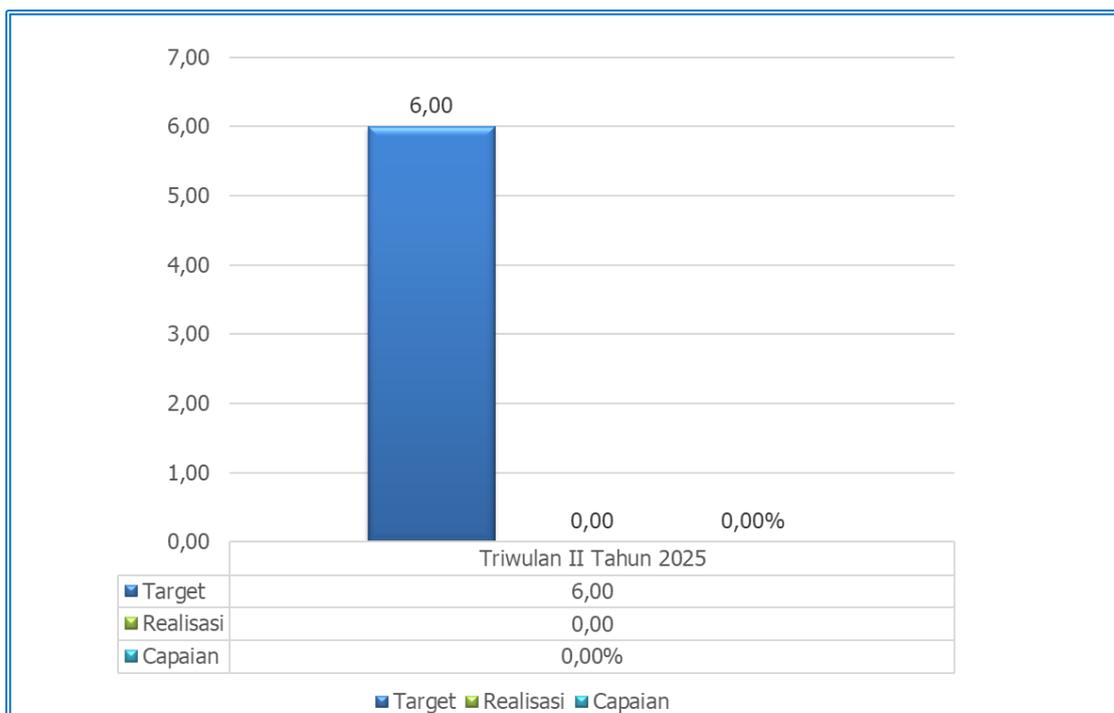
IKK 7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPTD sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PM 20 Tahun 2018, PM 6 Tahun 2023 dan dan terakhir diubah dengan PM 1 Tahun 2025 tentang tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok Tahun 2025 sebanyak 0 Kegiatan jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 6 Kegiatan, maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.9**. Grafik Capaian IKK 7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok.



Gambar II.9. Grafik Capaian IKK 7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 154 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PM 20 Tahun 2018, PM 6 Tahun 2023 dan dan terakhir diubah dengan PM 1 Tahun 2025 tentang tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok memiliki target 6 Kegiatan yang diperoleh dari Analisa Survey Investigasi Desain (SID), dan dengan berdasarkan arahan pimpinan pada pembahasan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025.

▪ Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok antara lain:

1. Terlaksananya pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang ketatausahaan, prasarana, sarana, dan lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
2. Meningkatnya pelayanan di Terminal Tipe A, UPPKB dan Pelabuhan SDP;
3. Terlaksananya dengan baik kegiatan tugas pokok dan fungsi BPTD di Sub Bagian dan masing-masing Seksi di BPTD Kelas II Sumatera Selatan; dan
4. Terjalannya koordinasi yang baik antas instansi dan *stakeholder* terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BPTD di bidang transportasi darat.

▪ Faktor Kegagalan

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok antara lain:

1. Belum terlaksananya Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok dikarenakan adanya blokir anggaran dikarenakan efisiensi anggaran;
2. Belum adanya kepastian buka blokir anggaran sehingga kegiatan monitoring evaluasi terkait tugas pokok dan fungsi masih belum optimal berjalan;
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi Jumlah Petugas yang terbatas, Kompetensi SDB belum merata, dan kurangnya pelatihan terhadap SDM;
4. Keterbatasan anggaran baik itu berupa tidak cukupnya dana untuk kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala, maupun tidak tersedia anggaran khusus untuk digitalisasi sistem monitoring;

5. Infrastruktur teknologi tidak mendukung antara lain akses internet terbatas di beberapa wilayah ataupun sistem informasi monitoring masih bersifat manual dan belum terintegrasi.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok Tahun 2025 yaitu sebesar 0 Kegiatan yang diperoleh dari kegiatan:

1. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan;
2. Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan;
3. Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana;
4. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas;
5. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas; dan
6. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan.

▪ **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 0%.

$$\begin{aligned}
 & \text{IKK 7.5 Monitoring Evaluasi Terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok} \\
 & = \frac{\text{Realisasi Jumlah Kegiatan}}{\text{Target Jumlah Kegiatan}} \times 100\% \\
 & \% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{0 \text{ Kegiatan}}{0 \text{ Kegiatan}} \times 100\% = 0\%
 \end{aligned}$$

▪ **Realisasi Anggaran**

Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok Tahun 2025 sebesar Rp. 5.231.690.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 0 atau mencapai 0%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok antara lain:

1. Melaksanakan monitoring/pengawasan secara berkala kegiatan yang terkait pelayanan tugas dan pokok di bidang ketatausahaan, prasarana, sarana dan angkutan, dan lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan melalui koordinasi dengan Satuan Pelayanan di Terminal Tipe A, UPPKB dan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
2. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan tugas dan pokok;

3. Mengalokasikan anggaran pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan tugas dan pokok;
4. Melakukan koordinasi internal, penyiapan dokumen teknis, serta pemetaan prioritas lokasi kegiatan, sehingga pelaksanaan dapat segera dimulai setelah proses anggaran dinyatakan aktif;
5. Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDM seperti Menyelenggarakan pelatihan teknis dan manajerial bagi petugas Monev dan Membentuk tim teknis khusus untuk wilayah dengan SDM terbatas;
6. Peningkatan efisiensi anggaran meliputi prioritisasi wilayah rawan atau padat angkutan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan mendorong kolaborasi dengan sektor swasta melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan memanfaatkan hibah program peningkatan transportasi; dan
7. Penguatan sistem monitoring berbasis teknologi antara lain pengembangan dan penerapan sistem monitoring digital yang terintegrasi, termasuk dashboard dan pelaporan *online*, serta Penerapan teknologi GPS dan IoT (*Internet of Things*) untuk pengawasan sarana secara *real-time*.

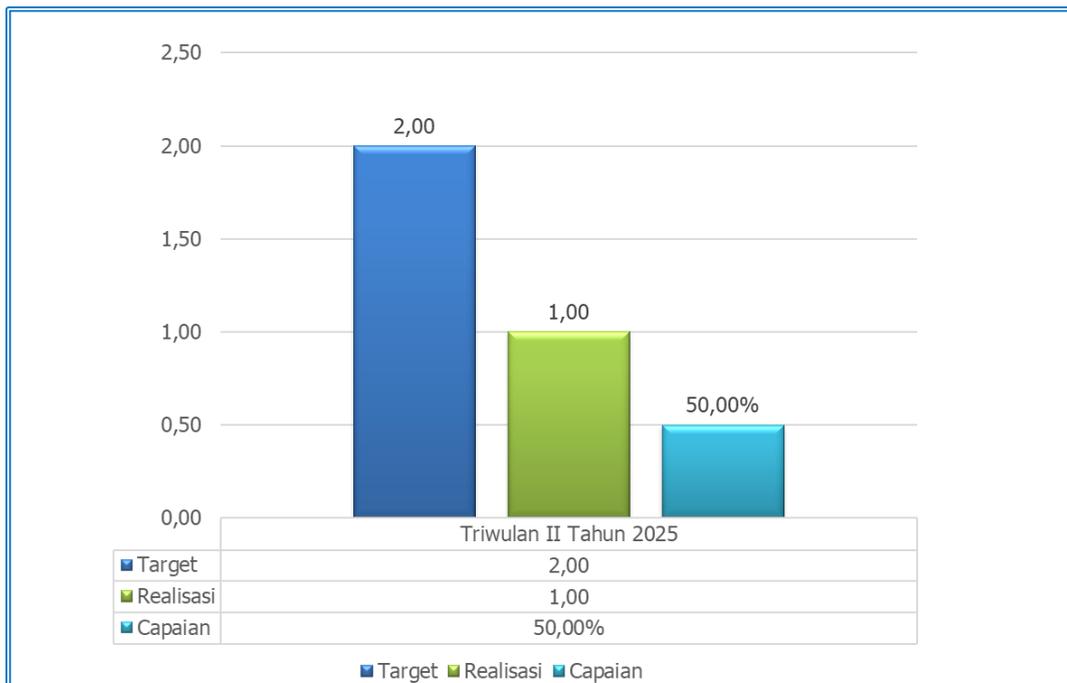
IKK 7.6 Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas *Event* Khusus

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas *Event* Khusus merupakan kegiatan pengawasan lalu lintas pada waktu tertentu yaitu pelaksanaan pengawasan dan Posko Angkutan Lebaran dan Angkutan Natal dan Tahun Baru.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas *Event* Khusus Tahun 2025 sebanyak 1 Kegiatan jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 2 Kegiatan, maka capaian kinerja mencapai 50%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.10**. Grafik Capaian IKK 7.6 Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas *Event* Khusus.



Gambar II.10. Grafik Capaian IKK 7.6 Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas *Event* Khusus

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas *Event* Khusus yaitu:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
2. Surat Menteri Perhubungan Nomor AJ.201/1/5/PHB/2025 tanggal 27 Februari 2025 tentang Dukungan Antisipasi Selama Masa Angkutan Lebaran Tahun 2025 (1446 H); dan
3. Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor KP-DRJD 1099 Tahun 2025, Nomor HK.201/4/4/DJPL/2025, dan Nomor Kep/50/III/2025 dan Nomor 05/PKS/Db/2025 tentang Pengaturan Lalu Lintas serta Penyeberangan selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2025/1446 H.

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas *Event* Khusus memiliki target sebanyak 2 Kegiatan yang diperoleh dari capaian terhadap PK di tahun sebelumnya dan dengan berdasarkan arahan pimpinan pada pembahasan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025.

▪ Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas *Event* Khusus antara lain:

1. Koordinasi antar instansi dan stakeholder berjalan dengan baik dalam melaksanakan pengendalian lalu lintas di jalan;
2. Kesiapan sarana angkutan dan prasarana seperti bandara, Pelabuhan, dan terminal telah siap;
3. Ketersediaan informasi publik sangat baik, dimana informasi arus mudik dan balik angkutan lebaran serta angkutan natal dan tahun baru melalui media massa, media sosial, dan aplikasi mudah diperoleh dan mudah diakses oleh Masyarakat;
4. SDM dan/atau petugas lalu lintas yang terlibat dalam pelaksanaan pengendalian lalu lintas sangat berkompeten dalam mengatur arus lalu lintas di jalan berupa pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
5. Terdapat penggunaan teknologi informasi yang dapat mengantisipasi terjadinya kemacetan lalu lintas.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas *Event* Khusus antara lain:

1. Kemacetan pada beberapa titik di beberapa daerah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Sarana angkutan tidak tersedia sesuai dengan kebutuhan penumpang;
3. Pelayanan ke penumpang tidak memperhatikan SOP pelayanan;
4. Kurang jelasnya informasi yang tersedia seperti informasi terkait rute alternatif, sistem tiket, lokasi *rest area* dll;
5. Lemahnya koordinasi antar instansi dan stakeholder; dan
6. Pekerjaan tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas *Event* Khusus Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 1 Kegiatan yaitu Pelaksanaan Angkutan Lebaran Tahun 2025/1446 H.

▪ **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas *Event* Khusus Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 100%.

$$\text{IKK 7.6 Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Event Khusus} = \frac{\text{Realisasi Jumlah Kegiatan}}{\text{Target Jumlah Kegiatan}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{2 \text{ Kegiatan}}{2 \text{ Kegiatan}} \times 100\% = 100\%$$

▪ **Realisasi Anggaran**

Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas *Event* Khusus Tahun 2025 5 sebesar Rp. 60.000.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 51.205.000,- atau mencapai 85,34%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas *Event* Khusus antara lain:

1. Melaksanakan monitoring/pengawasan lebih awal terkait lokasi pemantauan arus mudik dan arus balik angkutan lebaran serta angkutan natal dan tahun baru;
2. Melakukan sosialisasi kepada petugas pengatur lalu lintas di jalan terkait informasi arus mudik dan arus balik angkutan lebaran serta angkutan natal dan tahun baru, agar petugas memahami hal-hal yang perlu dilakukan dalam mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan;
3. Memperkuat penyebaran informasi arus mudik dan arus balik angkutan lebaran serta angkutan natal dan tahun baru kepada Tim Humas agar masyarakat mengetahui informasi yang jelas dan akurat; dan
4. Melakukan pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh petugas BPTD kelas II Sumatera Selatan dengan Instansi terkait.

Sasaran Kegiatan 8: Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP

Pencapaian Sasaran Kegiatan 8 diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

IKK 8.2 : Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM;

IKK 8.4 : Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM;

IKK 8.5 : Operasional Layanan Kapal Kerja sesuai SPM; dan

IKK 8.6 : Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan.

IKK 8.2 Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM merupakan penyelenggaraan Pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul untuk menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya sesuai dengan persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa.

Standar Pelayanan Penumpang di Pelabuhan Penyeberangan paling sedikit meliputi (1) Pelayanan di Terminal, (2) Pelayanan di Ruang Tunggu, (3) Pelayanan *Gangway*, (4) Pelayanan

Kapal di Pelabuhan Penyeberangan, (5) Kendaraan di JT, (6) Kendaraan di Loker, (7) Kendaraan di Parkir Tunggu, (8) Kendaraan di Parkir Siap Muat.

Tabel II.11 Aspek Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan Penyeberangan

NO	URAIAN PELAYANAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR
A. Pelayanan Penumpang di Pelabuhan Penyeberangan			
A.1. PELAYANAN DI TERMINAL KEBERANGKATAN PENUMPANG			
1	KESELAMATAN		
	a. Peralatan Penyelamatan Darurat:		
	a.1. Alat Pemadam Kebakaran		
		- Ketersediaan	Tersedianya APAR Sesuai dengan kebutuhan minimal 1 unit
		- Kondisi	Apar bisa di pakai
		- Penempatan	Penempatan APAR Strategis
	a.2. Petunjuk Jalur Evakuasi		
		- Ketersediaan	Tersedia petunjuk arah jalur evakuasi sesuai dengan kebutuh
		- Kondisi	Mudah terbaca
		- Penempatan	penempatan di tempat strategis
	a.3. Titik Kumpul evakuasi		
		- Ketersediaan	Tersedianya titik kumpul evakuasi
		- Kondisi	Mudah terbaca
		- Penempatan	penempatan di tempat strategis
	a.4. Informasi nomor telepon darurat		
		- Ketersediaan	Tersedianya informasi nomor telepon darurat
		- Kondisi	Mudah terbaca
		- Penempatan	penempatan di tempat strategis
	b. Fasilitas kesehatan:		
	b.1 Perlengkapan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan)		
		- Ketersediaan	Tersedianya fasilitas kesehatan untuk penanganan darurat
		- Kondisi	Sesuai dengan syarat-syarat P3K
		- Penempatan	penempatan di tempat strategis
	b.2 Kursi Roda		
		- Ketersediaan	Tersedianya fasilitas kesehatan untuk penanganan darurat
		- Kondisi	alat kesehatan masih bisa dimanfaatkan
2	KEAMANAN		
	a. Petugas Keamanan Berseragam dan Identitas		
		- Ketersediaan	Tersedianya petugas berseragam dan mudah dilihat
	b. Fasilitas Keamanan		
	b.1 CCTV		
		- Ketersediaan	Tersedianya CCTV Sesuai dengan kebutuhan minimal 1 unit
		- Kondisi	Berfungsi dan rekaman dapat dimanfaatkan
		- Penempatan	Penempatan di tempat Strategis
	b.2 Informasi Gangguan Keamanan		
		- Ketersediaan	Tersedianya Stiker nomor telpon pengaduan Sesuai dengan k
		- Kondisi	Mudah terbaca
		- Penempatan	penempatan di tempat strategis
3	KENYAMANAN		
	a. WC/Kamar Mandi untuk Pria dan Wanita		
		- Ketersediaan	tersedia 1 (satu) kamar mandi/WC untuk 50 penumpang dan
		- Kondisi	Areal bersih 100% dan tidak berbau yang berasal dalam kam
	b. Tempat Ibadah Musholla dan perlengkapannya		
		- Ketersediaan	Tersedia sesuai kapasitas pelabuhan
		- Kondisi	Areal bersih 100% dan tidak berbau yang berasal dalam Musl
	c. Kantin		
		- Ketersediaan	Tersedia sesuai kapasitas pelabuhan
		- Kondisi	Areal bersih 100% dan tidak berbau yang berasal dalam Kant
	d. Lampu Penerangan		
		- Ketersediaan	Tersedia sesuai kapasitas pelabuhan
		- Kondisi	intensitas cahaya 200 - 300 lux
	e. Lajur Penumpang Keberangkatan		
		- Ketersediaan	Tersedia jalur pemisah penumpang keberangkatan
		- Kondisi	
	f. Lajur Penumpang Kedatangan		
		- Ketersediaan	Tersedia jalur pemisah penumpang kedatangan
		- Kondisi	

NO	URAIAN PELAYANAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR
4	KEMUDAHAN KETERJANGKAUAN		
	a. Informasi Pelayanan		
	a.1. Denah/Layout terminal		
		- Ketersediaan	Tersedianya denah/layout pelabuhan
		- Kondisi	Mudah terbaca
		- Penempatan	penempatan di tempat strategis
	a.2. Tarif Masuk		
		- Ketersediaan	tersedianya informasi biaya
		- Kondisi	Mudah terbaca
		- Penempatan	penempatan di tempat strategis
	b. Informasi Keberangkatan, Kedatangan & Gangguan Perjalanan kapal		
	b.1. Informasi Melalui Audio Speaker		
		- Ketersediaan	Informasi dalam bentuk Audio Speaker yang disampaikan did
		- Kondisi	informasi dalam bentuk audio harus jelas terdengar dangan in
	b.2. Informasi Melalui Visual		
		- Ketersediaan	Informasi dalam bentuk Visual yang disampaikan didalam pel
		- Kondisi	Mudah terbaca
		- Penempatan	penempatan di tempat strategis
	c. Informasi Angkutan Lanjutan		
	c.1. Informasi Melalui Visual		
		- Ketersediaan	Informasi dalam bentuk Visual yang disampaikan didalam pel
		- Kondisi	Mudah terbaca
		- Penempatan	penempatan di tempat strategis
	d. Fasilitas Layanan Informasi Penumpang		
		- Ketersediaan	Informasi dalam bentuk Visual yang disampaikan didalam pel
		- Kondisi	penempatan di tempat strategis
	e. Tempat Parkir		
	e.1. Lahan Parkir Kendaraan Roda 2 (dua)		
		- Ketersediaan	Tersedianya lahan parkir roda 2
		- Kondisi	Sirkulasi kendaraan masuk, keluar lancar di waktu parkir
	e.2. Lahan Parkir Kendaraan Roda 4 (empat)		
		- Ketersediaan	Tersedianya lahan parkir roda 4
		- Kondisi	Sirkulasi kendaraan masuk, keluar lancar di waktu parkir
	e.3. Lajur Masuk/Keluar Kendaraan		
		- Ketersediaan	Tersedianya Lajur pemisah keluar/masuk kendaraan
		- Kondisi	Sirkulasi kendaraan masuk, keluar lancar
	e.4. Petugas Parkir		
		- Ketersediaan	Tersedianya petugas berseragam dan mudah dilihat
	f. Pelayanan Bagasi penumpang/Petugas Porter		
		- Ketersediaan	Tersedianya petugas yang mudah dilihat
		- Kondisi	petugas berseragam dan mudah dilihat
5	KEHANDALAN KE		
	a. Ketersediaan Loker		
		- Kondisi	Tersedianya loket sesuai dengan kebutuhan
	b. Waktu antri di Loket		
		- Kondisi	Kurang dari 5 (lima) menit per penumpang
6	KESETARAAN		
	6.a. Fasilitas bagi penumpang cacat (difiable)		
		- Ketersediaan Lajur Khusus	tersedianya lajur khusus untuk penumpang cacat (difiable)
		- Kondisi	Bisa dimanfaatkan

NO	URAIAN PELAYANAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR
A.2. PELAYANAN RUANG TUNGGU			
1	KESELAMATAN		
	a. Peralatan Penyelamatan Darurat:		
	a.1. Alat Pemadam Kebakaran		
		- Ketersediaan	Tersedianya APAR Sesuai dengan kebutuhan minimal 1 unit
		- Kondisi	Apar bisa di pakai
		- Penempatan	Penempatan APAR Strategis
	a.2. Petunjuk Jalur Evakuasi		
		- Ketersediaan	Tersedia petunjuk arah jalur evakuasi sesuai dengan kebutuh
		- Kondisi	Mudah terbaca
		- Penempatan	penempatan di tempat strategis
	b. Fasilitas kesehatan:		
	b.1. Perlengkapan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan)		
		- Ketersediaan	Tersedianya fasilitas kesehatan untuk penanganan darurat
		- Kondisi	Sesuai dengan syarat-syarat P3K
		- Penempatan	penempatan di tempat strategis
	b.2. Klinik/Pos Kesehatan		
		- Ketersediaan	Tersedianya fasilitas kesehatan untuk penanganan darurat
		- Kondisi	Areal bersih 100% dan tidak berbau yang berasal dalam klinik
		- Penempatan	penempatan di tempat strategis
2	KEAMANAN		
	a. Petugas Keamanan Berseragam dan Identitas		
		- Ketersediaan	Tersedianya petugas berseragam dan mudah dilihat
	b. Fasilitas Keamanan		
	b.1. CCTV		
		- Ketersediaan	Tersedianya CCTV Sesuai dengan kebutuhan minimal 1 unit
		- Kondisi	Berfungsi dan rekaman dapat dimanfaatkan
		- Penempatan	Penempatan di tempat Strategis
3	KENYAMANAN		
	a. Ruang tunggu		
		- Luas	Untuk 1 (satu) orang minimum 0,5 m2
		- Kondisi	Areal bersih 100% dan tidak berbau yang bersala dalam areal
	b. Fasilitas Pengatur Suhu		
		- Ketersediaan	Tersedia fasilitas pengatur suhu
		- Kondisi	Suhu dalam terminal penumpang maksimal 27 oC
	c. WC/Kamar Mandi untuk Pria dan Wanita		
		- Ketersediaan	tersedia 1 (satu) kamar mandi/WC untuk 50 penumpang dan
		- Kondisi	Areal bersih 100% dan tidak berbau yang berasal dalam kama
	d. Lampu Penerangan		
		- Ketersediaan	Tersedia sesuai kapasitas pelabuhan
		- Kondisi	intensitas cahaya 200 - 300 lux
4	KEMUDAHAN KETERJANGKAUAN		
	a. Informasi Gangguan Perjalanan Kapal		
	a.1. Informasi Melalui Audio Speaker		
		- Ketersediaan	Informasi dalam bentuk Audio Speaker yang disampaikan didi
		- Kondisi	informasi dalam bentuk audio harus jelas terdengar dangan ir
	a.2. Informasi Melalui Visual		
		- Ketersediaan	Informasi dalam bentuk Visual yang disampaikan didalam pel
		- Kondisi	Mudah terbaca
		- Penempatan	penempatan di tempat strategis
5	KEHANDALAN KETERATURAN		
	Ketersediaan Petugas		
		- Ketersediaan	Tersedianya petugas berseragam dan mudah dilihat
6	KESETARAAN		
	a. Fasilitas bagi penumpang cacat (difable)		
		- Ketersediaan	tersedianya lajur khusus untuk penumpang cacat (difable)
		- Kondisi	Bisa dimanfaatkan
	b. Ruang ibu menyusui		
		- Ketersediaan	tersedianya ruang ibu menyusui
		- Kondisi	Bisa dimanfaatkan

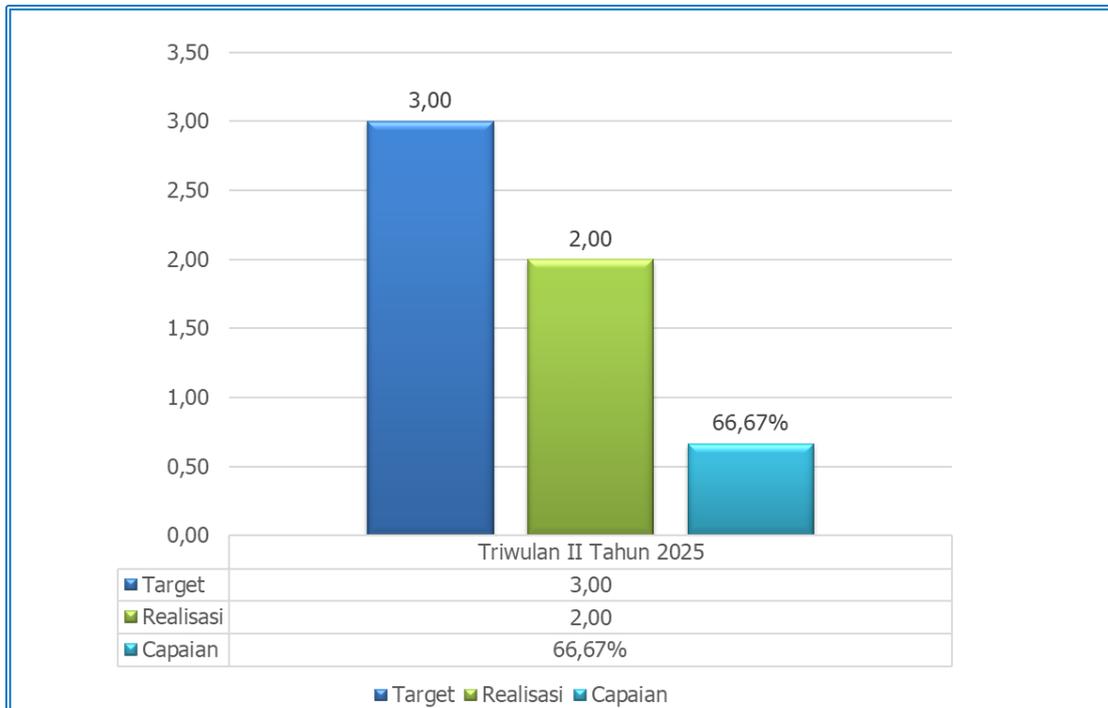
NO	URAIAN PELAYANAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR
A.3. PELAYANAN GANGWAY			
1	KEAMANAN		
	Fasilitas Keamanan		
	CCTV		
		- Ketersediaan	Tersedianya CCTV Sesuai dengan kebutuhan minimal 1 unit
		- Kondisi	Berfungsi dan rekaman dapat dimanfaatkan
		- Penempatan	Penempatan di tempat Strategis
2	KENYAMANAN		
	Lampu Penerangan		
		- Ketersediaan	Tersedia sesuai kapasitas pelabuhan
		- Penempatan	intensitas cahaya 200 - 300 lux
3	KESETERAAN		
	Fasilitas Jalur bagi penumpang cacat (difable)		
		- Ketersediaan Lajur khusus	tersedianya lajur khusus untuk penumpang cacat (difable)
		- Kondisi	Bisa dimanfaatkan
B. PELAYANAN KAPAL DI PELABUHAN PENYEBERANGAN			
1	KESELAMATAN		
	Rambu-rambu		
		- Ketersediaan	Tersedia penunjuk arah jalur evakuasi sesuai dengan kebutuhan
		- Kondisi	Mudah terbaca
		- Penempatan	penempatan di tempat strategis
2	KENYAMANAN		
	a. Fasilitas Sandar Kapal sesuai peraturan pemerintah		
		- Ketersediaan	Tersedia sesuai dengan kapasitas pelabuhan
		- Kondisi	kondisi sesuai dengan peraturan
	b. Perairan Tempat Labuh		
		- Ketersediaan	Tersedia sesuai dengan kapasitas pelabuhan
		- Kondisi	kondisi sesuai dengan peraturan
	c. Fasilitas Pendukung Alur Pelayaran		
		- Ketersediaan	Tersedia sesuai dengan kapasitas pelabuhan
		- Kondisi	kondisi sesuai dengan peraturan
	d. Lampu Penerangan		
		- Ketersediaan	Tersedia sesuai dengan kapasitas pelabuhan
		- Kondisi	intensitas cahaya 200 - 300 lux
3	KEHANDALAN KETERATURAN		
	a. Ketersediaan Petugas Darat		
		- Ketersediaan	Tersedianya petugas berseragam dan mudah dilihat
		- Penempatan	penempatan petugas sesuai dengan tugasnya
	b. Kesigapan Petugas Darat		
		- Kondisi	Kesigapan petugas darat untuk membantu proses kapal datar
	c. Waktu Tunggu Masuk/Keluar Dermaga		
		- Kondisi	Lamanya kapal menunggu antrian masuk dermaga
C. PELAYANAN KENDARAAN DI PELABUHAN PENYEBERANGAN			
C.1. KENDARAAN DI JEMBATAN TIMBANG			
1	KESELAMATAN		
	Rambu-rambu		
		- Ketersediaan	Tersedia penunjuk arah jalur evakuasi sesuai dengan kebutuhan
		- Kondisi	Mudah terbaca
		- Penempatan	penempatan di tempat strategis
2	KEAMANAN		
	Fasilitas Keamanan		
	- CCTV + Audio Speaker		
		- Ketersediaan	Tersedianya CCTV Sesuai dengan kebutuhan minimal 1 unit
		- Kondisi	Berfungsi dan rekaman dapat dimanfaatkan
3	KENYAMANAN		
	a. Alat Penimbangan		
		- Ketersediaan	Tersedianya alat penimbang kendaraan sesuai dengan kebutuhan
		- Kondisi	kondisi alat penimbang
	b. Petugas Penimbangan		
		- Ketersediaan	Tersedianya petugas berseragam dan mudah dilihat

NO	URAIAN PELAYANAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR
4	KEMUDAHAN KETERJANGKAUAN		
	a. Alat Penghitung Berat Kendaraan		
		- Ketersediaan	Tersedianya alat penimbang kendaraan sesuai dengan kebutuhan
		- Penempatan	kondisi alat penghitungan berat kendaraan
5	KEHANDALAN KETERATURAN		
	a. Kesigapan Petugas Darat		
		- Kesigapan	Kesigapan petugas darat untuk membantu proses kapal datar
		- Kondisi	Tersedianya petugas berseragam dan mudah dilihat
	b. Waktu antri di Jembatan timbang		
		- Kondisi	Lamanya mobil menunggu antrian menunggu ditimbang
C.2.	KENDARAAN DI LOKET		
1	KENYAMANAN		
	Lampu Penerangan		
		- Ketersediaan	Tersedia sesuai dengan kapasitas pelabuhan
		- Kondisi	intensitas cahaya 200 - 300 lux
2	KEMUDAHAN KETERJANGKAUAN		
	a. Jadwal kedatangan dan keberangkatan		
		- Ketersediaan	Tersedia jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal
	b. Tarif Penyeberangan		
		- Ketersediaan	
		- Penempatan	
3	KEHANDALAN KETERATURAN		
	a. Keberadaan Petugas		
		- Ketersediaan	Tersedianya petugas berseragam dan mudah dilihat
		- Kondisi Berseragam dan Identitas	
	b. Jalur Pemisah Kendaraan (roda 2, Roda 4 dan Bus/truk)		
		- Penempatan	Tersedia jalur pemisah kendaraan
C.3.	KENDARAAN DI LAPANGAN PARKIR TUN		
1	KENYAMANAN		
	Lampu Penerangan		
		- Ketersediaan	Tersedia sesuai dengan kapasitas pelabuhan
		- Kondisi	intensitas cahaya 200 - 300 lux
		- Penempatan	penempatan di tempat strategis
2	KEHANDALAN KETERATURAN		
	a. Ketersediaan Petugas		
		- Ketersediaan	Tersedianya petugas berseragam dan mudah dilihat
		- Penempatan	penempatan petugas di tempat strategis
	c. Jalur Pemisah Kendaraan (roda 2, Roda 4 dan Bus/truk)		
		- Kondisi	Tersedia jalur pemisah kendaraan
C.4.	KENDARAAN DI LAPANGAN PARKIR SIAF		
1	KENYAMANAN		
	a. Lampu Penerangan		
		- Ketersediaan	Tersedia sesuai dengan kapasitas pelabuhan
		- Kondisi	intensitas cahaya 200 - 300 lux
2	KEHANDALAN KETERATURAN		
	a. Ketersediaan Petugas		
		- Ketersediaan	Tersedianya petugas berseragam dan mudah dilihat
	c. Waktu antri muat		
		- Ketersediaan	Kurang dari 5 (lima) menit per penumpang
	d. Jalur Pemisah Kendaraan (Masuk dan Keluar)		
		- Ketersediaan	Tersedia jalur pemisah kendaraan

Sumber : BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM Tahun 2025 sebesar 2 Unit jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 3 Unit, maka capaian kinerja mencapai 66,67%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.11**. Grafik Capaian IKK 8.2 Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM.



Gambar II.11. Grafik Capaian IKK 8.2 Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ **Dasar Hukum**

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan.

▪ **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM memiliki target 3 Unit yang diperoleh dari kondisi eksisting dengan berdasarkan arahan pimpinan pada pembahasan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025.

▪ **Faktor Keberhasilan**

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM antara lain:

1. Terlaksana dengan baik kegiatan operasional di Pelabuhan Penyeberangan;
2. Terlaksana dengan baik koordinasi dengan *stakeholder* terkait pelayanan di Pelabuhan Penyeberangan; dan
3. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan sesuai dengan ketentuan regulasi.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM antara lain:

1. Blokir anggaran dikarenakan efisiensi anggaran; dan
2. Belum adanya kepastian buka blokir anggaran sehingga kegiatan layanan di Pelabuhan Penyeberangan yang sesuai dengan SPM belum dapat berjalan dengan optimal.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 2 Unit yaitu Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api dan Pelabuhan Penyeberangan Sri Menanti dengan hasil realisasi pelaksanaan SPM sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel II.12 Realisasi Kinerja Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan

No.	PELABUHAN	Triwulan I			Triwulan II		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api	75,10	76,10	76,10	76,10	76,10	76,10
2	Pelabuhan Penyeberangan Sri Menanti	46,67	47,54	47,54	51,74	51,74	51,74
Nilai Rata-rata		60,88	61,82	61,82	63,92	63,92	63,92

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

Tabel II.13 Konversi Nilai Pelayanan

Konversi Nilai	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
0 - 55	E	Buruk
56 - 65	D	Kurang
66 - 75	C	Cukup
76 - 85	B	Baik
86 - 100	A	Baik Sekali

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

- **Capaian Kinerja**

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 66,67%.

$$\text{IKK 8.2 Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM} \\ = \frac{\text{Realisasi Jumlah Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM}}{\text{Target Jumlah Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{2 \text{ unit}}{3 \text{ Unit}} \times 100\% = 66,67\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM Tahun 2025 sebesar Rp. 237.000.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 0 atau mencapai 0%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM Tahun 2025 antara lain:

1. Menyediakan peralatan dan perlengkapan fasilitas pelayanan di Pelabuhan Penyeberangan seperti APAR, penunjuk arah jalur evakuasi, informasi nomor telepon darurat, fasilitas kesehatan P3K, CCTV dan lain-lain sesuai dengan rekomendasi hasil pelaksanaan SPM;
2. Menyediakan fasilitas layanan informasi seperti informasi kedatangan keberangkatan dan gangguan kapal, informasi angkutan lanjutan;
3. Menyediakan fasilitas pengatur suhu dan pos kesehatan untuk penanganan darurat di ruang tunggu dan fasilitas lajur khusus penyandang cacat (*difable*);
4. Menyediakan jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal;
5. Melaksanakan pengawasan kegiatan operasional di Pelabuhan Penyeberangan; dan
6. Menyediakan alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan SPM di Pelabuhan Penyeberangan.

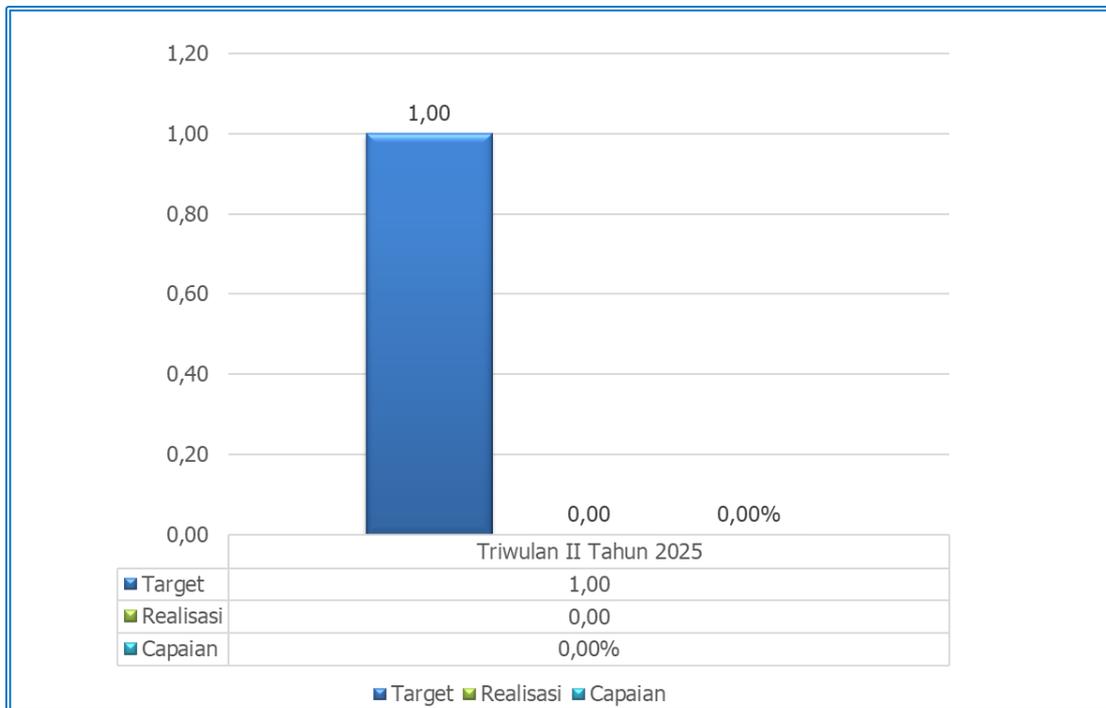
IKK 8.4 Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM Merupakan penyelenggaraan Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau sesuai dengan persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM Tahun 2025 sebesar 0 Unit jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 1 Unit, maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.12**. Grafik Capaian IKK Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM.



Gambar II.12. Grafik Capaian IKK 8.4 Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ **Dasar Hukum**

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM masih mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan. Hal ini dikarenakan belum adanya regulasi terkait pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Sungai dan Danau.

▪ **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM memiliki target 1 Unit Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM yaitu Pemenuhan SPM Pelabuhan Sungai Lumpur yang berdasarkan arahan pimpinan pada pembahasan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025.

▪ **Faktor Keberhasilan**

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM antara lain:

1. Terlaksana dengan baik kegiatan operasional di Pelabuhan Sungai dan Danau;
2. Terlaksana dengan baik koordinasi dengan *stakeholder* terkait pelayanan di Pelabuhan Sungai dan Danau; dan
3. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan sesuai dengan ketentuan regulasi.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM antara lain:

1. Belum terbentuknya Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai Lumpur;
2. Belum adanya regulasi yang mengatur khusus pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan Sungai dan Danau; dan
3. Ketersediaan SDM di Pelabuhan Sungai dan Danau belum mencukupi dan berkompeten;
4. Belum adanya kepastian buka blokir anggaran sehingga kegiatan layanan di Pelabuhan Penyeberangan yang sesuai dengan SPM belum dapat berjalan dengan optimal.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 0 Unit Pelabuhan Sungai.

▪ **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM Tahun 2025 sebesar 0% sehingga capaian kinerja mencapai 0%.

$$\begin{aligned}
 & \text{IKK 8.4 Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM} \\
 & = \frac{\text{Realisasi Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM}}{\text{Target Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM}} \times 100\% \\
 & \text{\% Capaian Kinerja} = \frac{0 \text{ Unit}}{1 \text{ Unit}} \times 100\% = 0\%
 \end{aligned}$$

▪ **Realisasi Anggaran**

Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM Tahun 2025 sebesar Rp. 237.000.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 0 atau mencapai 0%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Kegiatan Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM yaitu:

1. Pengoperasian Pelabuhan Sungai Lumpur dilaksanakan dengan mekanisme kerjasama operasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Melaksanakan pengawasan kegiatan operasional di Pelabuhan Sungai dan Danau; dan
3. Menyediakan alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan SPM di Pelabuhan Sungai dan Danau.

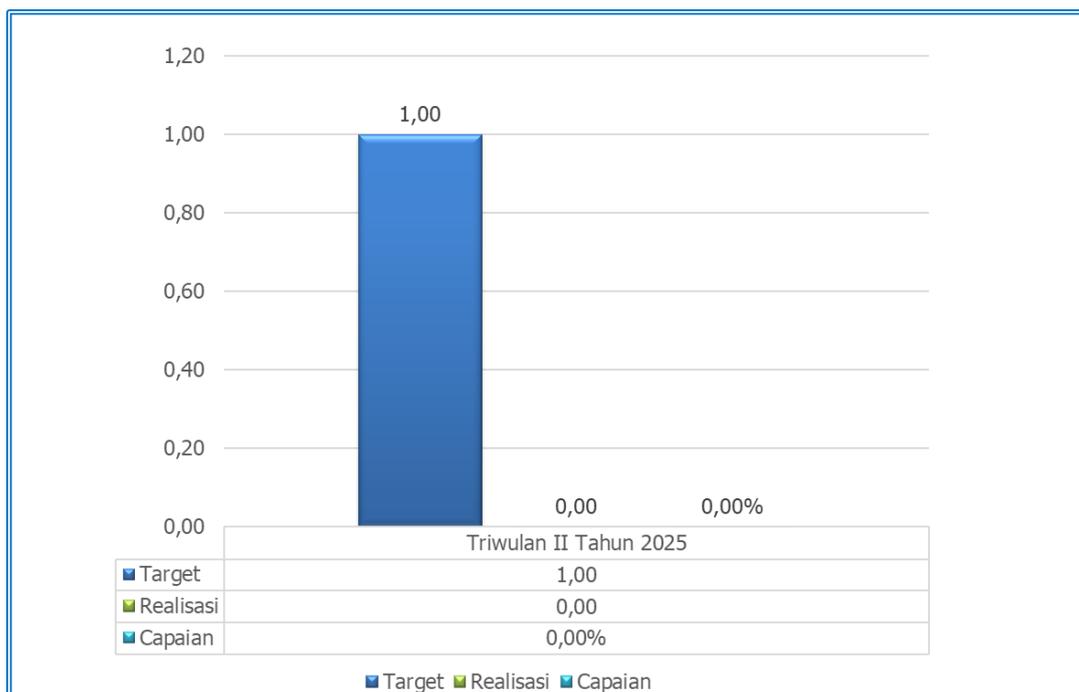
IKK 8.5 Operasional Layanan Kapal Kerja sesuai SPM

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Operasional layanan Kapal Kerja sesuai SPM merupakan Kegiatan Operasional kapal kerja di Provinsi Sumatera Selatan (Operasional dan Pemeliharaan Kapal Patroli).

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Operasional Layanan Kapal Kerja sesuai SPM Tahun 2025 sebesar 0 Unit jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 1 Unit, maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.13** Grafik Capaian IKK 8.5 Operasional Layanan Kapal Kerja sesuai SPM.



Gambar II.13. Grafik Capaian IKK 8.5 Operasional Layanan Kapal Kerja sesuai SPM

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Dasar hukum Operasional Layanan Kapal Kerja sesuai SPM mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; dan
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PM 20 Tahun 2018, PM 6 Tahun 2023 dan dan terakhir diubah dengan PM 1 Tahun 2025 tentang tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Operasional Layanan Kapal Kerja sesuai SPM memiliki target 1 Unit yang diperoleh dari capaian terhadap PK di tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan pada pembahasan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025.

▪ Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Operasional Layanan Kapal Kerja sesuai SPM antara lain:

1. Perawatan dan pemeliharaan berkala kapal kerja; dan
2. Alokasi anggaran operasional kapal kerja telah dianggarkan sesuai dengan kebutuhan operasional layanan kapal kerja.

▪ Faktor Kegagalan

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Operasional Layanan Kapal Kerja sesuai SPM antara lain:

1. Kapal kerja tidak dioperasionalkan dan tidak dilakukan pemeliharaan/perawatan secara berkala; dan
2. Efisiensi anggaran berdampak pada biaya operasional kapal kerja tidak tersedia sehingga kapal kerja perlu pengaturan dan perawatan kapal kerja, tidak bisa beroperasi sebagaimana fungsinya.

▪ Realisasi Kinerja

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Operasional Layanan Kapal Kerja sesuai SPM Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 1 Unit yaitu kapal kerja KNP 207 di Provinsi Sumatera Selatan.

- **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Operasional Layanan Kapal Kerja sesuai SPM Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 0%.

$$\begin{aligned}
 & \text{IKK 8.5 Operasional Layanan Kapal Kerja Sesuai SPM} \\
 & = \frac{\text{Realisasi Jumlah Operasional Kapal Kerja sesuai SPM}}{\text{Target Jumlah Operasional Kapal Kerja sesuai SPM}} \times 100\% \\
 & \% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{0 \text{ Unit}}{1 \text{ Unit}} \times 100\% = 0\%
 \end{aligned}$$

- **Realisasi Anggaran**

Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan Operasional Layanan Kapal Kerja sesuai SPM Tahun 2025 sebesar Rp. 2.669.021.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 330.211.510,- atau mencapai 12,37%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Kegiatan Operasional Layanan Kapal Kerja sesuai SPM yaitu:

1. Mengalokasikan anggaran operasional untuk layanan kapal kerja;
2. Melakukan pemeliharaan/perawatan terhadap kapal kerja; dan
3. Menyusun jadwal perawatan dan pemanasan agar kapal kerja selalu dalam kondisi baik.

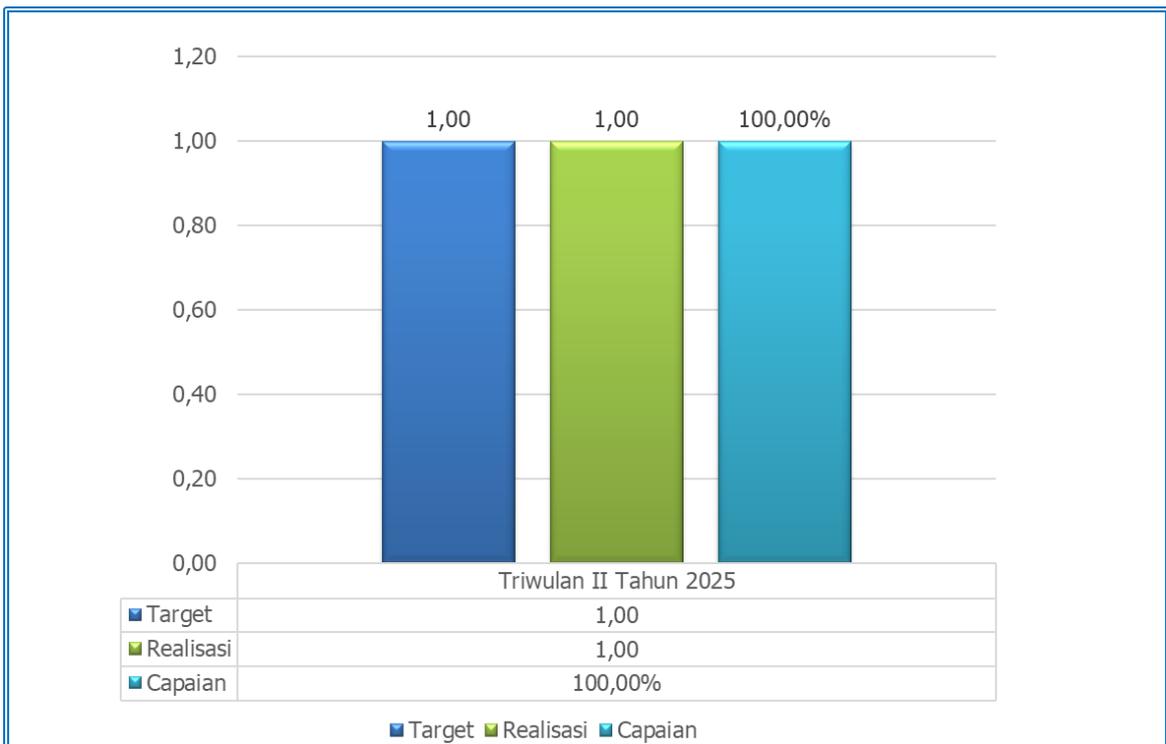
IKK 8.6 Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Operasional dan pemeliharaan pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan merupakan Kegiatan Operasional Pengawasan OTP di Provinsi Sumatera Selatan (Pemeliharaan dan Operasional *Local Port Service* (LPS) Tj. Api-Api).

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan Tahun 2025 sebesar 1 Unit jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 1 Unit, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.14.** Grafik Capaian IKK 8.6 Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan.



Gambar II.14. Grafik Capaian IKK 8.6 Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan; dan
2. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 4937 Tahun 2022 tentang Standar Peralatan Dan Perawatan *Local Port Service (LPS)* di Pelabuhan Penyeberangan.

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan memiliki target 1 Unit yang diperoleh dari capaian terhadap PK sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan pada pembahasan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025.

▪ Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan antara lain:

1. Infrastruktur yang memadai didukung dengan peralatan dan perlengkapan operasional;

2. SDM yang berkompeten; dan
3. Pengoperasian didukung oleh sistem informasi dan teknologi yang modern sehingga dapat memantau kegiatan operasional di Pelabuhan Penyeberangan.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan antara lain:

1. Kurangnya peralatan dan infrastruktur yang memadai;
2. Kurangnya koordinasi antar instansi dan *stakeholder* terkait; dan
3. SDM kurang berkompeten dalam mengoperasikan peralatan *Local Port Service* dan melakukan monitoring dan evaluasi.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 1 Unit yaitu Operasional Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api.

▪ **Capaian Kinerja**

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar dikarenakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

$$\begin{aligned}
 & \text{IKK 8.6 Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan} \\
 & = \frac{\text{Realisasi Jumlah Operasional Local Port Service}}{\text{Target Jumlah Operasional Local Port Service}} \times 100\% \\
 & \% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{1 \text{ Unit}}{1 \text{ Unit}} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

▪ **Realisasi Anggaran**

Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan Tahun 2025 sebesar Rp. 250.000.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 0 atau mencapai 0%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan yaitu:

1. Meningkatkan infrastruktur dan fasilitas di Pelabuhan Penyeberangan seperti jalan akses, dermaga, digitalisasi sistem informasi, dan fasilitas lainnya;
2. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan/diklat agar mahir mengoperasikan dan mengawasi *Local Port Service* di Pelabuhan Penyeberangan;
3. Koordinasi yang baik dengan stakeholder; dan
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala.

Sasaran Kegiatan 9: Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang

Pencapaian Sasaran Kegiatan 9 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

IKK 9.1 : Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata;

IKK 9.2 : Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang; dan

IKK 9.3 : Jumlah Fasilitas Penimbangan yang Dibangun dan Dioperasikan untuk Mendukung Keselamatan.

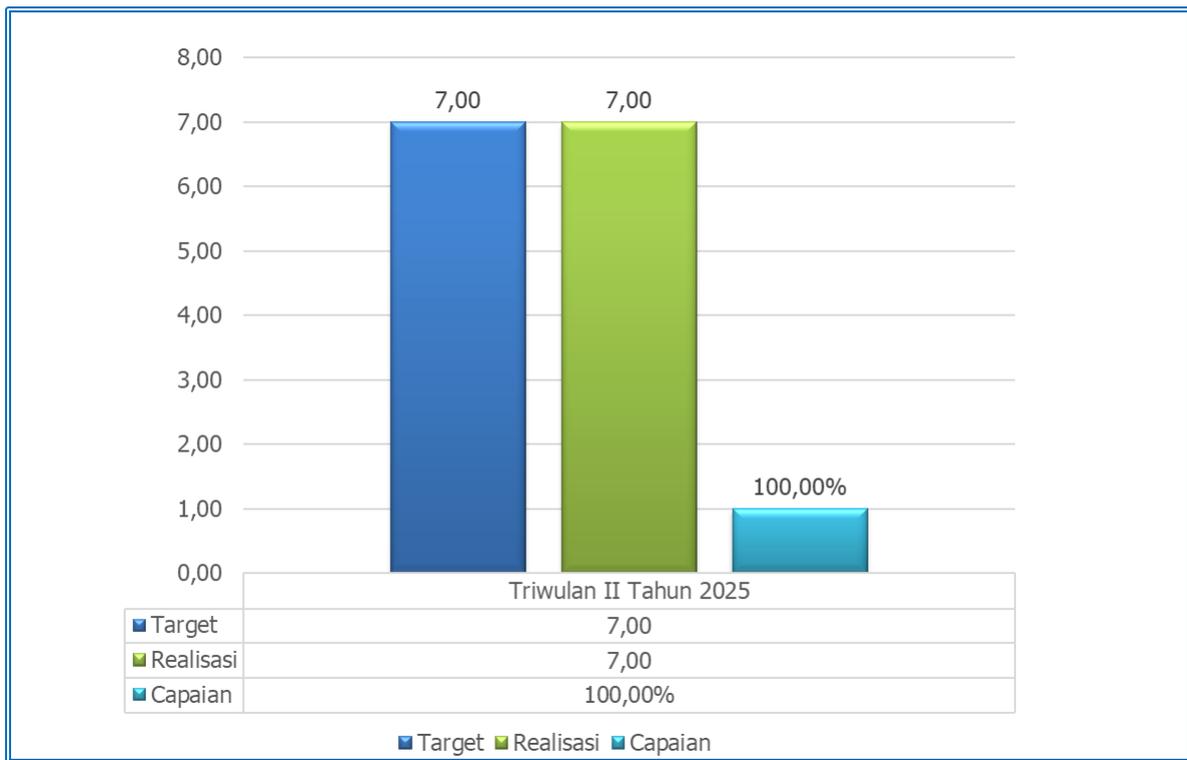
IKK 9.1 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP merupakan kegiatan Ramph Check angkutan AKAP yang dilaksanakan di Terminal Tipe A.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata Tahun 2025 sebesar 7 Kegiatan jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 7 Kegiatan, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.15**. Grafik Capaian IKK 9.1 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata.



Gambar II.15. Grafik Capaian IKK 9.1 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan; dan
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata memiliki target 7 Kegiatan yang diperoleh dari capaian terhadap PK sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan pada pembahasan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025.

▪ Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata antara lain:

1. Terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan angkutan AKAP/AJAP/Pariwisata;
2. Terlaksananya pengawasan terhadap izin penyelenggaraan angkutan AKAP/AJAP/Pariwisata;
3. Kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku;
4. Petugas pengawas operasional di Terminal Tipe A berkompeten dalam melaksanakan tugas pengawasan operasional angkutan AKAP/AJAP/Pariwisata; dan
5. Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan dengan didukung oleh peralatan manual ataupun elektronik berbasis digital sebagaimana ketentuan regulasi.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata antara lain:

1. Petugas pengawas operasional tidak berkompeten dalam melakukan pengawasan dan kurang memahami prosedur pengawasan;
2. Peralatan untuk melakukan pengawasan operasional rusak dan tidak dilakukan pemeliharaan secara berkala; dan
3. Blokir anggaran dikarenakan efisiensi anggaran, *refocusing* anggaran dan/atau *automatic adjustment*.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 7 Kegiatan meliputi:

1. Pengawasan Operasional AKAP di Terminal Tipe A Alang-Alang Lebar;
2. Pengawasan Operasional AKAP di Terminal Tipe A Karya Jaya;
3. Pengawasan Operasional AKAP di Terminal Tipe A Kayu Agung;
4. Pengawasan Operasional AKAP di Terminal Tipe A Batu Kuning;
5. Pengawasan Operasional AKAP di Terminal Tipe A Batay;
6. Pengawasan Operasional AKAP di Terminal Tipe A Simpang Periuk; dan
7. Pengawasan Operasional AKAP di Terminal Tipe A Betung.

▪ **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 100%.

$$\text{IKK 9.1 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP dan Pariwisata} \\ = \frac{\text{Realisasi Jumlah Kegiatan Rampcheck Angkutan AKAP di Terminal Tipe A}}{\text{Target Jumlah Kegiatan Rampcheck Angkutan AKAP di Terminal Tipe A}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{7 \text{ Kegiatan}}{7 \text{ Kegiatan}} \times 100\% = 100\%$$

▪ **Realisasi Anggaran**

Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata Tahun 2025 sebesar Rp. 907.170.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 0,- atau mencapai 0%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata antara lain:

1. Melakukan pengawasan operasional angkutan AKAP/AJAP/Pariwisata tidak hanya di Terminal Tipe A, tetapi juga di lokasi pool PO Bus;
2. Menyampaikan himbauan kepada PO Bus AKAP/AJAP/Pariwisata untuk melakukan kegiatan rampcheck di dalam Terminal Tipe A;
3. Melakukan sosialisasi terkait penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor sesuai dengan *update* regulasi yang berlaku; dan
4. Meningkatkan kualitas SDM sebagai petugas pengawas agar memiliki tambahan wawasan terkait regulasi penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor.

IKK 9.2 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang

a.1. Definisi Indikator Kinerja

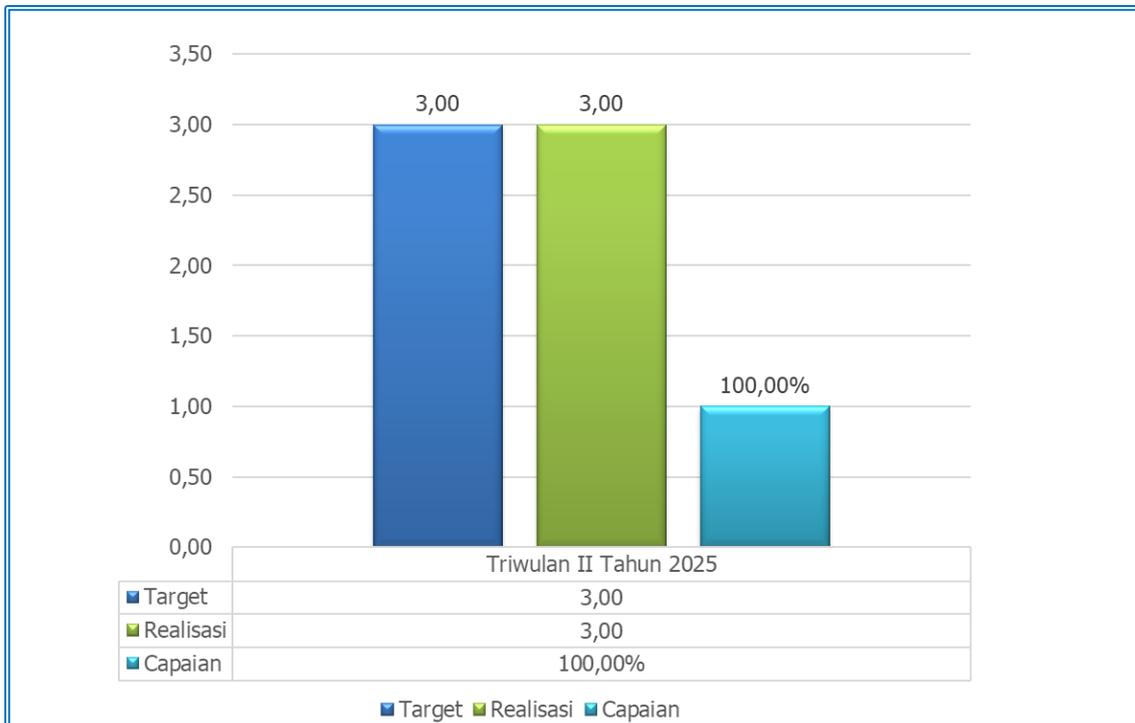
Jumlah kegiatan pengawasan operasional angkutan barang merupakan kegiatan pengendalian dan pelaksanaan operasional angkutan barang di UPPKB. Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan bahwa pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat pengawasan dan pengamanan jalan yang berupa:

1. Alat Penimbangan yang dipasang secara tetap, dimana dilakukan di fasilitas penimbangan; dan
2. Alat Penimbangan yang dapat dipindahkan dilakukan pada saat:
 - a. Terdapat indikasi peningkatan pelanggaran muatan angkutan barang;
 - b. Kecenderungan kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kelebihan muatan angkutan barang;

- c. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan;
- d. Belum ada fasilitas penimbangan pada ruas jalan nasional dan jalan strategis nasional;
- e. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota; dan/atau
- f. Alat penimbangan yang dipasang secara tetap mengalami kerusakan.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang Tahun 2025 sebesar 3 Kegiatan jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 3 Kegiatan, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.16**. Grafik Capaian IKK Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang.



Gambar II.16. Grafik Capaian IKK 9.2 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ **Dasar Hukum**

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang antara lain:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan; dan
2. Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SE 116 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Penindakan Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Atas

Pelanggaran Ukuran Lebih (*Over Dimension*) dan/atau Pelanggaran Muatan Lebih (*Over Loading*) di Jalan Tol.

▪ **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang memiliki target 3 Kegiatan yang diperoleh dari kondisi eksisting dengan beroperasinya UPPKB Merapi, UPPKB Talang Kelapa dan UPPKB Kertapati, serta dengan berdasarkan arahan pimpinan pada pembahasan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025.

▪ **Faktor Keberhasilan**

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang antara lain:

1. Terlaksanakan kegiatan pengawasan terkait pelanggaran dimensi dan muatan (*Over Dimension and Over Loading*) di UPPKB;
2. Terlaksanakan kegiatan penegakan hukum pada angkutan barang yang melakukan pelanggaran dimensi dan muatan (*Over Dimension and Over Loading*) di UPPKB; dan
3. Terlaksanakan kegiatan sosialisasi dimensi dan muatan angkutan ODOL (*Over Dimension and Over Loading*) kepada operator angkutan barang untuk mengurangi ODOL di jalan.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang antara lain:

1. Kurangnya pemahaman operator angkutan barang dan pengemudi terkait ketentuan dimensi dan muatan (*over dimension and over loading*);
2. Kurangnya sinergi antar instansi dalam melaksanakan penegakan hukum terkait ODOL (*over dimension and over loading*); dan
3. Belum adanya pendampingan petugas untuk memasukkan kendaraan angkutan barang, sehingga kebanyakan kendaraan angkutan barang tidak patuh untuk masuk ke dalam UPPKB;
4. Peralatan penimbangan kendaraan bermotor (*Weigh in Motion*) tidak berfungsi dengan baik dan terkadang tidak dapat mendeteksi berat terutama dimensi kendaraan angkutan barang yang lewat.
5. Pelaksanaan Sosialisasi Program Zero ODOL masih belum optimal melibatkan seluruh stakeholder dan instansi terkait.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 3 Kegiatan yang meliputi:

1. Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang di UPPKB Talang Kelapa;
2. Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang di UPPKB Kertapati; dan
3. Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang di UPPKB Merapi.

▪ **Capaian Kinerja**

Capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang Tahun 2025 sebesar 3 Kegiatan jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 3 Kegiatan, maka capaian kinerja sebesar 100%.

$$\begin{aligned}
 & \text{IKK 9.2 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang} \\
 & = \frac{\text{Realisasi Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang di UPPKB}}{\text{Target Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang di UPPKB}} \times 100\% \\
 & \qquad \qquad \qquad \% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{3 \text{ Kegiatan}}{3 \text{ Kegiatan}} \times 100\% = 122,31\%
 \end{aligned}$$

▪ **Realisasi Anggaran**

Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang Tahun 2025 sebesar Rp. 3.241.457.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 789.030.086,- atau mencapai 24,34%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang yaitu:

1. Melaksanakan monitoring/pengawasan muatan dan dimensi angkutan barang di UPPKB;
2. Melaksanakan penegakan hukum angkutan barang yang melanggar ketentuan muatan dan dimensi angkutan barang melalui kerja sama dengan *stakeholder* terkait dalam implementasi Program Zero ODOL;
3. Perlunya pendampingan dari pihak TNI/POLRI pada saat pengawasan angkutan barang di dalam UPPKB;
4. Perlunya perbaikan sistem melalui peningkatan digitalisasi agar kendaraan terdeteksi dan terintegrasi dengan data *E-Blue* dan *E-Tilang* , sehingga diharapkan petugas tidak perlu lagi mengatur kendaraan untuk masuk ke dalam UPPKB; dan
5. Melaksanakan sosialisasi ODOL (*over dimension and over loading*) kepada operator dan *driver* angkutan barang.

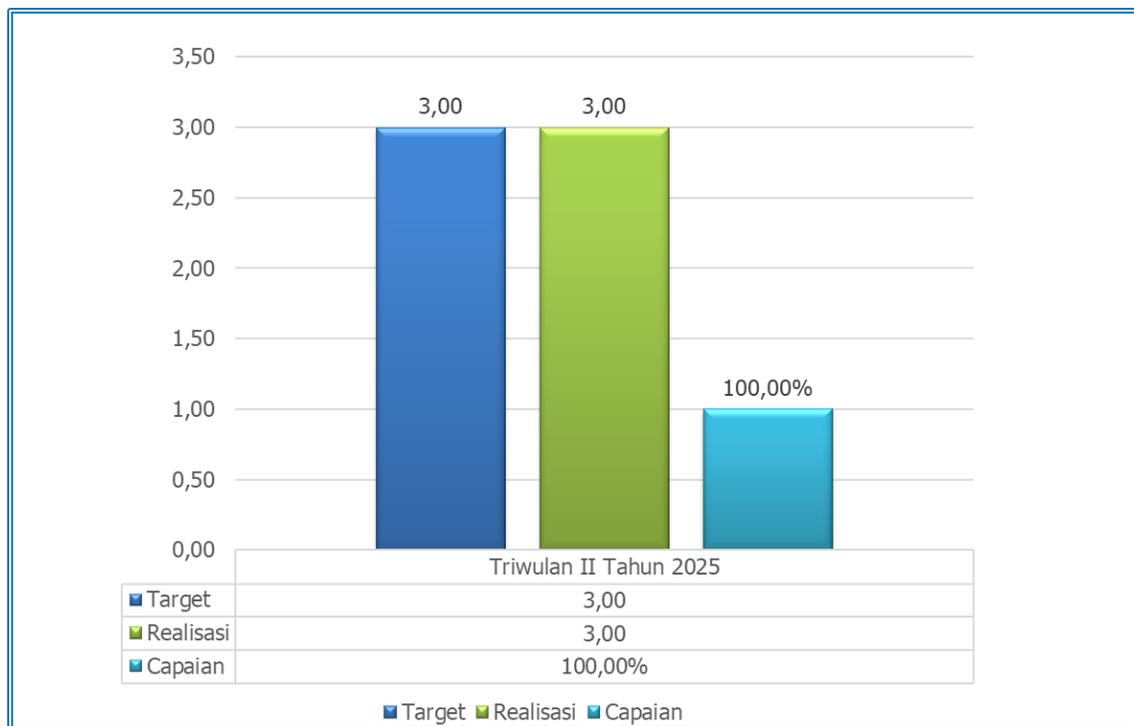
IKK 9.3 Jumlah Fasilitas Penimbangan yang Dibangun dan Dioperasikan untuk Mendukung Keselamatan

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung keselamatan merupakan kegiatan pembangunan dan/atau pengoperasian fasilitas penimbangan yang digunakan untuk melakukan fungsi pencatatan, pengawasan, dan penindakan Angkutan Barang.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Jumlah Fasilitas Penimbangan yang Dibangun dan Dioperasikan untuk Mendukung Keselamatan Tahun 2025 sebanyak 3 Unit jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebanyak 3 Unit maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.17**. Grafik Capaian IKK 9.3 Jumlah Fasilitas Penimbangan yang Dibangun dan Dioperasikan untuk Mendukung Keselamatan.



Gambar II.17. Grafik Capaian IKK 9.3 Jumlah Fasilitas Penimbangan yang Dibangun dan Dioperasikan untuk Mendukung Keselamatan

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Dasar Hukum Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Fasilitas Penimbangan yang Dibangun dan Dioperasikan untuk Mendukung Keselamatan mengacu pada Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

▪ **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Fasilitas Penimbangan yang Dibangun dan Dioperasionalkan untuk Mendukung Keselamatan memiliki target 3 Unit UPPKB yang beroperasi, dimana yang diperoleh dari capaian terhadap PK di tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan pada pembahasan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025.

▪ **Faktor Keberhasilan**

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Jumlah Fasilitas Penimbangan yang Dibangun dan Dioperasionalkan untuk Mendukung Keselamatan antara lain:

1. Terlaksanakan kegiatan pengawasan terkait pelanggaran dimensi dan muatan (*Over Dimension and Over Loading*) di UPPKB;
2. Terlaksanakan kegiatan penegakan hukum pada angkutan barang yang melakukan pelanggaran dimensi dan muatan (*Over Dimension and Over Loading*) di UPPKB;
3. Terlaksanakan kegiatan sosialisasi dimensi dan muatan angkutan ODOL (*Over Dimension and Over Loading*) kepada operator angkutan barang untuk mengurangi ODOL di jalan;
4. Terlaksananya koordinasi dan sinergi yang kuat dalam implementasi Program Zero ODOL; dan
5. SDM yang kompeten dalam melakukan penindakan pelanggaran angkutan barang yang disebabkan oleh ODOL.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Jumlah Fasilitas Penimbangan yang Dibangun dan Dioperasionalkan untuk Mendukung Keselamatan antara lain:

1. Rendahnya tingkat kepatuhan pengemudi angkutan barang untuk masuk ke dalam UPPKB;
2. Tidak adanya pendampingan atau kolaborasi dengan Pihak Kepolisian sehingga kendaraan angkutan barang tidak masuk ke dalam UPPKB dan menyebabkan menurunnya data produksi angkutan barang;
3. Peralatan pendukung di UPPKB tidak support system sehingga data angkutan barang tidak otomatis terkirim ke pusat, hasil timbangan tidak terbaca langsung di aplikasi JTO dan LHR tidak terdata;
4. Kurangnya sinergi antar instansi dalam melaksanakan penegakan hukum terkait ODOL (*over dimension and over loading*);

5. SDM kurang kompeten di bidang penindakan pelanggaran kendaraan angkutan barang yang disebabkan oleh ODOL.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Fasilitas Penimbangan yang Dibangun dan Dioperasionalkan untuk Mendukung Keselamatan Tahun 2025 yaitu sebesar 3 Unit meliputi:

1. Pengoperasian Fasilitas Penimbangan (UPPKB Merapi);
2. Pengoperasian Fasilitas Penimbangan (UPPKB Talang Kelapa); dan
3. Pengoperasian Fasilitas Penimbangan (UPPKB Kertapati).

▪ **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Fasilitas Penimbangan yang Dibangun dan Dioperasionalkan untuk Mendukung Keselamatan Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 100%.

IKK 9.3 Jumlah Fasilitas Penimbangan yang Dibangun dan Dioperasionalkan untuk Mendukung Keselamatan

$$= \frac{\text{Realisasi Jumlah Pengoperasian UPPKB}}{\text{Target Jumlah Pengoperasian UPPKB}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{3 \text{ Unit}}{3 \text{ Unit}} \times 100\% = 100\%$$

▪ **Realisasi Anggaran**

Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Fasilitas Penimbangan yang Dibangun dan Dioperasionalkan untuk Mendukung Keselamatan Tahun 2025 sebesar Rp. 3.241.457.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 789.030.086,- atau mencapai 24,34%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Fasilitas Penimbangan yang Dibangun dan Dioperasionalkan untuk Mendukung Keselamatan yaitu:

1. Petugas tetap berupaya mengarahkan kendaraan angkutan barang untuk masuk ke dalam UPPKB;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran ketentuan dimensi dan muatan (*Over Dimension and Over Loading*) angkutan barang;
3. Melaksanakan inspeksi keselamatan LLAJ atau *rampcheck* angkutan;
4. Melaksanakan penegakan hukum angkutan dengan bekerja sama dengan *stakeholder* terkait;

5. Melaksanakan sosialisasi ODOL (*over dimension and over loading*) kepada operator dan *driver* angkutan barang; dan
6. Mengalokasikan kebutuhan anggaran pengawasan dan penegakan hukum angkutan barang yang disebabkan kendaraan ODOL.

Sasaran Kegiatan 10: Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety

Pencapaian Sasaran Kegiatan 10 diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

IKK 10.1 : Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan Pedoman;

IKK 10.2 : Jumlah Kegiatan Terkait Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah.

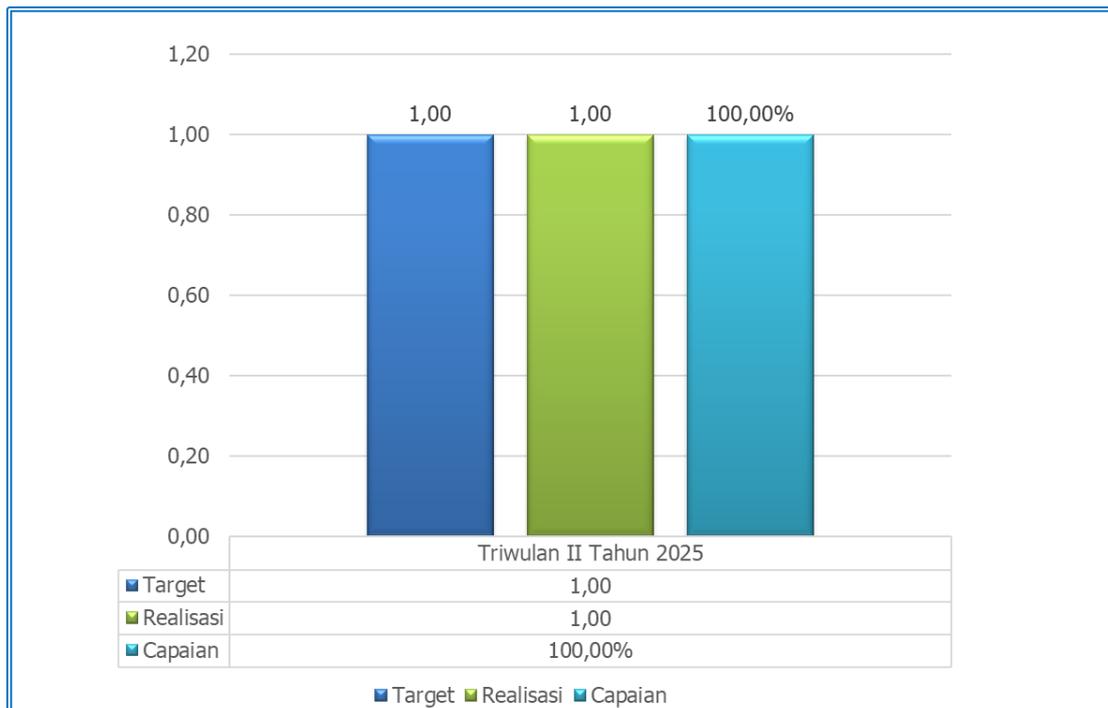
IKK 10.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan Pedoman

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman merupakan kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan bermotor dan perawatan dan pengkalibrasian alat uji. Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan merupakan bagian dari proses Sertifikasi Uji Tipe (SUT) dan Registrasi Uji Tipe (RUT), adapun ruang lingkup pemeriksaan meliputi Dimensi kendaraan (panjang, lebar, tinggi, overhang); Sistem rem, kemudi, pencahayaan, dan perlengkapan utama; Identifikasi nomor rangka dan mesin; dan Kesesuaian antara gambar rancang bangun dan bentuk fisik aktual kendaraan. Adapun Manfaat dari Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Menjamin bahwa kendaraan laik jalan dan sesuai standar keselamatan, Mencegah modifikasi ilegal dan meningkatkan kualitas karoseri nasional, dan Mendukung keselamatan transportasi serta perlindungan konsumen.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman Tahun 2025 sebesar 1 Kegiatan jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 1 Kegiatan, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.18**. Grafik Capaian IKK 10.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman.



Gambar II.18. Grafik Capaian IKK 10.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman

a.3. **Analisa Keberhasilan dan Kegagalan**

▪ **Dasar Hukum**

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018: tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2015: tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2020: tentang Tata Cara Pengujian Tipe Fisik Kendaraan Bermotor.

▪ **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman memiliki target 1 Kegiatan yang diperoleh dari capaian kondisi eksisting dan dengan berdasarkan arahan pimpinan pada pembahasan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025.

▪ **Faktor Keberhasilan**

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman antara lain:

1. Dokumen permohonan pemeriksaan fisik rancang bangun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Terlaksana dengan baik pengawasan di lapangan terkait unit karoseri;
3. Koordinasi yang baik antar instansi dan stakeholder dalam pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan; dan
4. Alokasi anggaran yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman antara lain:

1. Dokumen permohonan tidak sesuai dengan situs pelayanan sistem SRUT *online*;
2. Ketidaksihinggaan dokumen permohonan dengan unit eksisting di lapangan;
3. Terhambatnya peninjauan pada unit karoseri di lapangan; dan
4. Terjadi kecelakaan kerja pada saat peninjauan lapangan.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu terealisasi 1 Kegiatan.

▪ **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 100%.

$$IKK\ 10.1\ Jumlah\ Kegiatan\ Pemeriksaan\ Fisik\ Rancang\ Bangun\ Kendaraan\ sesuai\ dengan\ pedoman = \frac{Realisasi\ Jumlah\ Kegiatan\ Pemeriksaan\ Fisik\ Rancang\ Bangun\ KB}{Target\ Jumlah\ Kegiatan\ Pemeriksaan\ Fisik\ Rancang\ Bangun\ KB} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{1 \text{ Kegiatan}}{1 \text{ Kegiatan}} \times 100\% = 100\%$$

▪ **Realisasi Anggaran**

Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman Tahun 2025 sebesar Rp. 806.670.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 0 atau mencapai 0%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman antara lain:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun secara berkala;
2. Melakukan perbaikan dan pengajuan ulang dokumen permohonan SRUT online;
3. Melakukan sosialisasi peraturan kepada perusahaan karoseri terkait persyaratan spesifikasi fisik rancang bangun sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
4. Pengadaan peralatan dan perlengkapan pendukung kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun berupa kendaraan operasional, Alat Pelindung Diri (APD) dan peralatan lainnya.

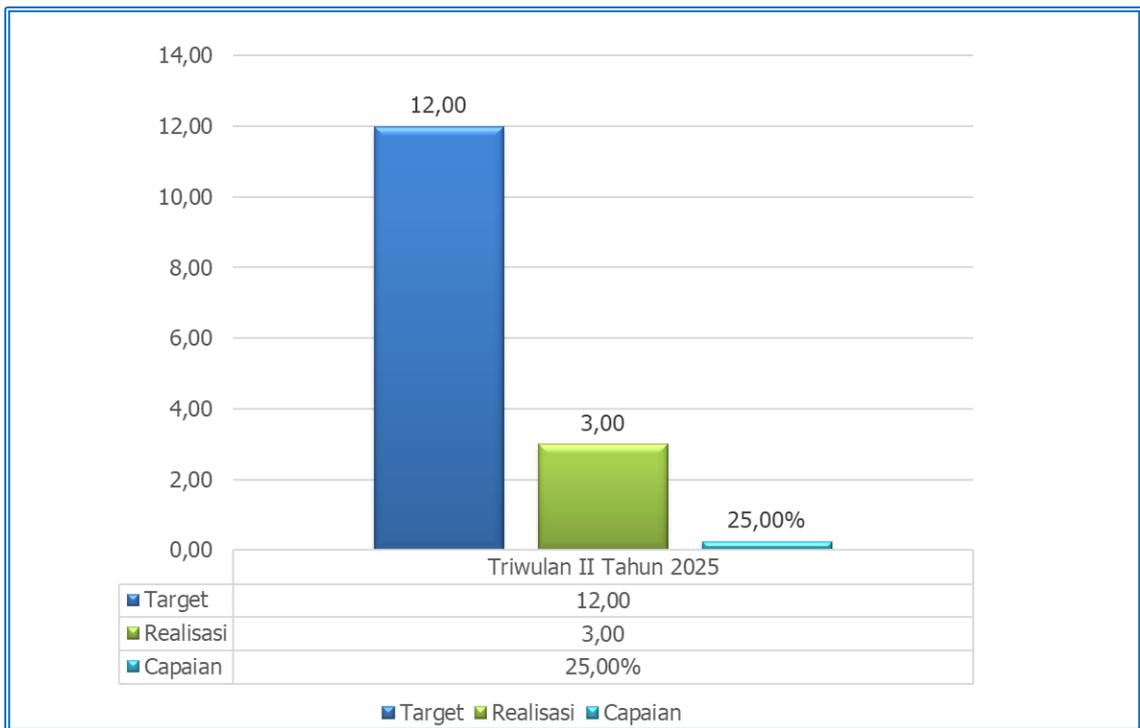
IKK 10.2 Jumlah Kegiatan Terkait Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Jumlah kegiatan terkait kalibrasi alat uji berkala UPUBKB di daerah merupakan Kegiatan kalibrasi alat uji berkala di Provinsi Sumatera Selatan (Kota Palembang, Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Ilir, Kab. Lahat, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Muara Enim, Kab. Musi Rawas, dan Kab. Ogan Komering Ilir), Pemeliharaan Alat Kalibrasi dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor, dan Perawatan dan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor Non Statis. Kalibrasi alat uji berkala di daerah sangat krusial untuk menjamin akurasi hasil uji kendaraan dan keselamatan transportasi. Meski menghadapi berbagai kendala, upaya kolaboratif antara pusat dan daerah perlu diperkuat melalui pelatihan SDM, peremajaan alat, kerja sama lembaga kalibrasi, serta dukungan anggaran yang memadai.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Terkait Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah Tahun 2025 sebesar 3 Kegiatan jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 12 Kegiatan, maka capaian kinerja mencapai 25%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.19**. Grafik Capaian IKK Jumlah Kegiatan Terkait Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah.



Gambar II.19. Grafik Capaian IKK 10.2 Jumlah Kegiatan Terkait Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Terkait Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; dan
3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Terkait Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah memiliki target 12 Kegiatan meliputi:

1. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala UPUBKB di Kota Palembang;
2. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala UPUBKB di Kabupaten Banyuasin;
3. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala UPUBKB di Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala UPUBKB di Kabupaten Ogan Ilir;
5. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala UPUBKB di Kabupaten Lahat;
6. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala UPUBKB di Kabupaten Ogan Komering Ulu;
7. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala UPUBKB di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
8. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala UPUBKB di Kabupaten Muara Enim;

9. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala UPUBKB di Kabupaten Musi Rawas;
10. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala UPUBKB di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
11. Pemeliharaan Alat Kalibrasi dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor; dan
12. Perawatan dan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor Non Statis.

▪ **Faktor Keberhasilan**

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Terkait Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah antara lain:

1. Permintaan dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Kelengkapan alat uji yang akan dilakukan kalibrasi; dan
3. Peralatan yang akan diuji sudah memiliki standar teknis.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Terkait Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah antara lain:

1. Tidak memiliki gedung pengujian kendaraan bermotor/Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermoto (UPUBKB);
2. Tidak lengkapnya alat yang akan diuji; dan
3. Ketidakmampuan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk memenuhi fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Terkait Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 3 Kegiatan, meliputi:

1. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala UPUBKB di Kota Pagar Alam;
2. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala UPUBKB di Kabupaten Ogan Komering Ilir; dan
3. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala UPUBKB di Kabupaten Musi Banyuasin;

▪ **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Terkait Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah Tahun 2025 sebesar 3 Kegiatan jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 12 Kegiatan, maka capaian kinerja mencapai 25%.

$$\text{IKK 10.2 Jumlah Kegiatan Terkait Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah} \\ = \frac{\text{Realisasi Jumlah Kegiatan Terkait Kalibrasi Alat Uji}}{\text{Target Jumlah Kegiatan Terkait Kalibrasi Alat Uji}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{3 \text{ Kegiatan}}{12 \text{ Kegiatan}} \times 100\% = 25\%$$

▪ **Realisasi Anggaran**

Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Terkait Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah Tahun 2025 sebesar Rp. 1.136.670.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp.0 atau mencapai 0%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Terkait Kalibrasi Alat Uji Berkala di Daerah yaitu:

1. Merekomendasikan pembelian alat uji kendaraan bermotor yang sesuai dengan spesifikasi alat kalibrasi yang dimiliki BPTD;
2. Menjadwal ulang pelaksanaan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor;
3. Mencari vendor baru yang lebih baik dalam pengerjaan kalibrasi alat uji;
4. Menghimbau Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota agar tetap menganggarkan biaya operasional, pemeliharaan serta akreditasi dan kalibrasi untuk menunjang pelaksanaan pelayanan pada UPUBKB; dan
5. Melaksanakan monitoring ke Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota yang belum memiliki akreditasi dan belum melaksanakan kalibrasi alat uji secara berkala.

Sasaran Kegiatan 11: Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 11 diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

IKK 11.1 : Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasikan sesuai dengan Spesifikasi Teknis; dan

IKK 11.2 : Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan sesuai Pedoman.

IKK 11.1 Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasikan sesuai dengan Spesifikasi Teknis

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Jumlah perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis merupakan kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan meliputi:

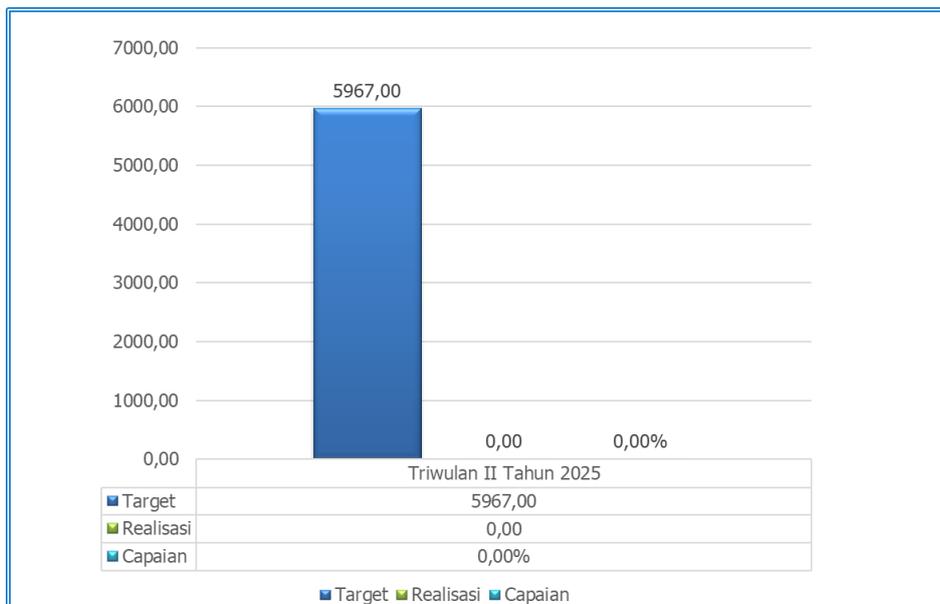
1. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Pada Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Pengadaan dan Pemasangan Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan pada ruas jalan Provinsi Kabupaten Poros Desa di Provinsi Sumatera Selatan; dan
3. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

1. Rambu Lalu Lintas;
2. Marka Jalan;
3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
4. Alat Penerangan Jalan;
5. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan;
6. Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan;
7. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat (*ZOSS*); dan
8. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis Tahun 2025 sebesar 0 Unit jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 5.967 Unit, maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.20**. Grafik Capaian IKK 11.1 Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasikan sesuai dengan Spesifikasi Teknis.



Gambar II.20. Grafik Capaian IKK 11.1 Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasikan sesuai dengan Spesifikasi Teknis

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasionalkan sesuai dengan Spesifikasi Teknis yaitu:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan;
3. Rambu Lalu Lintas (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014);
4. Marka Jalan (Marka Putih/Marka Kuning/Paku Jalan (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2018);
5. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (*Warning Light / APILL*) (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014);
6. Alat Penerangan Jalan (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023);
7. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (*Delineator/Guard Rail*) (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2023);
8. Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (*ATCS*) (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018);
9. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat (*ZOSS*) (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2020); dan
10. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di Luar Badan Jalan.

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasionalkan sesuai dengan Spesifikasi Teknis memiliki target sebanyak 5.967 Unit perlengkapan jalan yang diperoleh dari kebutuhan Survey Investigasi Desain (SID) dan dengan berdasarkan arahan pimpinan pada pembahasan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025.

▪ Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Jumlah perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan spesifikasi teknis antara lain:

1. Terpenuhinya item fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang sesuai dengan kebutuhan yang berdasarkan Survey Investigasi Desain (SID) dan spesifikasi teknis perlengkapan jalan;
2. Pekerjaan pemasangan perlengkapan jalan terlaksana tepat waktu; dan
3. Alokasi anggaran perlengkapan jalan sesuai dengan kebutuhan perlengkapan jalan yang berdasarkan Survey Investigasi Desain (SID).

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Jumlah perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis antara lain:

1. Pekerjaan tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
2. Alokasi anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan perlengkapan jalan;
3. Terdapat tumpang tindih titik pemasangan perlengkapan jalan yang ditetapkan oleh BPTD Kelas II Sumatera Selatan dengan BPPJN Sumatera Selatan; dan
4. Blokir anggaran dikarenakan efisiensi anggaran, *refocusing* anggaran dan/atau *automatic adjustment*.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Jumlah perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis Tahun 2025 yaitu sebesar 0 Unit

▪ **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Dibangun dan Dioperasikan sesuai dengan Spesifikasi Teknis Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 0% (belum terealisasi dikarenakan efiseiensi anggaran yang masih diblokir).

$$\text{IKK 11.1 Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun dan Dioperasikan sesuai dengan Spesifikasi Teknis} = \frac{\text{Realisasi Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun sesuai Spesifikasi Teknis}}{\text{Target Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dibangun sesuai Spesifikasi Teknis}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{0 \text{ Unit}}{5.967 \text{ Unit}} \times 100\% = 0\%$$

▪ **Realisasi Anggaran**

Anggaran Indikator Kinerja Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Dibangun dan Dioperasikan sesuai dengan Spesifikasi Teknis sebesar Rp. 18.491.975.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp.0 atau mencapai 0%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Dibangun dan Dioperasikan sesuai dengan Spesifikasi Teknis yaitu:

1. Melaksanakan monitoring / pengawasan kegiatan pemasangan perlengkapan jalan di lokasi-lokasi yang telah ditentukan;
2. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian lokasi pemasangan dengan kebutuhan perlengkapan jalan di lapangan;

3. Melakukan rapat koordinasi dengan BBPJN Sumatera Selatan terkait lokasi titik pemasangan perlengkapan jalan agar tidak tumpang tindih;
4. Melakukan perencanaan yang komprehensif terkait waktu pemasangan perlengkapan jalan dan alokasi kebutuhan perlengkapan jalan yang berdasarkan Survey Investigasi Desain (SID) dan alokasi anggaran agar sesuai dengan target penyelesaian pekerjaan; dan
5. Merencanakan optimalisasi waktu dan anggaran agar tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

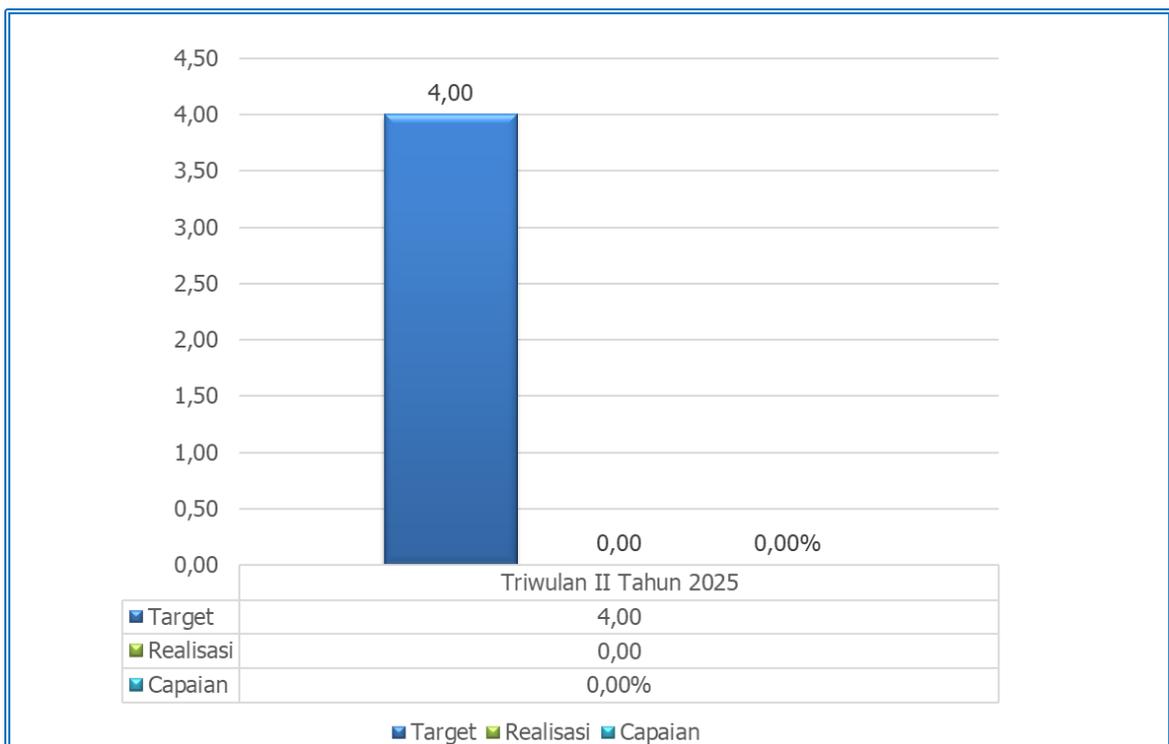
IKK 11.2 Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai Pedoman

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan sesuai Pedoman merupakan kegiatan pemasangan perlengkapan jalan di Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) pada ruas jalan di Provinsi Sumatera Selatan.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan sesuai Pedoman Tahun 2025 sebesar 0 Lokasi jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 4 Lokasi, maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.21**.



Gambar II.21. Grafik Capaian IKK 11.2 Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan sesuai Pedoman

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan sesuai Pedoman antara lain:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan;
3. Rambu Lalu Lintas (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014);
4. Marka Jalan (Marka Putih/Marka Kuning/Paku Jalan (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2018);
5. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (*Warning Light / APILL*) (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014);
6. Alat Penerangan Jalan (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023);
7. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (*Delineator/Guard Rail*) (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2023);
8. Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (*ATCS*) (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018);

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan sesuai Pedoman memiliki target 4 Lokasi yang diperoleh dari PK sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan pada pembahasan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025.

▪ Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman antara lain:

1. Terlaksananya intervensi penanganan di Lokasi LRK berupa pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang sesuai dengan spesifikasi teknis perlengkapan jalan;
2. Terjalannya koordinasi intensif antara BPTD Kelas II Sumatera dengan BPJN Sumatera Selatan; dan
3. Alokasi anggaran perlengkapan jalan sesuai dengan kebutuhan perlengkapan jalan yang dipasang di Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK).

▪ Faktor Kegagalan

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman antara lain:

1. Alokasi anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan perlengkapan jalan; dan
2. Blokir anggaran dikarenakan efisiensi anggaran, *refocusing* anggaran dan/atau *automatic adjustment*.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan Intervensi Penanganan sesuai Pedoman Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 0 Lokasi.

▪ **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 0%.

$$\text{IKK 11.2 Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman} \\ = \frac{\text{Realisasi Jumlah LRK yang Dipasang Perlengkapan Jalan}}{\text{Target umlah LRK yang Dipasang Perlengkapan Jalan}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{0 \text{ Lokasi}}{4 \text{ Lokasi}} \times 100\% = 0\%$$

▪ **Realisasi Anggaran**

Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan sesuai Pedoman Tahun 2025 sebesar Rp. 1.694.025.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 0 atau mencapai 0%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan sesuai Pedoman antara lain:

1. Melakukan perencanaan yang komprehensif terkait kebutuhan perlengkapan jalan yang dipasang di Lokasi Rawan Kecelakaan;
2. Melaksanakan monitoring/pengawasan kegiatan pemasangan perlengkapan jalan di Lokasi Rawan Kecelakaan; dan
3. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian lokasi pemasangan dengan kebutuhan perlengkapan jalan di lapangan.

Sasaran Kegiatan 12: Meningkatnya Kesadaran dan Attitude Pengguna Jalan Berkeselamatan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 12 diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

IKK 12.1 : Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai Pedoman Pada Lokasi yang Berbeda; dan

IKK 12.2 : Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda.

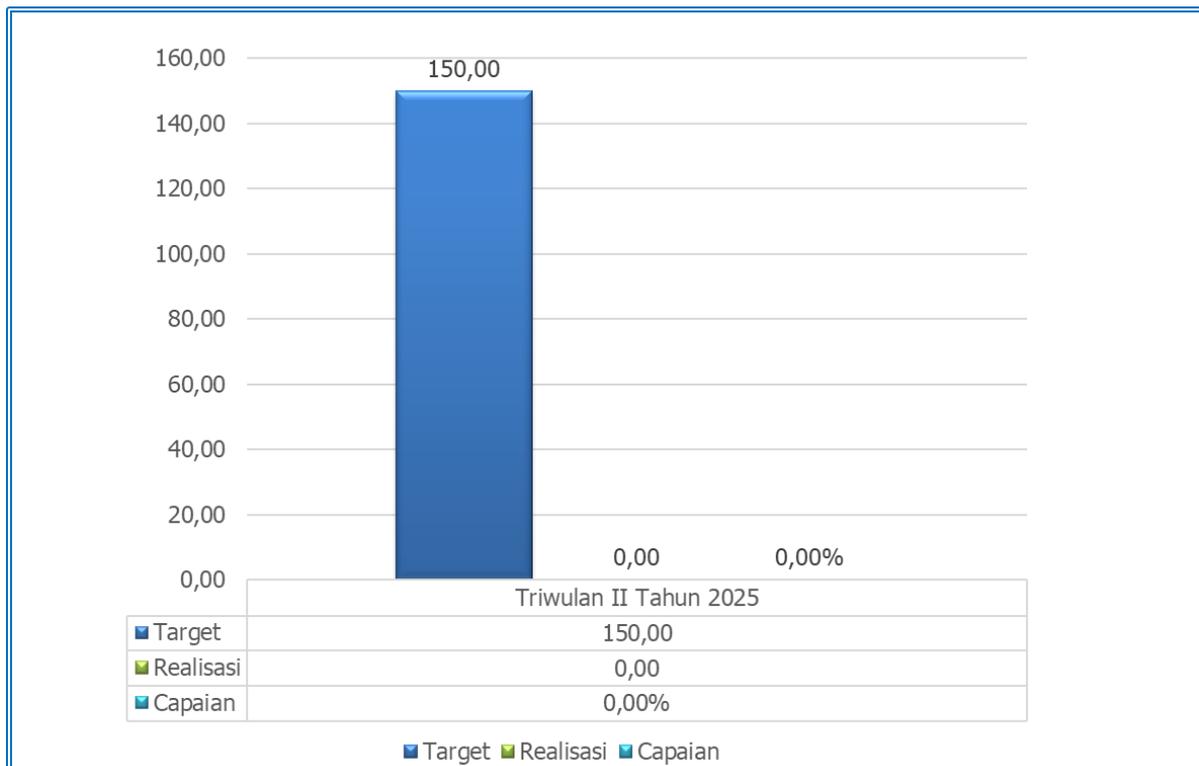
IKK 12.1 Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai Pedoman Pada Lokasi yang Berbeda

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda merupakan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Jalan kepada masyarakat pada lokasi yang berbeda di Provinsi Sumatera Selatan. Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat). Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan pada kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKJ) pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda Tahun 2025 sebesar 0 Orang jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 150 Orang, maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.22** Grafik Capaian IKK 12.1 Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai Pedoman Pada Lokasi yang Berbeda.



Gambar II.22. Grafik Capaian IKK 12.1 Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda yaitu pada Pasal 208 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terkait Budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan Ayat 2 Butir b terkait Sosialisasi dan Internalisasi Tata Cara dan Etika Ber Lalu Lintas serta Program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda memiliki target 150 Orang yang diperoleh dari target usulan Renstra BPTD Kelas II Sumatera Selatan 2025-2029 dan dengan berdasarkan arahan pimpinan pada pembahasan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025.

▪ Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda antara lain:

1. Menurunnya angka terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan;
2. Terwujudnya Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setiap tahun; dan
3. Petugas di Satuan Pelayanan Terminal Tipe A, Pelabuhan SDP dan UPPKB, operator angkutan serta pengguna jasa angkutan memahami terkait informasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda antara lain:

1. Keterbatasan anggaran dan sumber daya meliputi keterbatasan anggaran pelaksanaan kegiatan kampanye keselamatan, seperti pemasangan spanduk, iklan layanan masyarakat, serta penyelenggaraan *event* edukatif; dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas atau kurang terlatih dalam aspek keselamatan jalan;
2. Kurangnya sinkronisasi program antara instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta *stakeholder* seperti LSM, swasta, sekolah, dan komunitas masyarakat belum optimal;
3. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan jalan masih rendah, dimana dengan kurangnya keterlibatan aktif pelajar, pengendara, dan komunitas dalam kegiatan edukatif atau sosialisasi;
4. Kondisi jalan di beberapa wilayah masih rusak atau tidak memiliki fasilitas keselamatan jalan seperti rambu, *zebra cross*, trotoar, lampu lalu lintas, serta tidak semua daerah memiliki lokasi strategis untuk menyelenggarakan kegiatan kampanye keselamatan;
5. Kebiasaan buruk berkendara, seperti tidak memakai helm, melawan arus, dan membawa penumpang berlebih masih dianggap hal biasa.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 yaitu sebesar 0 Orang.

▪ **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 0%.

IKK 12.1 Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda

$$= \frac{\text{Realisasi Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Keselamatan Jalan}}{\text{Target Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Keselamatan Jalan}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{0 \text{ Orang}}{150 \text{ Orang}} \times 100\% = 0\%$$

▪ **Realisasi Anggaran**

Anggaran Indikator Kinerja Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda Tahun 2025 sebesar Rp. 250.000.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 0 atau mencapai 0%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda yaitu:

1. Melakukan sosialisasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan secara berkala yaitu ke operator angkutan, pengguna jasa angkutan umum serta anak usia dini; dan
2. Mengalokasikan kebutuhan anggaran sosialisasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan secara berkala minimal setiap tahun.
3. Menyusun rencana aksi bersama yang terintegrasi antara instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya;
4. Mencari dukungan sponsorship dari Pihak Swasta berupa CSR, seperti perusahaan transportasi, asuransi, dan otomotif;
5. Menyelenggarakan lomba, kampanye kreatif, dan *event* sosial seperti jalan sehat atau konvoi keselamatan untuk menarik minat publik;
6. Membentuk Duta Keselamatan Jalan dari kalangan pelajar atau publik figur lokal; dan
7. Menyusun indikator keberhasilan kegiatan (jumlah peserta, wilayah cakupan, perubahan perilaku, dll), serta melakukan evaluasi pasca pelaksanaan kegiatan sebagai dasar perbaikan dan evaluasi untuk tahun berikutnya.

IKK 12.2 Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini oleh Anak, Guru, atau Pendamping Sesuai Pedoman Pada Lokasi Yang Berbeda

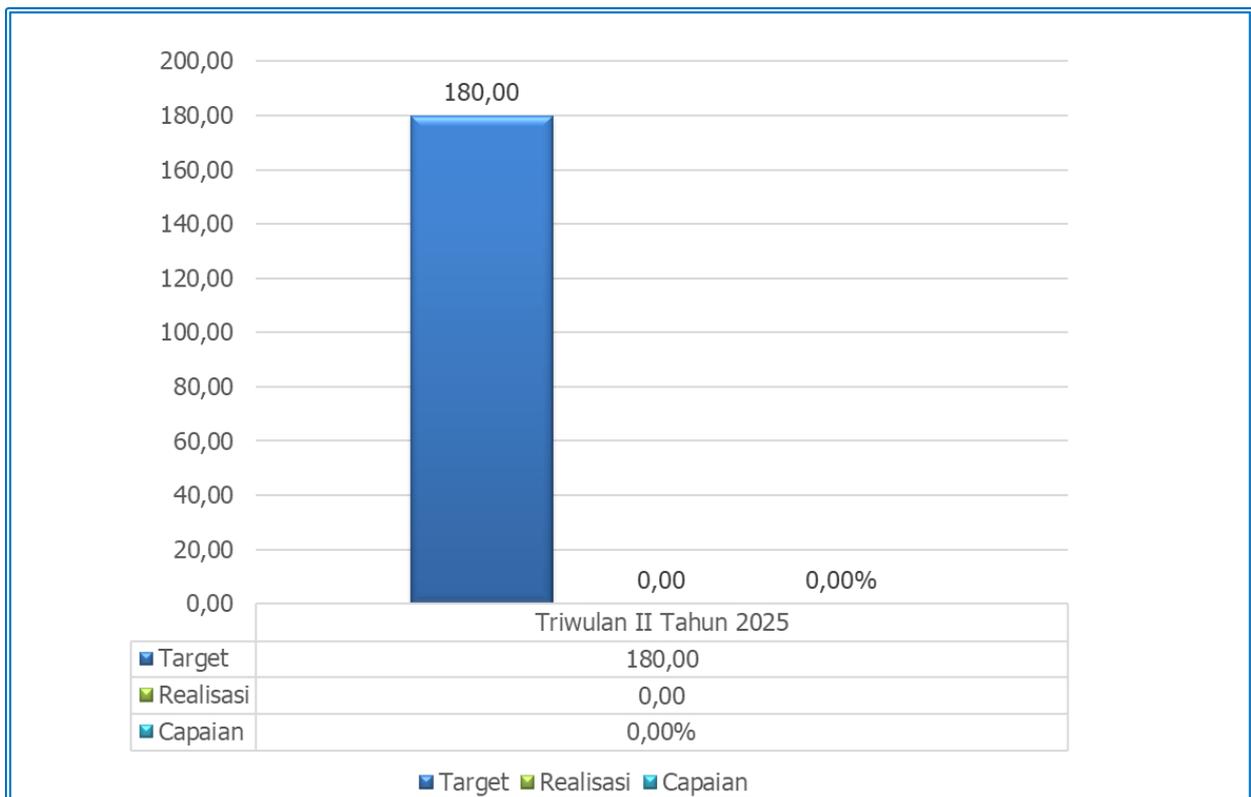
a.1. Definisi Indikator Kinerja

Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini oleh Anak, Guru, atau Pendamping sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda merupakan Pelaksanaan kegiatan pengajaran Keselamatan LLAJ yang meliputi Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD). Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini oleh Anak, Guru, atau Pendamping sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda bertujuan untuk menanamkan perilaku dasar keselamatan lalu lintas

sejak dini, seperti menyeberang dengan aman, mengenali rambu sederhana, dan pentingnya penggunaan sabuk keselamatan dan Membentuk generasi sadar keselamatan yang akan tumbuh menjadi pengguna jalan yang bertanggung jawab.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini oleh Anak, Guru, atau Pendamping sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda Tahun 2025 sebesar 0 Orang jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 180 Orang, maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.23** Grafik Capaian IKK 12.2 Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini oleh Anak, Guru, atau Pendamping sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda.



Gambar II.23. Grafik Capaian IKK 12.2 Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini oleh Anak, Guru, atau Pendamping sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ **Dasar Hukum**

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini oleh Anak, Guru, atau Pendamping sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda yaitu pada Pasal 208 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terkait Budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan Ayat

2 Butir b terkait Sosialisasi dan Internalisasi Tata Cara dan Etika Berlalu Lintas serta Program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

▪ **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini oleh Anak, Guru, atau Pendamping sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda memiliki target 180 orang yang diperoleh dari target usulan Renstra BPTD Kelas II Sumatera Selatan 2025-2029 dan dengan berdasarkan arahan pimpinan pada pembahasan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025.

▪ **Faktor Keberhasilan**

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini oleh Anak, Guru, atau Pendamping sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda antara lain:

1. Meningkatnya pemahaman terkait keselamatan LLAJ pada Anak Usia Dini, Guru, atau Pendamping;
2. Terwujudnya Pengajaran Keselamatan LLAJ pada Anak Usia Dini, Guru, atau Pendamping di sekolah sebagai bagian dari kurikulum sekolah; dan
3. Tenaga pelaksana kegiatan pengajaran keselamatan LLAJ memiliki kemampuan pedagogi anak usia dini yang baik;
4. Peralatan dan perlengkapan pengajaran keselamatan LLAJ dilengkapi dengan fitur-fitur yang dirancang menarik dan mudah dipahami oleh anak-anak; dan
5. Berkurangnya angka kecelakaan lalu lintas di jalan.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini oleh Anak, Guru, atau Pendamping sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda antara lain:

1. Anak usia dini (TK/SD awal) memiliki kemampuan kognitif terbatas, sehingga sulit memahami konsep abstrak seperti "keselamatan berlalu lintas". Untuk itu, kegiatan sosialisasi harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan media visual/interaktif agar mudah dipahami;
2. Tidak semua tenaga pelaksana (seperti petugas Dishub dan Guru) memiliki kemampuan pedagogi anak usia dini. Untuk itu, diperlukan pelatihan khusus agar penyuluh mampu menyampaikan materi dengan cara yang menarik dan sesuai usia;
3. Minimnya media pembelajaran seperti buku cerita, video animasi, poster bergambar, dan alat peraga tentang lalu lintas yang ramah anak.

4. Belum tersedia ruang edukasi lalu lintas anak seperti simulasi zebra cross, rambu mini, dll di sebagian besar sekolah;
5. Materi keselamatan lalu lintas belum masuk secara sistematis dalam kurikulum PAUD/TK/SD. Untuk itu, sosialisasi sering bersifat sekali datang, bukan program pembelajaran berkelanjutan;
6. Banyak guru dan orang tua belum menyadari pentingnya pendidikan keselamatan lalu lintas sejak dini, sehingga kurangnya dukungan dari lingkungan keluarga dapat menghambat internalisasi nilai-nilai keselamatan;
7. Sosialisasi ini tidak selalu menjadi prioritas dalam anggaran sekolah atau Pemerintah Daerah, sehingga jadwal sekolah yang padat menyulitkan penyisipan kegiatan di luar pelajaran utama; dan
8. Di daerah pedesaan atau terpencil, anak-anak mungkin tidak terlalu akrab dengan lalu lintas padat, sehingga mereka sulit memahami konteks lalu lintas kota. Sebaliknya, di kota besar, anak-anak lebih terpapar risiko lalu lintas, tapi kurang didampingi dengan edukasi formal.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini oleh Anak, Guru, atau Pendamping sesuai Pedoman Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 0 Orang.

▪ **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini oleh Anak, Guru, atau Pendamping sesuai Pedoman pada Lokas yang Berbeda Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 0%.

IKK 12.2 Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini oleh Anak, Guru atau Pendamping sesuai Pedoman pada Lokasi yang Berbeda

$$= \frac{\text{Realisasi Jumlah Siswa / Guru / Pendamping Kegiatan Sosialisasi SALUD}}{\text{Target Jumlah Jumlah Siswa / Guru / Pendamping Kegiatan Sosialisasi SALUD}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{0 \text{ Orang}}{180 \text{ Orang}} \times 100\% = 0\%$$

▪ **Realisasi Anggaran**

Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini oleh Anak, Guru, atau Pendamping sesuai Pedoman pada Lokas yang Berbeda Tahun 2025 sebesar Rp. 107.143.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 0 atau mencapai 0%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pengajaran Keselamatan LLAJ Anak Usia Dini oleh Anak, Guru, atau Pendamping sesuai Pedoman pada Lokas yang Berbeda yaitu:

1. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk menyisipkan materi keselamatan lalu lintas dalam pelajaran tematik atau kegiatan ekstrakurikuler. Menyusun modul edukasi sederhana (gambar, cerita, permainan) sesuai dengan tingkat perkembangan anak;
2. Mengembangkan media edukasi seperti animasi, lagu, boneka, buku cerita, dan permainan simulasi lalu lintas. Membangun taman lalu lintas mini di halaman sekolah atau area publik sebagai tempat belajar praktik berlalu lintas;
3. Mengadakan sosialisasi untuk orang tua/guru tentang pentingnya memberi contoh perilaku tertib berlalu lintas. Menyebarluaskan kampanye melalui media sosial, radio lokal, spanduk, dan brosur edukatif di lingkungan sekolah dan rumah; dan
4. Menyusun indikator keberhasilan kegiatan (misalnya jumlah sekolah yang dilibatkan, perubahan pengetahuan anak, dll). Membuat dokumentasi kegiatan dan laporan evaluasi sebagai dasar pengembangan kegiatan lanjutan.

Sasaran Kegiatan 4: Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur melalui 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

IKK 4.1 : Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat;

IKK 4.2 : Kegiatan Terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat;

IKK 4.3 : Kegiatan Terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan

IKK 4.4 : Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat;

IKK 4.5 : Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit / Pemeriksaan;

IKK 4.6 : Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat;

IKK 4.7 : Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat;

IKK 4.8 : Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor);

IKK 4.9 : Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa; dan

IKK 4.10 : Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja.

IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat

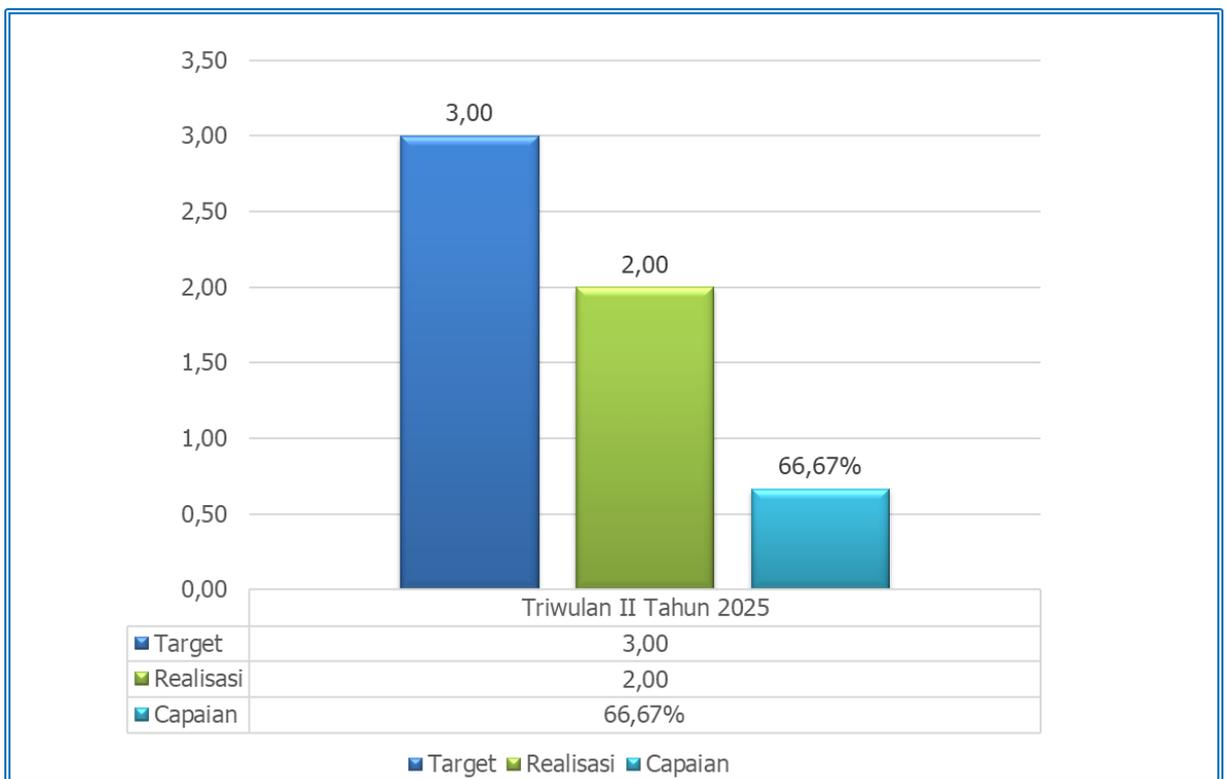
a.1. Definisi Indikator Kinerja

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen

Perhubungan Darat merupakan kegiatan yang terkait dengan penyusunan pagu kebutuhan, pagu indikatif dan pagu alokasi. Waktu pelaksanaan penyusunan pagu kebutuhan, pagu indikatif dan pagu alokasi berbeda-beda. Penyusunan pagu kebutuhan dilaksanakan pada Bulan Januari – Februari, pagu indikatif dilaksanakan pada Bulan Juni – Juli, dan pagu alokasi dilaksanakan pada Bulan September – Oktober.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 terealisasi sebanyak 2 Kegiatan, jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebanyak 3 Kegiatan, maka capaian kinerja mencapai 66,67%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.24.**



Gambar II.24. Grafik Capaian IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ **Dasar Hukum**

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

▪ **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Berdasarkan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat memiliki target sebanyak 3 Kegiatan yaitu:

1. Penyusunan RKAKL Pagu Kebutuhan (Bulan Januari – Februari);
2. Penyusunan RKAKL Pagu Indikatif (Juni – Juli); dan
3. Penyusunan RKAKL Pagu Alokasi (September – Oktober).

▪ **Faktor Keberhasilan**

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Penyusunan RKAKL tepat waktu dan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
2. Koordinasi eksternal yang baik dengan instansi Pemerintah Daerah dalam proses usulan kegiatan dan anggaran;
3. SDM yang menyusun RKAKL memiliki kompetensi dan kinerja kerja yang baik serta integritas yang tinggi;
4. Koordinasi antar Sub Bagian dan/atau Seksi di internal BPTD Kelas II Sumatera Selatan berjalan dengan baik; dan
5. Penyusunan RKAKL dibahas dan disetujui bersama dengan melibatkan Pimpinan.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Penyusunan RKAKL tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
2. Koordinasi eksternal dan internal dalam proses usulan kegiatan dan anggaran tidak baik;
3. SDM penyusun RKAKL tidak kompeten; dan
4. Adanya ketidakpastian pengusulan kegiatan dan anggaran seperti *blokir/automatic adjustment/refocusing*.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 2 Kegiatan yang diperoleh dari terlaksananya Kegiatan Penyusunan RKAKL Pagu Kebutuhan (Bulan Januari – Februari) dan Penyusunan RKAKL Pagu Indikatif (Juni – Juli).

- **Capaian Kinerja**

Keberhasilan Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 66,67%.

$$\begin{aligned}
 & \text{IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat} \\
 & = \frac{\text{Realisasi Jumlah Kegiatan}}{\text{Target Jumlah Kegiatan}} \times 100\% \\
 & \% \text{ Capaian} = \frac{2 \text{ Kegiatan}}{3 \text{ Kegiatan}} \times 100\% = 66,67\%
 \end{aligned}$$

- **Realisasi Anggaran**

Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 sebesar Rp. 2.711.180.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 51.205.000,- atau mencapai 1,89%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat yaitu:

1. Memperkuat koordinasi teknis yang intensif dengan Pemerintah Daerah terkait pengusulan kegiatan dan anggaran agar tepat waktu;
2. Menyusun dan melaksanakan SOP Penyusunan RKAKL serta mensosialisasikan dengan baik ke Pemerintah Daerah; dan
3. Meningkatkan SDM yang kompeten melalui pelatihan/diklat.

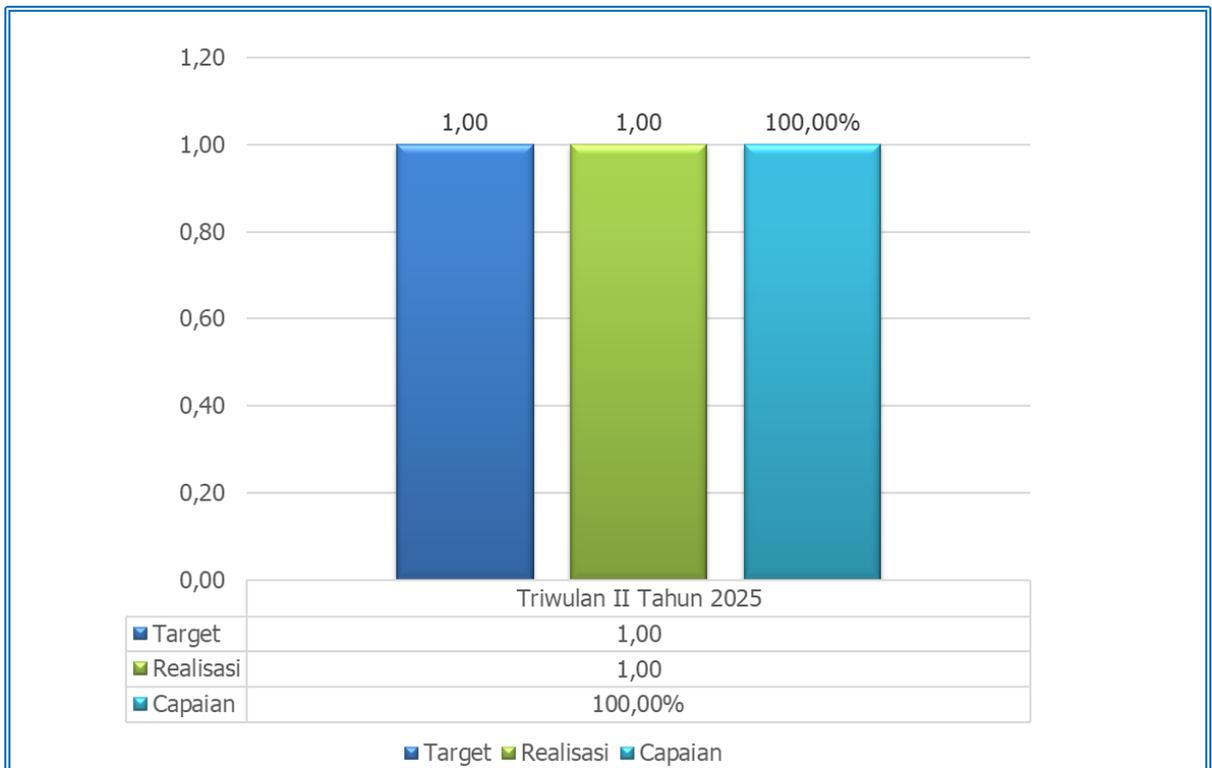
IKK 4.2 Kegiatan Terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat menghasilkan dokumen SAKIP yang meliputi Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja, Monitoring Rencana Aksi, Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 sebesar 1 Dokumen jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar dengan 1 Dokumen, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.25.**



Gambar II.25. Grafik Capaian IKK 4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ **Dasar Hukum**

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

▪ **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat memiliki target sebesar 1 Dokumen SAKIP yang diperoleh dari capaian

tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan arahan pimpinan pada pembahasan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025.

▪ **Faktor Keberhasilan**

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Penyusunan dokumen yang sesuai dengan ketentuan format pelaporan;
2. Ketepatan waktu upload dokumen SAKIP di Aplikasi E-SAKIP Reviu;
3. Koordinasi internal yang baik di masing-masing Sub Bagian/Seksi serta dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam pengumpulan data capaian kinerja untuk penyusunan dokumen SAKIP dan laporan bulanan capaian kinerja kegiatan; dan
4. SDM penyusun dokumen SAKIP berkompeten dan telah mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen SAKIP yang disertai dengan kepemilikan sertifikat kompetensi.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Penyusunan dokumen SAKIP tidak memperhatikan ketentuan format pelaporan sehingga memerlukan waktu yang lama untuk penyelesaian revisi format pelaporan kinerja;
2. Kurangnya koordinasi yang intensif di internal Unit Kerja dalam pengumpulan data kinerja dan penyusunan laporan capaian kinerja;
3. Tidak tepat waktu dalam peng-uploadan dokumen SAKIP di aplikasi E-SAKIP Reviu;
4. SDM penyusun dokumen tidak fokus dalam menyusun dokumen SAKIP dikarenakan terdapatnya pekerjaan lain yang bersamaan; dan
5. SDM penyusun dokumen berganti dan tidak dilakukan kaderisasi sehingga penyusunan dokumen SAKIP agak terhambat.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 1 Dokumen SAKIP yang sudah terealisasi yaitu Perjanjian Kinerja dan Revisinya, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Aksi dan Monitoring Rencana Aksi, Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I.

▪ **Capaian Kinerja**

Keberhasilan Indikator Kinerja Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 100%.

IKK 4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat

$$= \frac{\text{Realisasi Jumlah Dokumen}}{\text{Target Jumlah Dokumen}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1 \text{ Dokumen}}{1 \text{ Dokumen}} \times 100\% = 100\%$$

▪ **Realisasi Anggaran**

Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 sebesar Rp. 2.711.180.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 51.205.000,- atau mencapai 1,89%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat yaitu:

1. Menyusun format pelaporan dokumen SAKIP secara online yang dapat diakses oleh Pejabat di Lingkungan BPTD Kelas II Sumatera Selatan;
2. Meningkatkan pengelolaan arsip yang baik sesuai dengan pola kearsipan untuk mencadangkan *file* atau dokumen SAKIP; dan
3. Menyelesaikan laporan bulanan, triwulanan dan tahunan berdasarkan realisasi hasil kegiatan yang telah dilakukan.

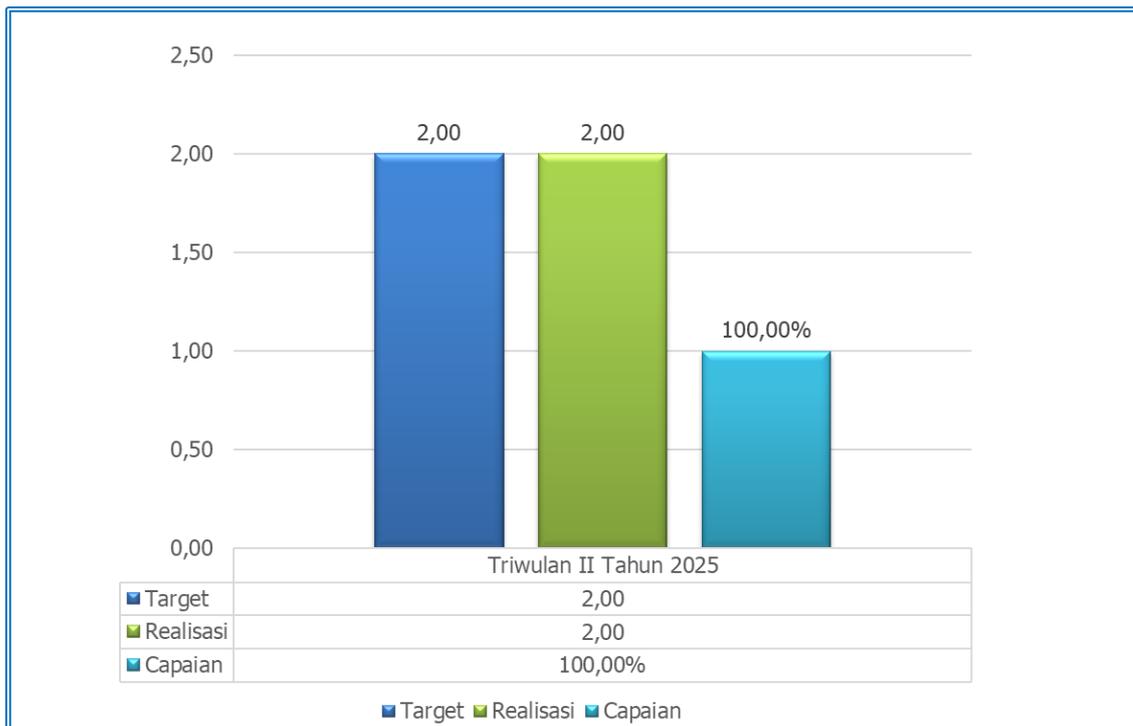
IKK 4.3 Kegiatan Terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kegiatan terkait Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) merupakan kegiatan yang terkait dengan SPIP dan Manajemen Resiko dengan hasil berupa dokumen SPIP dan dokumen manajemen resiko.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 memiliki nilai sebesar 29,60 jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar dengan nilai 90, maka capaian kinerja mencapai 32,89%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.26**.



Gambar II.26. Grafik Capaian IKK 4.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan memiliki target 2 Dokumen yang diperoleh dari capaian tahun-tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan pada pembahasan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025. Dokumen yang dihasilkan meliputi Dokumen SPIP dan Dokumen Manajemen Resiko (MR).

▪ Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan antara lain:

1. Penyusunan dokumen SPIP sesuai dengan ketentuan format pelaporan;
2. Ketepatan waktu penyusunan dokumen SPIP;

3. Koordinasi internal yang baik di masing-masing Sub Bagian/Seksi serta dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam proses penyusunan dan pengumpulan data terkait dokumen SPIP dan dokumen MR;
4. SDM penyusun dokumen SAKIP berkompeten dan telah mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen SAKIP yang disertai dengan kepemilikan sertifikat kompetensi.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan antara lain:

1. Penyusunan dokumen SPIP dan dokumen MR tidak memperhatikan SOP dan ketentuan pelaporan;
2. Kurangnya koordinasi yang intensif di internal dan eksternal Unit Kerja dalam proses penyusunan dokumen SPIP dan dokumen MR;
3. Tidak tepat waktu dalam pengumpulan dokumen SPIP dan dokumen MR; dan
4. SDM penyusun dokumen SPIP dan dokumen MR kurang memahami tata cara penyusunan dokumen.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 yaitu sebesar 2 Dokumen yaitu Dokumen SPIP dan Dokumen MR.

▪ **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 100%.

$$\begin{aligned}
 & \text{IKK 4.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan} \\
 & = \frac{\text{Realisasi Jumlah Dokumen}}{\text{Target Jumlah Dokumen}} \times 100\% \\
 & \% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{2 \text{ Dokumen}}{2 \text{ Dokumen}} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

▪ **Realisasi Anggaran**

Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 sebesar Rp. 2.711.180.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 51.205.000,- atau mencapai 1,89%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan yaitu:

1. Menyusun format dokumen SPIP dan dokumen MR secara *online* yang dapat diakses oleh Pejabat di Lingkungan BPTD Kelas II Sumatera Selatan;
2. Meningkatkan pengelolaan arsip yang baik sesuai dengan pola kearsipan untuk mencadangkan *file* atau dokumen SPIP dan dokumen MR;
3. Memperkuat koordinasi internal di masing-masing Sub Bagian/Seksi di BPTD Kelas II Sumatera Selatan dan koordinasi eksternal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan
4. Menyelesaikan laporan bulanan, triwulanan dan tahunan berdasarkan realisasi hasil kegiatan yang telah dilakukan.

IKK 4.4 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat

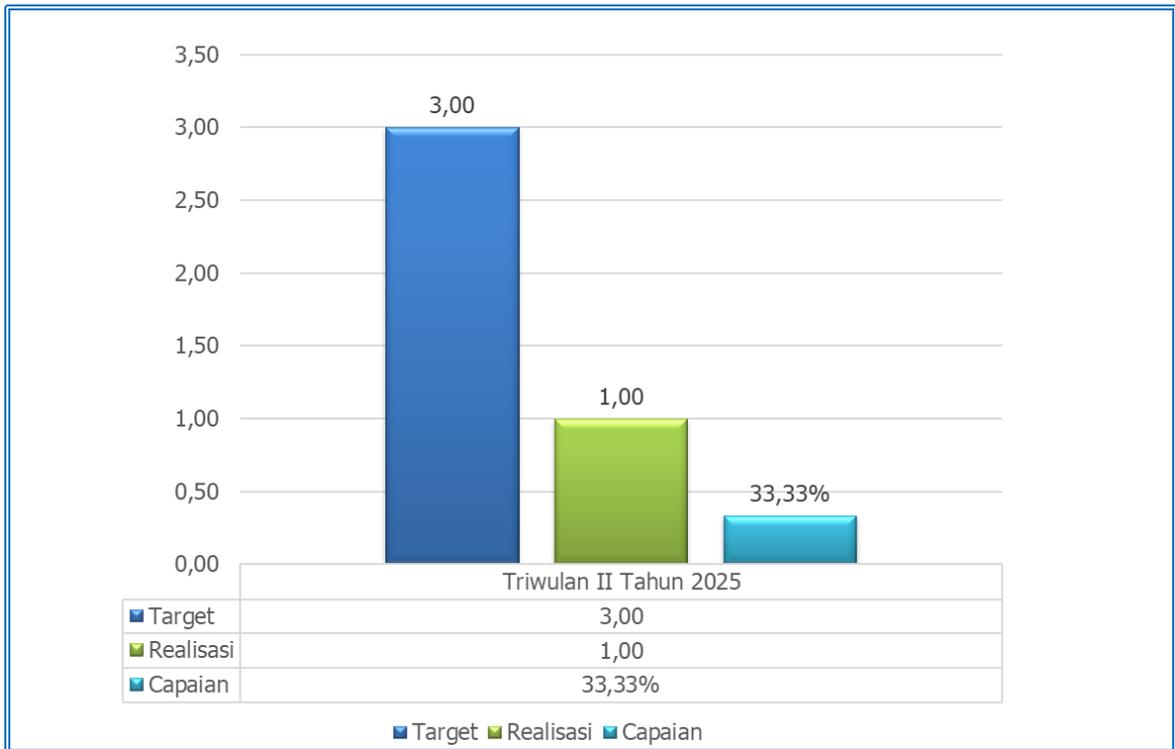
a.1. Definisi Indikator Kinerja

Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat merupakan kegiatan yang terkait dengan Subbag Keuangan/Subbag Tata Usaha meliputi:

1. Kegiatan Koordinasi kegiatan dan rencana kerja Ditjenhubdat dan Pemerintah Daerah di wilayah kerja Provinsi Sumatera Selatan;
2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran BPTD Kelas II Sumatera Selatan; dan
3. Kegiatan Bimbingan Teknis MC/*Public Speaking*.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 sebesar 1 Kegiatan jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 3 Kegiatan, maka capaian kinerja mencapai 33,33%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.27**.



Gambar II.27. Grafik Capaian IKK 4.4 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat yaitu Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 245 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 186 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat memiliki target sebesar 3 Kegiatan yang diperoleh dari capaian di tahun-tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan pada pembahasan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025.

▪ Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah disusun;
2. Koordinasi internal yang baik di masing-masing Sub Bagian/Seksi serta dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam proses pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

3. Koordinasi eksternal yang baik dengan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan terkait pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
4. Kinerja SDM pada implementasi kegiatan dan anggaran memiliki integritas dan kualitas yang baik.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Belum adanya kepastian anggaran yang disebabkan masih terdapatnya beberapa kegiatan yang diblokir (belum buka blokir anggaran), sehingga implementasi kegiatan agak terhambat;
2. Adanya efisiensi anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan sehingga berdampak pada capaian target kinerja kegiatan; dan
3. Kurangnya SDM yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 1 Kegiatan yang diperoleh dari realisasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran BPTD Kelas II Sumatera Selatan, dimana realisasi anggaran dapat dimonitor secara berkala melalui aplikasi RKAKL, OMSPAN, E-Planning dan aplikasi pendukung lainnya.

▪ **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 33,33%.

IKK 4.4 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat

$$= \frac{\text{Realisasi Jumlah Kegiatan}}{\text{Target Jumlah Kegiatan}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1 \text{ Kegiatan}}{3 \text{ Kegiatan}} \times 100\% = 33,33\%$$

▪ **Realisasi Anggaran**

Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 sebesar Rp. 2.711.180.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 51.205.000,- atau mencapai 1,89%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan/diklat baik secara *online* atau *offline*;
2. Meningkatkan pengelolaan arsip yang baik sesuai dengan pola kearsipan untuk mencadangkan *file* atau dokumen terkait pelaksanaan anggaran;
3. Memperkuat koordinasi internal dan eksternal di masing-masing Sub Bagian/Seksi di BPTD Kelas II Sumatera Selatan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Pemerintah Daerah; dan

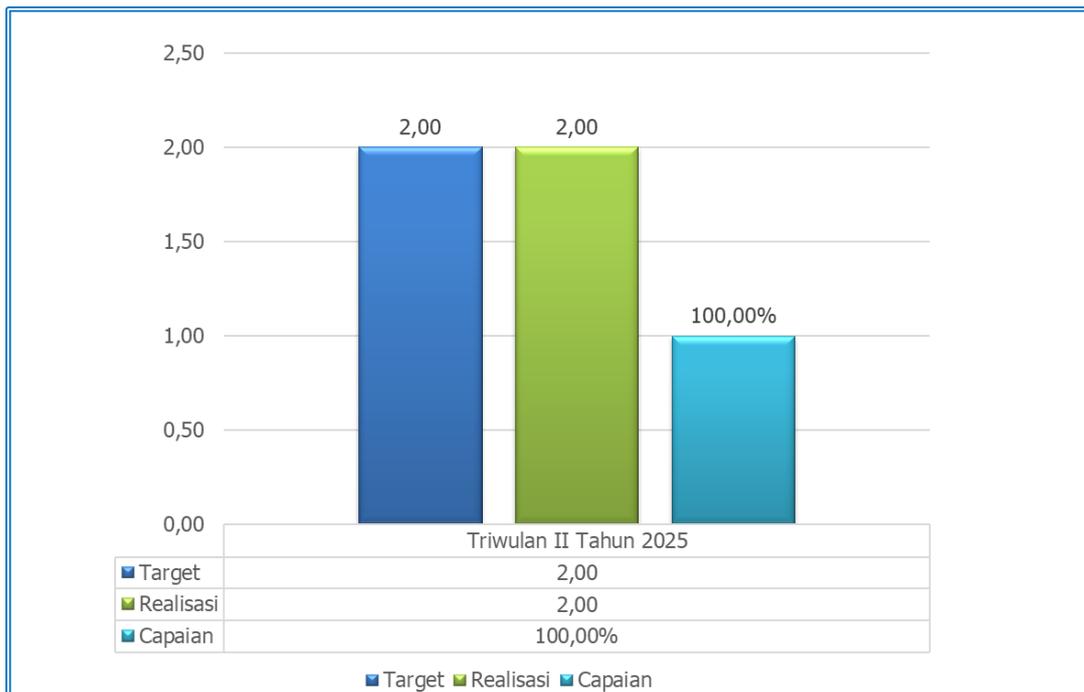
IKK 4.5 Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit / Pemeriksaan

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan, dimana pemeriksaan yang dilakukan menghasilkan beberapa rekomendasi yang tertuang dalam dokumen tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan/atau eksternal. Audit internal dilakukan oleh unit pengawasan intern (APIP) yang ada di dalam organisasi yaitu BPKP, Inspektorat Jenderal, dan UKI (Unit Kepatuhan Internal), sedangkan Audit eksternal Pemerintah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit / Pemeriksaan Tahun 2025 sebesar 2 Dokumen jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 2 Dokumen, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.28**.



Gambar II.28. Grafik Capaian IKK 4.5 Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan yaitu Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-ITJEN 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu Di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sebagai dasar pelaksanaan Audit Internal.

Untuk pelaksanaan Audit Eksternal mengacu pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan memiliki target 2 Dokumen yang diperoleh dari capaian terhadap PK di tahun-tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan pada pembahasan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025.

▪ Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit / Pemeriksaan antara lain:

1. Pelaksanaan sistem pemantauan dan evaluasi berjalan secara efektif;
2. Pemahaman yang jelas terhadap rekomendasi audit/pemeriksaan;
3. Auditor yang kompeten di bidang audit/pemeriksaan;
4. Pengawasan dari Auditor ditindaklanjuti secara berkelanjutan sampai audit/pemeriksaan selesai;
5. Penetapan tanggung jawab terhadap pelaksanaan rekomendasi audit/pemeriksaan yang jelas, terarah dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan penyelesaiannya; dan
6. Koordinasi intensif antara Auditor dengan instansi berjalan dengan baik.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit / Pemeriksaan antara lain:

1. Pimpinan instansi tidak menunjukkan perhatian terhadap hasil audit/pemeriksaan sehingga lambat ditindaklanjuti;
2. Tidak jelasnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi audit/pemeriksaan;
3. Tidak adanya monitoring dan evaluasi secara berkala;
4. Koordinasi yang kurang berjalan dengan baik sehingga menyebabkan tindaklanjut rekomendasi audit/pemeriksaan tidak sesuai dengan yang ditetapkan;
5. Rekomendasi audit/pemeriksaan tidak relevan atau sulit diterapkan sesuai dengan kondisi organisasi atau peraturan yang telah mengalami perubahan; dan
6. Auditor kurang kompeten dalam memberikan rekomendasi audit/pemeriksaan dan sulit untuk diimplementasikan.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 2 Dokumen yang diperoleh dari hasil tindaklanjut pelaksanaan Audit Eksternal yang disampaikan melalui Surat Kepala BPTD Kelas II Sumatera Selatan Nomor UM.103/1/3/BPTD SUMSEL/2025 tanggal 18 Juni 2025 tentang Penyampaian Tindaklanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK – RI yang ditujukan kepada Ketua Subtim Pemeriksa BPK-RI. Untuk hasil tindaklanjut pelaksanaan Audit Internal disampaikan melalui Berita Acara Tindaklanjut Temuan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Pada Kantor BPTD Kelas II Sumatera Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 20025.

- **Capaian Kinerja**

Keberhasilan Indikator Kinerja Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit / Pemeriksaan Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 100%.

$$\begin{aligned}
 & \text{IKK 4.5 Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit / Pemeriksaan} \\
 & = \frac{\text{Realisasi Jumlah Dokumen}}{\text{Target Jumlah Dokumen}} \times 100\% \\
 & \% \text{ Capaian} = \frac{2 \text{ Dokumen}}{2 \text{ Dokumen}} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

- **Realisasi Anggaran**

Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit / Pemeriksaan Tahun 2025 sebesar Rp. 2.711.180.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 51.205.000,- atau mencapai 1,89%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit / Pemeriksaan yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal dalam pelaksanaan tindaklanjut audit/pemeriksaan;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara intensif dan berkelanjutan; dan
3. Menyamakan persepsi pemahaman terkait rekomendasi audit/pemeriksaan agar tindaklanjut yang dilakukan sesuai dengan hasil audit/pemeriksaan.

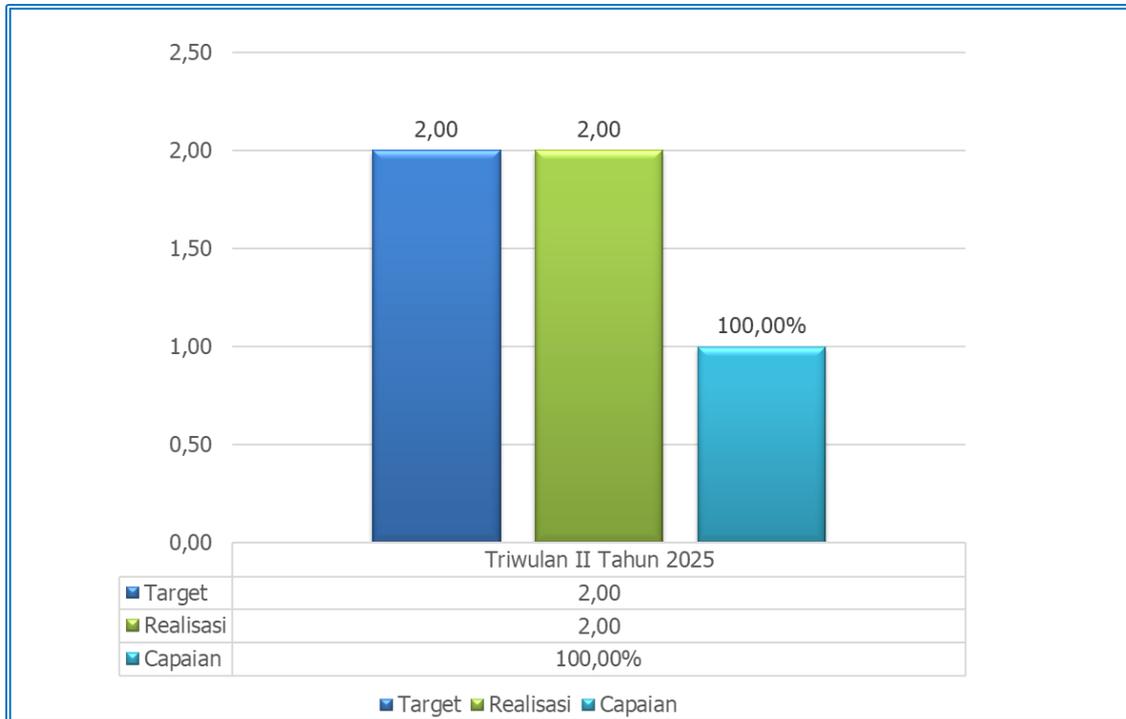
IKK 4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Kegiatan Pengelolaan Aset /BMN merupakan rangkaian kegiatan penatausahaan aset mulai dari perencanaan aset hingga penghapusan aset, dengan tujuan untuk menjaga efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan aset negara. Kegiatan Pengelolaan aset menghasilkan dokumen aset yaitu dokumen pengelolaan aset dan dokumen penatausahaan aset.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 sebanyak 2 Dokumen jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebanyak 2 Dokumen, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.29**.



Gambar II.29. Grafik Capaian IKK 4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ **Dasar Hukum**

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara; dan
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

▪ **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 terhadap meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub memiliki target 2 Dokumen yang diperoleh dari capaian terhadap PK dengan berdasarkan arahan pimpinan pada pembahasan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025.

▪ **Faktor Keberhasilan**

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Kepatuhan terhadap ketentuan regulasi atau peraturan;
2. Komitmen Pimpinan dalam pengalokasian anggaran, kebijakan, dan pengawasan;
3. Sistem informasi pengelolaan aset yang terintegrasi dan berbasis digital;
4. Sistem administrasi dan tata kelola aset yang baik dan dilengkapi dengan pengamanan fisik dan hukum;
5. SDM yang berkompeten dalam pengelolaan aset; dan
6. Koordinasi yang baik antara unit pengguna, pengelola aset, keuangan, dan auditor.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Lemahnya sistem informasi dan teknologi aset;
2. Tidak adanya SOP atau pedoman pengelolaan aset;
3. Aset tidak dimanfaatkan secara optimal;
4. SDM kurang kompeten dalam mengelola aset;
5. Tidak ada pemeliharaan atau perawatan aset; dan
6. Kurangnya pengawasan dalam pengelolaan aset.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu 2 Dokumen yang diperoleh dari dokumen pengelolaan aset dan dokumen penatausahaan aset.

- **Capaian Kinerja**

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 100%.

$$\begin{aligned}
 & \text{IKK 4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat} \\
 & = \frac{\text{Realisasi Jumlah Dokumen}}{\text{Target Jumlah Dokumen}} \times 100\% \\
 & \% \text{ Capaian} = \frac{2 \text{ Dokumen}}{2 \text{ Dokumen}} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

- **Realisasi Anggaran**

Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 memiliki target anggaran sebesar Rp. 2.711.180.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 51.205.000,- atau mencapai 1,89%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat yaitu:

1. Meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan aset;
2. Meningkatkan kualitas SDM di bidang pengelolaan aset; dan
3. Meningkatkan tata kelola administrasi aset sehingga terdapat pencadangan file/dokumen aset.

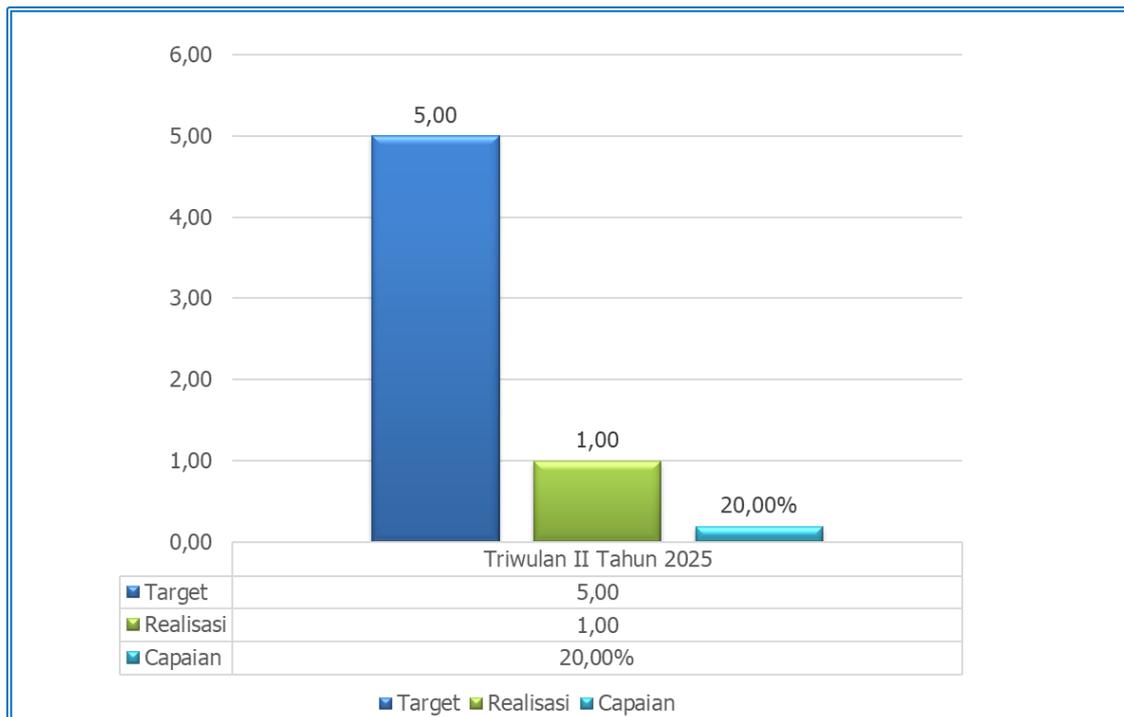
IKK 4.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah Diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) merupakan kegiatan yang terkait dengan kehumasan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi, dimana kegiatan ini bertujuan untuk merespon dan menyelesaikan keluhan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat melalui berbagai kanal pengaduan. LAPOR atau Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara *online* yang dikelola Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 sebanyak 1 Kegiatan jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebanyak 5 Kegiatan, maka capaian kinerja mencapai 20%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.30**.



Gambar II.30. Grafik Capaian IKK 4.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penanganan dan Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblower*) di Lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang mewajibkan pencantuman alamat email dan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat pada kendaraan angkutan sewa khusus.

▪ **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat memiliki target sebanyak 5 Kegiatan yang terkait dengan kehumasan dan pengelolaan informasi antara lain:

1. Kegiatan Peliputan Kegiatan Pembangunan dan Tusi Keselamatan LLAJSDP;
2. Kegiatan Rebranding dan Penyusunan Profil BPTD dan Satpel BPTD Kelas II Sumatera Selatan;
3. Kegiatan Pelaksanaan Kehumasan dan PPID;
4. FGD Kehumasan dan PPID dengan tema Transportasi; dan
5. Pelatihan dan Sertifikasi *Remote Pilot* (pelatihan *drone*).

▪ **Faktor Keberhasilan**

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Sistem dan mekanisme sistem pengaduan jelas dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan;
2. Pengaduan masyarakat direspon dalam waktu yang sesuai dengan standar pelayanan (SOP);
3. SDM yang kompeten dan professional dalam merespon pengaduan masyarakat;
4. Perbaikan sistem, prosedur, atau kebijakan yang berkelanjutan dalam menangani pengaduan Masyarakat;
5. Ketersediaan data dan informasi yang lengkap; dan
6. Pengawasan dan evaluasi atas efektivitas tindak lanjut pengaduan dilakukan dengan baik.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Tidak adanya SOP terkait mekanisme pengaduan masyarakat;
2. Respon yang tidak baik dan terlambat terhadap pengaduan Masyarakat;
3. Tidak adanya sistem informasi dan teknologi berbasis digital terkait pengaduan masyarakat;
4. Pengawasan dan evaluasi terhadap pengaduan Masyarakat tidak berjalan dengan baik; dan
5. SDM tidak memiliki wawasan yang luas untuk menjawab respon dari masyarakat.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu 1 Kegiatan yang diperoleh dari hasil implementasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan peliputan kehumasan antara lain:

1. Sosialisasi keselamatan dalam rangka persiapan Libur Idul Adha dan kegiatan *rampcheck* angkutan yang dilaksanakan di PO Bus AKAP;
2. Sosialisasi *Over Dimension and Over Loading (ODOL)* dan pembuatan konten UPPKB terkait Program Zero ODOL 2026;
3. Peresmian Peresmian Pelabuhan Penyeberangan Sri Menanti; dan
4. Peliputan kegiatan *rampcheck* kapal.

▪ **Capaian Kinerja**

Keberhasilan Indikator Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 20%.

$$\begin{aligned}
 &\text{IKK 4.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang} \\
 &\text{sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat} = \frac{\text{Realisasi Jumlah Kegiatan}}{\text{Target Jumlah Kegiatan}} \times 100\% \\
 &\% \text{ Capaian} = \frac{1 \text{ Kegiatan}}{5 \text{ Kegiatan}} \times 100\% = 20\%
 \end{aligned}$$

▪ **Realisasi Anggaran**

Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 sebesar Rp. 2.711.180.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 51.205.000,- atau mencapai 1,89%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yaitu:

1. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat dengan cepat dan sesuai dengan SOP pengaduan masyarakat;
2. Meningkatkan kapasitas SDM agar lebih responsif dan informatif dalam memberikan informasi terkait pengaduan masyarakat;
3. Menyediakan informasi yang akurat terkait layanan transportasi darat; dan
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut yang telah dilakukan terhadap pengaduan masyarakat.

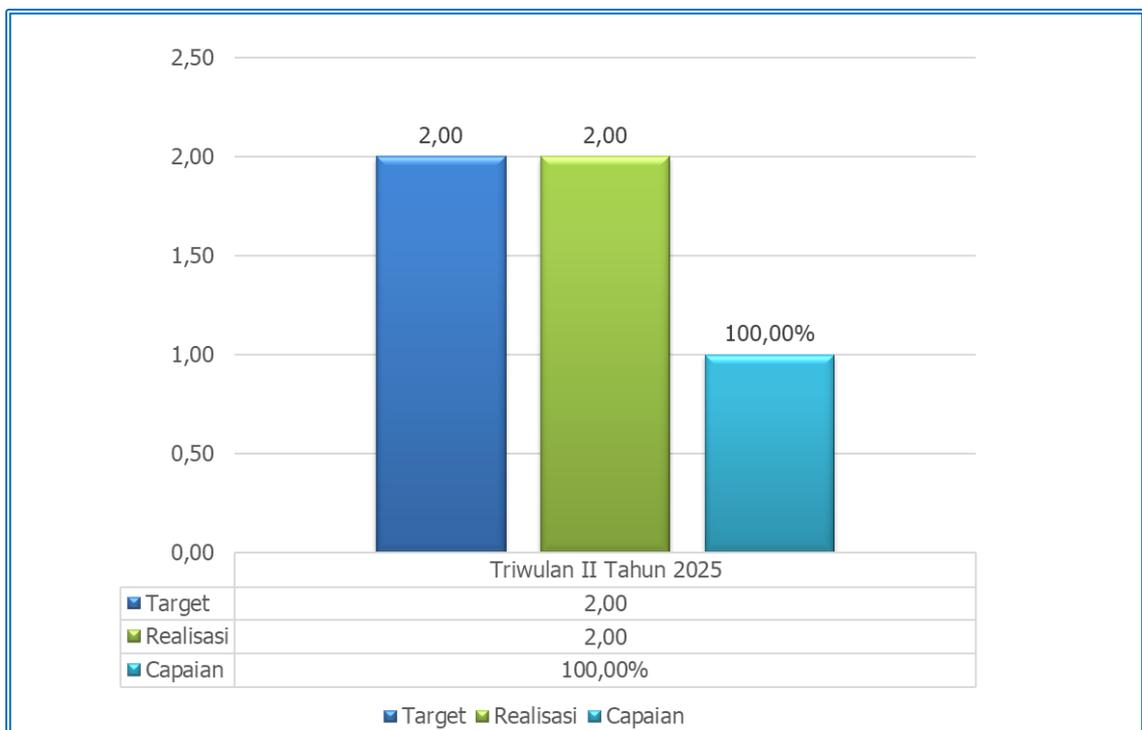
IKK 4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Kegiatan Digitalisasi Arsip merupakan kegiatan layanan perkantoran yang bertujuan untuk mengumpulkan sumber informasi berupa dokumen tertulis (surat, naskah berkas dan lainnya) dan/atau dalam bentuk visual, sehingga dapat digunakan sebagai informasi untuk menunjang kegiatan layanan perkantoran. Adapun kegiatan yang dilakukan terkait layanan perkantoran pada BPTD Kelas II Sumatera Selatan terkait digitalisasi arsip adalah Operasional Kantor BPTD Kelas II Sumatera Selatan, dan Operasional dan Pemeliharaan Gedung *Command Center* yang merupakan pusat informasi terkait layanan di BPTD Kelas II Sumatera Selatan seperti informasi ATCS (*Area Traffic Control System*) di Kota Palembang.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) Tahun 2025 sebanyak 2 Kegiatan jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebanyak 2 Kegiatan, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.31**.



Gambar II.31. Grafik Capaian IKK 4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Kepala ANRI (Perka ANRI) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik;
3. Peraturan Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Konversi Arsip Statis ke dalam Format Digital; dan
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) memiliki target 2 Kegiatan yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Operasional Kantor BPTD Kelas II Sumatera Selatan, dan Operasional dan Pemeliharaan Gedung *Command Center* dengan berdasarkan arahan pimpinan pada pembahasan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025.

▪ Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) antara lain:

1. Ketersediaan perangkat keras dan lunak yang memadai dalam proses digitalisasi arsip, seperti *scanner* berkualitas tinggi, server penyimpanan, layar/monitor dan perangkat pendukung lainnya.
2. SDM yang berkompeten dan terlatih dalam mengoperasikan dan mengelola sistem digitalisasi arsip arsiparis;
3. Sistem keamanan data dan *backup system* dilakukan dengan baik dan termonitor dengan baik secara berkala; dan
4. Terciptanya lingkungan budaya kerja terkait pentingnya pengelolaan arsip secara digital.

▪ Faktor Kegagalan

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) antara lain:

1. Kurangnya dukungan anggaran pemeliharaan dan peningkatan perangkat keras dan lunak sehingga tidak dapat terpelihara sistem keamanan dan *backup data*;
2. Kurangnya SDM yang berkompeten dalam pelaksanaan digitalisasi arsip; dan
3. Belum terciptanya budaya kerja yang mengedepankan digitalisasi arsip tanpa harus menggunakan berkas fisik.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebanyak 2 Kegiatan yang diperoleh dari dari pelaksanaan kegiatan Operasional Kantor BPTD Kelas II Sumatera Selatan, dan Operasional dan Pemeliharaan Gedung *Command Center*.

▪ **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 100%.

$$\begin{aligned}
 \text{IKK 4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)} &= \frac{\text{Realisasi Jumlah Kegiatan}}{\text{Target Jumlah Kegiatan}} \times 100\% \\
 \% \text{ Capaian} &= \frac{2 \text{ Kegiatan}}{2 \text{ Kegiatan}} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

▪ **Realisasi Anggaran**

Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) Tahun 2025 sebesar Rp. 2.711.180.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 51.205.000,- atau mencapai 1,89%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) yaitu:

1. Meningkatkan perangkat sistem digitalisasi arsip yang terintegrasi dengan sistem lain untuk layanan perkantoran;
2. Meningkatkan kapasitas SDM agar memiliki pemahaman dalam mengelola arisp berbasis digital; dan
3. Meningkatkan pengelolaan arsip digital sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

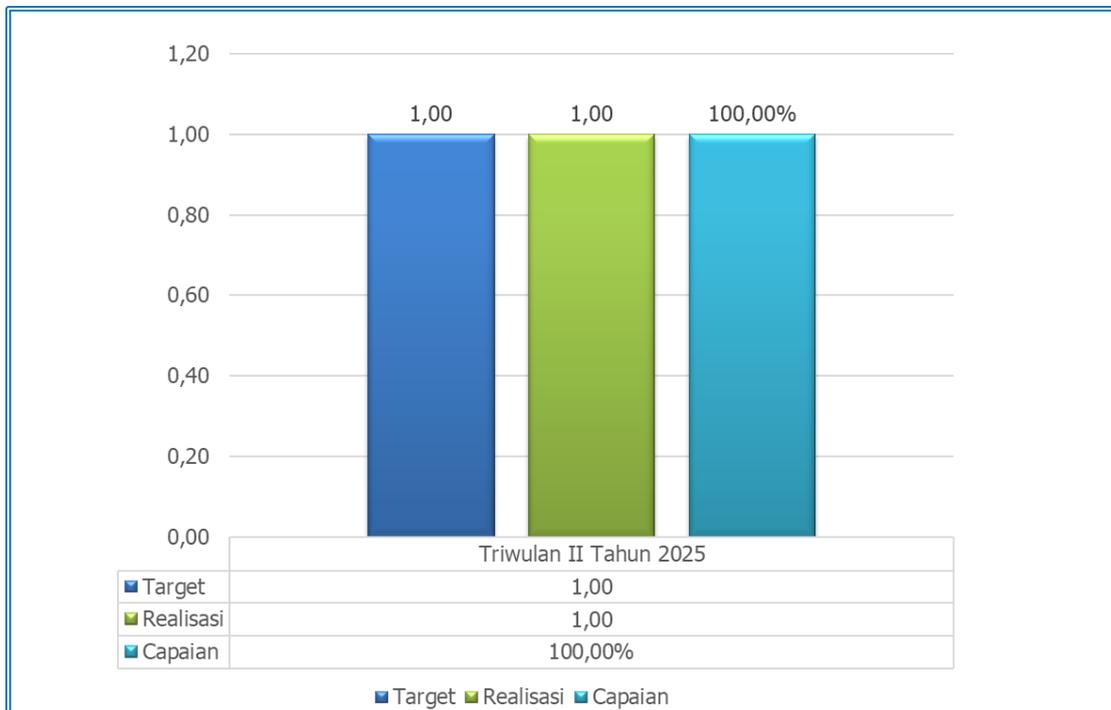
IKK 4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan jasa

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa merupakan kegiatan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung operasional perkantoran BPTD Kelas II Sumatera Selatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Persyaratan Penyedia Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Perhubungan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 memiliki capaian sebanyak 1 Kegiatan jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebanyak 1 Kegiatan, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.32**.



Gambar II.32. Grafik Capaian IKK 4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ **Dasar Hukum**

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2015 tentang Persyaratan Penyedia Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Pendampingan terhadap Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa; dan
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Persyaratan Penyedia Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

▪ **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa memiliki target sebanyak 1 Kegiatan yang diperoleh dari capaian pelaksanaan kegiatan dengan berdasarkan arahan pimpinan pada pembahasan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025.

▪ **Faktor Keberhasilan**

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa antara lain:

1. Kepatuhan terhadap penerapan regulasi dan kebijakan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa;
2. Komitmen, integritas dan profesionalisme pejabat pengadaan dan panitia pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa;
3. Perencanaan pengadaan barang/jasa dilakukan dengan baik sesuai dengan SOP dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik);
4. Pengawasan internal dan eksternal yang baik dalam proses pengadaan barang/jasa; dan
5. Hubungan kerja antara penyedia barang/jasa dengan instansi menjunjung tinggi profesionalisme dan transparan.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa antara lain:

1. Pelaksana pengadaan barang/jasa tidak mengikuti prosedur, tahapan dan tata cara pengadaan barang/jasa sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan;
2. Tidak adanya pengawasan secara berkala terhadap proses pengadaan barang/jasa; dan
3. Tidak profesional dan tidak kompeten SDM yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 1 Kegiatan yang diperoleh dari realisasi pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran BPTD Kelas II Sumatera Selatan dan Pengadaan Barang/Belanja Jasa *Outsourcing*.

▪ **Capaian Kinerja**

Keberhasilan Indikator Kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\begin{aligned}
 & \text{IKK 4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa} \\
 & = \frac{\text{Realisasi Jumlah Kegiatan}}{\text{Target Jumlah Kegiatan}} \times 100\% \\
 & \% \text{ Capaian} = \frac{1 \text{ Kegiatan}}{1 \text{ Kegiatan}} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

▪ **Realisasi Anggaran**

Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 sebesar Rp. 2.711.180.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 51.205.000,- atau mencapai 1,89%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat yaitu:

1. Meningkatkan sistem informasi dan teknologi dalam proses pengadaan barang/jasa;
2. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM pada pengadaan barang/jasa; dan
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang/jasa melalui kegiatan sosialisasi pengadaan barang/jasa.

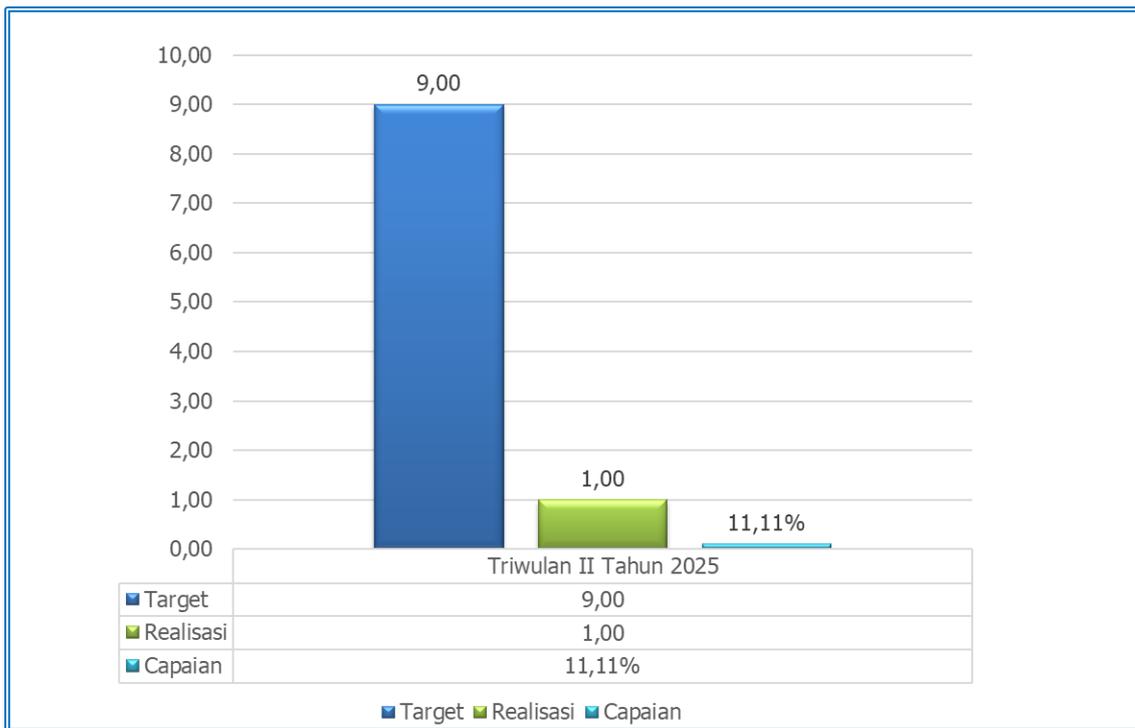
IKK 4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja merupakan kegiatan yang terkait pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai, peningkatan kompetensi SDM dan peningkatan motivasi SDM.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja Tahun 2025 memiliki capaian sebanyak 1 Kegiatan jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 9 Kegiatan, maka capaian kinerja mencapai 11,11%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.33**.



Gambar II.33. Grafik Capaian IKK 4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat yaitu Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 139 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat memiliki target senilai 9 Kegiatan yang diperoleh dari capaian kegiatan di tahun-tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan pada pembahasan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025.

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja Tahun 2025 dilakukan melalui kegiatan penunjang, antara lain:

1. Pengelolaan Gaji dan Tunjangan Pegawai;
2. Kegiatan Monitoring dan evaluasi Absensi Melalui Fingerprint;
3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Administrasi Perkantoran dan kepegawaian;
4. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Capacity Building Pegawai;
5. Kegiatan Konsinyering Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja;
6. Kegiatan Bimbingan Teknis E-Kinerja;
7. Kegiatan Sosialisasi Disiplin Pegawai;

8. Kegiatan Sosialisasi Prosedur Kepegawaian; dan
9. Kegiatan Bimbingan Teknis SDM Kehumasan.

▪ **Faktor Keberhasilan**

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja antara lain:

1. Metode kegiatan pengembangan SDM yang efektif dan relevan sesuai dengan kebutuhan SDM;
2. Ketersediaan anggaran yang memadai dalam mendukung pelaksanaan pengembangan SDM;
3. Dukungan dan komitmen dari Pimpinan dalam mengimplementasikan kegiatan; dan
4. Rencana kegiatan pengembangan SDM terukur dan sistematis, termasuk jenis kegiatan, peserta, jadwal, dan metode pengembangan.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja antara lain:

1. Kurangnya dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan SDM;
2. Tidak adanya analisis kebutuhan SDM yang memerlukan peningkatan kualitas SDM; dan
3. Kurangnya dukungan dari Pimpinan terhadap implementasi pengembangan SDM.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 1 Kegiatan yang diperoleh dari hasil capaian kegiatan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai.

▪ **Capaian Kinerja**

Keberhasilan Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\text{Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja} = \frac{\text{Realisasi Jumlah Kegiatan}}{\text{Target Jumlah Kegiatan}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1 \text{ Kegiatan}}{9 \text{ Kegiatan}} \times 100\% = 11,11\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja Tahun 2025 sebesar Rp. 2.711.180.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 51.205.000,- atau mencapai 1,89%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan/seminar untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
2. Mendorong SDM untuk pro aktif mengikuti pelatihan berbasis *online* yang diselenggarakan oleh organisasi/lembaga/instansi.

4. REALISASI ANGGARAN

II.2.1 Alokasi Anggaran Tahun 2025

II.2.1.1 Pagu Anggaran

- 1) Pagu Awal DIPA TA. 2024 sebesar **Rp. 118.580.021.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.14 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2025

RM	Rp.	87.005.931.000	73,37%
PNBP	Rp.	31.574.090.000	26,63%
SBSN	Rp.	-	-
Total	Rp.	118.580.021.000	100%

Sumber: OMSPAN BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

Tabel II.15 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2025

Belanja Pegawai	Rp.	27.053.402.000	22,81%
Belanja Barang	Rp.	46.478.599.000	39,20%
Belanja Modal	Rp.	45.048.020.000	37,99%
Total	Rp.	118.580.021.000	100%

Sumber: OMSPAN BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

Tabel II.16 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu per Triwulan I Tahun 2025

RM	Rp.	87.005.931.000	73,37%
PNBP	Rp.	31.574.090.000	26,63%
SBSN	Rp.	-	-
Total	Rp.	118.580.021.000	100%

Sumber: OMSPAN BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

Tabel II.17 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu per Triwulan II Tahun 2025

Belanja Pegawai	Rp.	27.053.402.000	22,81%
Belanja Barang	Rp.	46.478.599.000	39,20%
Belanja Modal	Rp.	45.048.020.000	37,99%
Total	Rp.	118.580.021.000	100%

Sumber: OMSPAN BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

II.2.1.2 Revisi Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-293/AG/AG.3/2025 tanggal 24 Maret 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan TA. 2025 (Revisi Ke-4) bahwa Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan terdapat revisi anggaran berupa buka blokir catatan halaman IV A DIPA dalam rangka relaksasi blokir efisiensi dan realokasi/pergeseran anggaran untuk pemenuhan anggaran kegiatan prioritas. Untuk revisi anggaran pada BPTD Kelas II Sumatera Selatan telah dilakukan 2 (dua) kali revisi pada akun anggaran, namun tidak merubah nilai pagu anggaran Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 118.580.021.000,-. Berikut adalah rincian revisi per sumber dana dan per jenis belanja.

Tabel II.18 Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025

	SUMBER DANA			JUMLAH
	RM	PNBP	SBSN	
PAGU AWAL	87.005.931.000	31.574.090.000	-	118.580.021.000
REVISI KE-1	87.005.931.000	31.574.090.000	-	118.580.021.000
REVISI KE-2	87.005.931.000	31.574.090.000	-	118.580.021.000
REVISI KE-3	87.005.931.000	31.574.090.000	-	118.580.021.000

Sumber: Analisa dari BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

Tabel II.19 Rincian Revisi per Jenis Belanja Tahun 2025

	SUMBER DANA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGU AWAL	27.053.402.000	46.478.599.000	45.048.020.000	118.580.021.000
REVISI KE-1	27.053.402.000	46.478.599.000	45.048.020.000	118.580.021.000
REVISI KE-2	27.053.402.000	46.478.599.000	45.048.020.000	118.580.021.000
REVISI KE-2	27.053.402.000	46.478.599.000	45.048.020.000	118.580.021.000

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

Tabel II.20 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2025

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR TRIWULAN I	PERUBAHAN	PAGU AKHIR TRIWULAN II
Belanja Pegawai	27.053.402.000	-	27.053.402.000	0	27.053.402.000
Belanja Barang	46.478.599.000	-	46.478.599.000	0	46.478.599.000
· RM	45.184.329.000	-	45.184.329.000	0	45.184.329.000
· PNPB	1.294.270.000	-	1.294.270.000	0	1.294.270.000
Belanja Modal	45.048.020.000	-	45.048.020.000	0	45.048.020.000
· RM	14.768.200.000	-	14.768.200.000	0	14.768.200.000
· PNPB	30.279.820.000	-	30.279.820.000	-	30.279.820.000
· SBSN	-	-	-	-	-
TOTAL	118.580.021.000	-	118.580.021.000	0	118.580.021.000

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

II.2.1.3 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2025

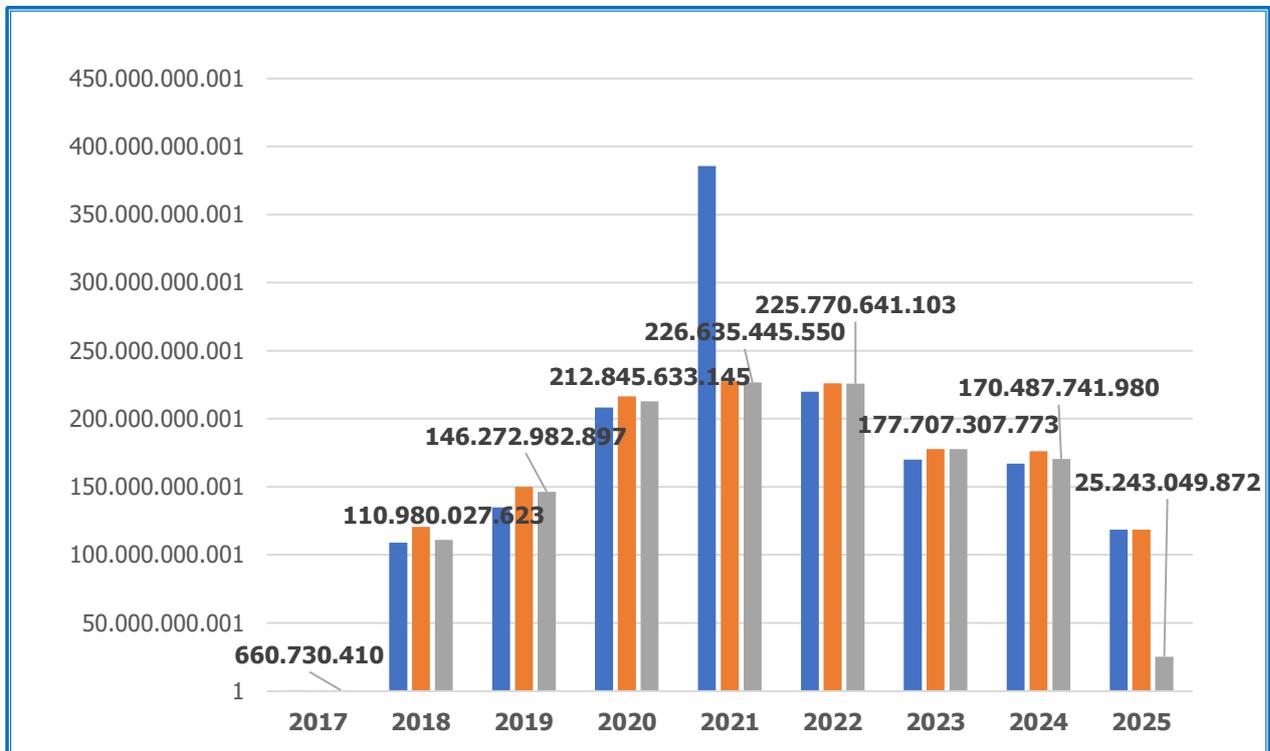
Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2017 – 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.21 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 – Tahun 2025

No	Tahun	Pagu Akhir	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1.	2017	669.817.000	660.730.410	98,64
2.	2018	120.528.305.000	110.980.027.623	92,08

No	Tahun	Pagu Akhir	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
3.	2019	150.004.623.000	146.272.982.897	97,51
4.	2020	216.371.699.000	212.845.633.145	98,37
5.	2021	227.713.955.000	226.635.445.550	99,53
6.	2022	225.939.345.000	225.770.641.103	99,73
7.	2023	177.722.722.000	177.707.307.773	99,99
8.	2024	176.090.836.000	170.487.741.980	96,82
9.	2025	118.580.021.000	25.243.049.872	21,29

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)



Gambar II.34 Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 – Tahun 2025

Berdasarkan data di atas dapat diketahui nilai pagu awal, pagu akhir, dan realisasi setiap tahunnya, sehingga diketahui masing-masing dana yang terserap setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2022 anggaran yang terserap sebesar Rp 225.770.641.103,- atau mencapai 99,73% dari pagu akhir Rp 225.939.345.000,.

Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan daya serap anggaran yaitu sebesar Rp. 177.707.307.773,- atau mencapai 99,99% dimana hal ini terjadi pengurangan anggaran dari tahun sebelumnya. Lalu pada Tahun 2024 terjadi penurunan penyerapan anggaran yaitu sebesar Rp. 170.487.741.980,- atau mencapai 96,82% dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pada periode Triwulan II Tahun 2025 penyerapan anggaran sebesar Rp. 25.243.049.872,- (21,29%).

II.2.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

II.2.2.1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

Tabel II.22 Kegiatan Program Yang Ada dalam DIPA Tahun 2025

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER		TRIWULAN I		PAGU PER		TRIWULAN II	
			TRIWULAN I	REALISASI	%	TRIWULAN II	REALISASI	%		
022.03	Ditjen Perhubungan Darat	118.580.021.000	118.580.021.000	10.649.989.445	8,98%	118.580.021.000	25.243.049.872	21,29%		
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	85.967.440.000	85.967.440.000	2.869.216.692	3,34%	85.967.440.000	7.044.217.560	8,19%		
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	34.197.678.000	34.197.678.000	0	0,00%	34.197.678.000	549.701.385	1,61%		
4638	Pelayanan Transportasi Darat	19.754.451.000	19.754.451.000	2.151.597.135	10,89%	19.754.451.000	4.894.025.436	24,77%		
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	26.783.621.000	26.783.621.000	666.414.557	2,49%	26.783.621.000	1.549.285.739	5,78%		
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	5.231.690.000	5.231.690.000	51.205.000	0,98%	5.231.690.000	51.205.000	0,98%		
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	32.612.581.000	32.612.581.000	7.780.772.753	23,86%	32.612.581.000	18.198.832.312	55,80%		
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	5.559.179.000	5.559.179.000	426.226.190	7,67%	5.559.179.000	1.467.342.951	26,39%		
4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	27.053.402.000	27.053.402.000	7.354.546.563	27,19%	27.053.402.000	16.731.489.361	61,85%		

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)



Realisasi penyerapan anggaran Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 25.243.049.872,-** atau mencapai **21,29%** dari total pagu sebesar **Rp. 118.580.021.000,-**.

II.2.2.2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada Tahun 2025 yang sudah dianalisis per Triwulan II, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.23 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2025

	PAGU ALOKASI TRIWULAN I	TRIWULAN I		PAGU ALOKASI TRIWULAN II	TRIWULAN II	
		REALISASI	%		REALISASI	%
Belanja Pegawai	27.053.402.000	16.731.489.361	61,85	27.053.402.000	16.731.489.361	67,20
Belanja Barang	46.478.599.000	3.295.442.882	7,09	46.478.599.000	8.511.560.511	36,21
· RM	45.184.329.000	3.295.442.882	7,29	45.184.329.000	8.511.560.511	36,37
· PNBPN	1.294.270.000	-	-	1.294.270.000	-	-
Belanja Modal	45.048.020.000	-	-	45.048.020.000	-	10,83
· RM	14.768.200.000	-	-	14.768.200.000	-	15,20
· PNBPN	30.279.820.000	-	-	30.279.820.000	-	8,03
· SBSN	-	-	-	-	-	-
TOTAL	118.580.021.000	20.026.932.243	16,89	118.580.021.000	25.243.049.872	21,29

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per jenis belanja Tahun 2025 pada Triwulan II sebesar **21,29%** dari Pagu Alokasi Anggaran sebesar Rp. 118.580.021.000,-.



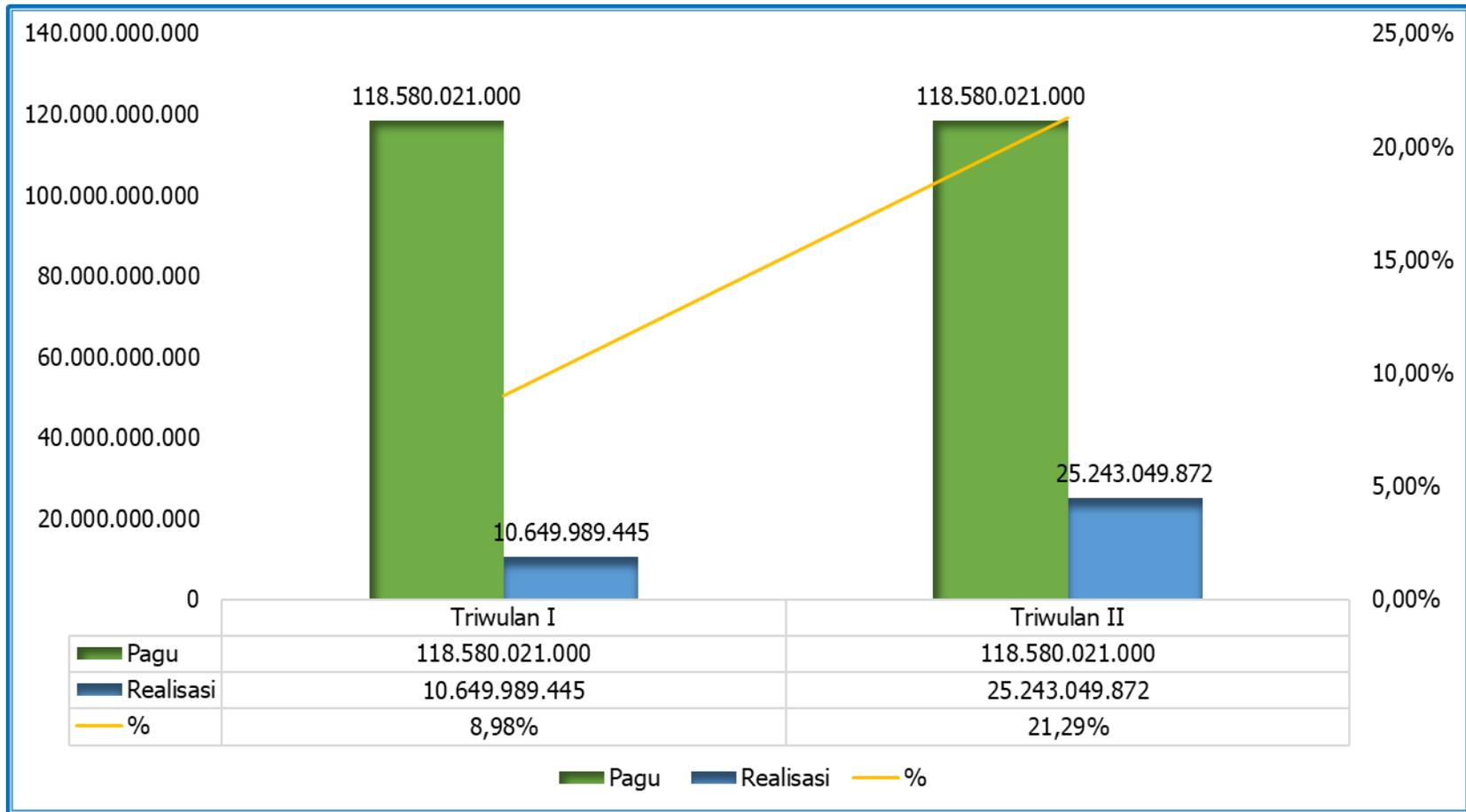
II.2.2.3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada Tahun 2025 yang sudah dianalisis per Triwulan II dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.24 Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana Triwulan II Tahun 2025

No.	SUMBER DANA	PAGU ALOKASI TRIWULAN I	REALISASI TRIWULAN I		PAGU ALOKASI TRIWULAN II	REALISASI TRIWULAN II	
			Rp.	%		Rp.	%
1	· RM	87.005.931.000	10.649.989.445	12,24%	87.005.931.000	25.243.049.872	29,01%
2	· PNBPN	31.574.090.000	0	0,00%	31.574.090.000	0	0,00%
3	· SBSN	0	0	0,00%	0	0	0,00%
TOTAL		118.580.021.000	10.649.989.445	8,98%	118.580.021.000	25.243.049.872	21,29%

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)



Gambar II.35 Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran Triwulan II Tahun 2025

Berdasarkan data di atas dapat diketahui realisasi anggaran per sumber dana Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II terealisasi sebesar **21,29%**.

II.2.2.4. Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Berikut merupakan data dari dana yang tidak terserap oleh unit kerja berdasarkan per jenis belanja, per sumber dana, dan sisa anggaran pada Tahun 2025 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.25 Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
1	Belanja Pegawai	27.053.402.000	16.731.489.361	10.321.912.639
2	Belanja Barang	46.478.599.000	8.511.560.511	37.967.038.489
3	Belanja Modal	45.048.020.000	0	45.048.020.000
TOTAL		118.580.021.000	25.243.049.872	93.336.971.128

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

Tabel II.26 Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025

NO	SUMBER DANA	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
1	RUPIAH MURNI	87.005.931.000	25.243.049.872	61.762.881.128
2	PNBP	31.574.090.000	0	31.574.090.000
3	SBSN	0	0	0
TOTAL		118.580.021.000	25.243.049.872	93.336.971.128

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

II.2.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan sasaran program per Triwulan II Tahun 2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.27 Efisiensi Anggaran

NO.	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TRIWULAN II		
		% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (Posisi Triwulan II)
SK 2	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	100,00%	133,70%	33,70%
SK 3	Meningkatnya konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	100,00%	35,03%	-64,97%
SK 5	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	100,00%	82,47%	-17,53%
SK 6	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan sungai dan danau	33,33%	0,00%	-33,33%
SK 7	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	75,00%	42,67%	-32,33%
SK 8	Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP	41,67%	6,19%	-35,48%
SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	100,00%	32,46%	-67,54%
SK 10	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	62,50%	0,00%	-62,50%
SK 11	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	0,00%	0,00%	0,00%
SK 12	Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	0,00%	0,00%	0,00%
SK 4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub	73,11%	0,00%	-73,11%
TOTAL		62,33%	30,23%	-32,10%

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan persentase capaian rata-rata kinerja sasaran sebesar 62,33%, dengan persentase capaian keuangan sebesar 30,23% menunjukkan adanya efisiensi antara rata-rata kinerja dengan rata-rata keuangan sebesar 32,10%.

II.2.4 Hambatan dan Kendala

Beberapa hambatan/kendala masih rendahnya realisasi daya serap anggaran antara lain adanya pelaksanaan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian/Lembaga berdasarkan:

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
2. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Bagi Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
3. Surat Menteri Perhubungan Nomor KU 001/1/3/MHB 2025 tanggal 31 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025; dan
4. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KU.001/1/3/SKJ/2025 tanggal 16 Januari 2025 hal Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Perjalanan Dinas TA. 2025 di Lingkungan Kementerian Perhubungan.



BAB III

PENUTUP



BAB III

PENUTUP

III.1 Penutup

III.1.1. Ringkasan Capaian

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Kegiatan. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sebagai penutup dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 ini terdapat 33 (tiga puluh tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Triwulan II Tahun 2025. Terdapat 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$) dan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq IKK < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan terealisasi sebesar 4 Trayek (target 4 Trayek);
2. Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A terealisasi sebesar 7 Kegiatan (target 7 Kegiatan);
3. Jumlah terminal tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas terealisasi sebesar 7 Unit (target 7 Unit);
4. Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas terealisasi sebesar 3 Unit (target 3 Unit);
5. Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP terealisasi sebesar 1 Trayek (target 1 Trayek);
6. Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas terealisasi sebesar 1 Unit (target 3 Unit);
7. Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM terealisasi sebesar 7 Unit (target 7 Unit);
8. Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM terealisasi sebesar 3 Unit (target 3 Unit);
9. Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok terealisasi sebesar 0 Kegiatan (target 6 Kegiatan);
10. Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas *Event* Khusus terealisasi sebesar 2 Kegiatan (target 1 Kegiatan);
11. Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM terealisasi sebesar 2 Unit (target 3 Unit);
12. Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM terealisasi sebesar 0 Unit (target 1 Unit);



13. Operasional layanan Kapal Kerja sesuai SPM terealisasi sebesar 0 Unit (target 1 Unit);
14. Operasional dan pemeliharaan pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan terealisasi sebesar 1 Unit (target 1 Unit);
15. Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata terealisasi sebesar 7 Kegiatan (target 7 Kegiatan);
16. Jumlah kegiatan pengawasan operasional angkutan barang terealisasi sebesar 3 Kegiatan (target 3 Kegiatan);
17. Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan terealisasi sebesar 3 Unit (target 3 Unit);
18. Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman terealisasi sebesar 1 Kegiatan (target 1 Kegiatan);
19. Jumlah kegiatan terkait kalibrasi alat uji berkala di daerah terealisasi sebesar 3 Kegiatan (target 12 Kegiatan);
20. Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis terealisasi sebesar 0 Unit (target 5.967 Unit);
21. Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman terealisasi sebesar 0 Lokasi (target 4 Lokasi);
22. Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda terealisasi sebesar 0 Orang (target 150 Orang);
23. Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda terealisasi sebesar 0 Orang (target 180 Orang);
24. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 2 Kegiatan (target 3 Kegiatan);
25. Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 1 Dokumen (target 1 Dokumen);
26. Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan terealisasi sebesar 2 Dokumen (target 2 Dokumen);
27. Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 1 Kegiatan (target 3 Kegiatan);
28. Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan terealisasi sebesar 2 Dokumen (target 2 Dokumen);
29. Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 2 Dokumen (target 2 Dokumen);
30. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 1 Kegiatan (target 5 Kegiatan);
31. Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) terealisasi sebesar 2 Kegiatan (target 2 Kegiatan);
32. Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa terealisasi sebesar 1 Kegiatan (target 1 Kegiatan);
33. Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja terealisasi sebesar 1 Kegiatan (target 9 Kegiatan).

Untuk meningkatkan capaian kinerja di triwulan selanjutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan akan melakukan monitoring dan pemantauan terhadap kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.

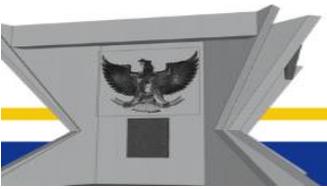
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju *zero accident*.

III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Penanggung Jawab

Hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.1 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

NO.	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN II			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	SK 2	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK 2.1	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	4	4	4	100	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring pelaksanaan keperintisan angkutan jalan secara berkala	- Seksi Sarana AJSDP - Seksi Lalu Lintas JSDPP
2	SK 3	Meningkatnya konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 3.1	Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A	Kegiatan	7	7	7	100	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring pelayanan AKAP terhadap Terminal Tipe A	Seksi Lalu Lintas JSDPP
			IKK 3.2	Jumlah terminal tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	7	7	7	100	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring pelaksanaan operasional Terminal Penumpang Tipe A	Seksi Prasarana JSDP
3	SK 5	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK 5	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	3	3	3	100	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring pelaksanaan operasional Pelabuhan SDP secara berkala	Seksi Prasarana JSDP
			IKK 6	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Trayek	1	1	1	100	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring pelaksanaan keperintisan angkutan penyeberangan secara berkala	Seksi sarana AJSDP
4	SK 6	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan	IKK 7	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan	Unit	3	3	1	33,33	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan monitoring	Seksi Prasarana JSDP



NO.	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN II			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		transportasi angkutan sungai dan danau		beroperasi untuk mendukung konektivitas							pelaksanaan operasional Pelabuhan SDP secara berkala	
5	SK 7	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 7.2	Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM	Unit	7	7	7	100	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A melalui koordinasi ke Satuan Pelayanan Terminal Tipe A secara berkala	Seksi Prasarana JSDP
			IKK 7.4	Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM	Unit	3	3	3	100	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan monitoring pelaksanaan operasional UPPKB secara berkala	Seksi Prasarana JSDP
			IKK 7.5	Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	6	6	0	0	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi serta secara intensif	- Subbag Tata Usaha - Seksi Prasarana JSDP - Seksi Sarana AJSDP - Seksi Lalu Lintas JSDPP
			IKK 7.6	Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Event Khusus	Kegiatan	2	2	1	50	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi serta secara intensif	Seksi Lalu Lintas JSDPP

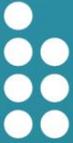
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	TRIWULAN II			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
6	SK 8 Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK 8.2	Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Unit	3	3	2	66,67	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan monitoring Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP melalui koordinasi ke Satuan Pelayanan Pelabuhan SDP secara berkala	Seksi Prasarana JSDP
		IKK 8.4	Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Unit	1	1	0	0	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan monitoring Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP melalui koordinasi ke Satuan Pelayanan Pelabuhan SDP secara berkala	Seksi Prasarana JSDP
		IKK 8.5	Operasional layanan Kapal Kerja sesuai SPM	Unit	1	1	0	0	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring progres dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Seksi Lalu Lintas JSDPP
		IKK 8.6	Operasional dan pemeliharaan pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan	Unit	1	1	1	100	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalu Lintas JSDPP

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	TRIWULAN II			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
7	SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.1	Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Kegiatan	7	7	7	100	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring progres dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Seksi Lalu Lintas JSDPP
			IKK 9.2	Jumlah kegiatan pengawasan operasional angkutan barang	Kegiatan	3	3	3	100	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring pelaksanaan operasional UPPKB secara berkala	Seksi Lalu Lintas JSDPP
			IKK 9.3	Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan	Unit	3	3	3	100	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring pelaksanaan operasional UPPKB secara berkala	Seksi Prasarana JSDP
8	SK 10	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK 10.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Kegiatan	1	1	1	100	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi sarana AJSDP
			IKK 10.2	Jumlah kegiatan terkait kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan	12	12	3	25	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan monitoring pelaksanaan akreditasi UPUBKB secara berkala	Seksi sarana AJSDP
9	SK 11	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 11.1	Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis	Unit	5.967	5.967	0	0	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan administrasi melalui koordinasi secara intensif	Seksi Lalu Lintas JSDPP

NO.	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN II			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			IKK 11.2	Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman	Lokasi	4	4	0	0	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan administrasi melalui koordinasi secara intensif	Seksi Lalu Lintas JSDPP
10	SK 12	Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	IKK 12.1	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	150	150	0	0	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi serta secara intensif	Seksi Sarana AJSDP
			IKK 12.2	Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	180	180	0	0	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi serta secara intensif	Seksi Sarana AJSDP
11	SK 4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub	IKK 4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	3	2	66,67	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan monitoring layanan perkantoran secara berkala	Subbag Tata Usaha
			IKK 4.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1	1	1	100,00	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring layanan perkantoran secara berkala	Subbag Tata Usaha
			IKK 4.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Dokumen	2	2	2	100,00	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring layanan perkantoran secara berkala	Subbag Tata Usaha
			IKK 4.4	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	3	1	33,33	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan monitoring layanan	Subbag Tata Usaha

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	TRIWULAN II			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
									perkantoran secara berkala		
		IKK 4.5	Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	2	2	2	100,00	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring layanan perkantoran secara berkala	Subbag Tata Usaha
		IKK 4.6	Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	2	2	2	100,00	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring layanan perkantoran secara berkala	Subbag Tata Usaha
		IKK 4.7	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	5	5	1	20,00	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan monitoring layanan perkantoran secara berkala	Subbag Tata Usaha
		IKK 4.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	2	2	2	100,00	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring layanan perkantoran secara berkala	Subbag Tata Usaha
		IKK 4.9	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	1	1	1	100,00	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring layanan perkantoran secara berkala	Subbag Tata Usaha
		IKK 4.10	Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	9	9	1	11,11	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan monitoring layanan perkantoran secara berkala	Subbag Tata Usaha

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2025)



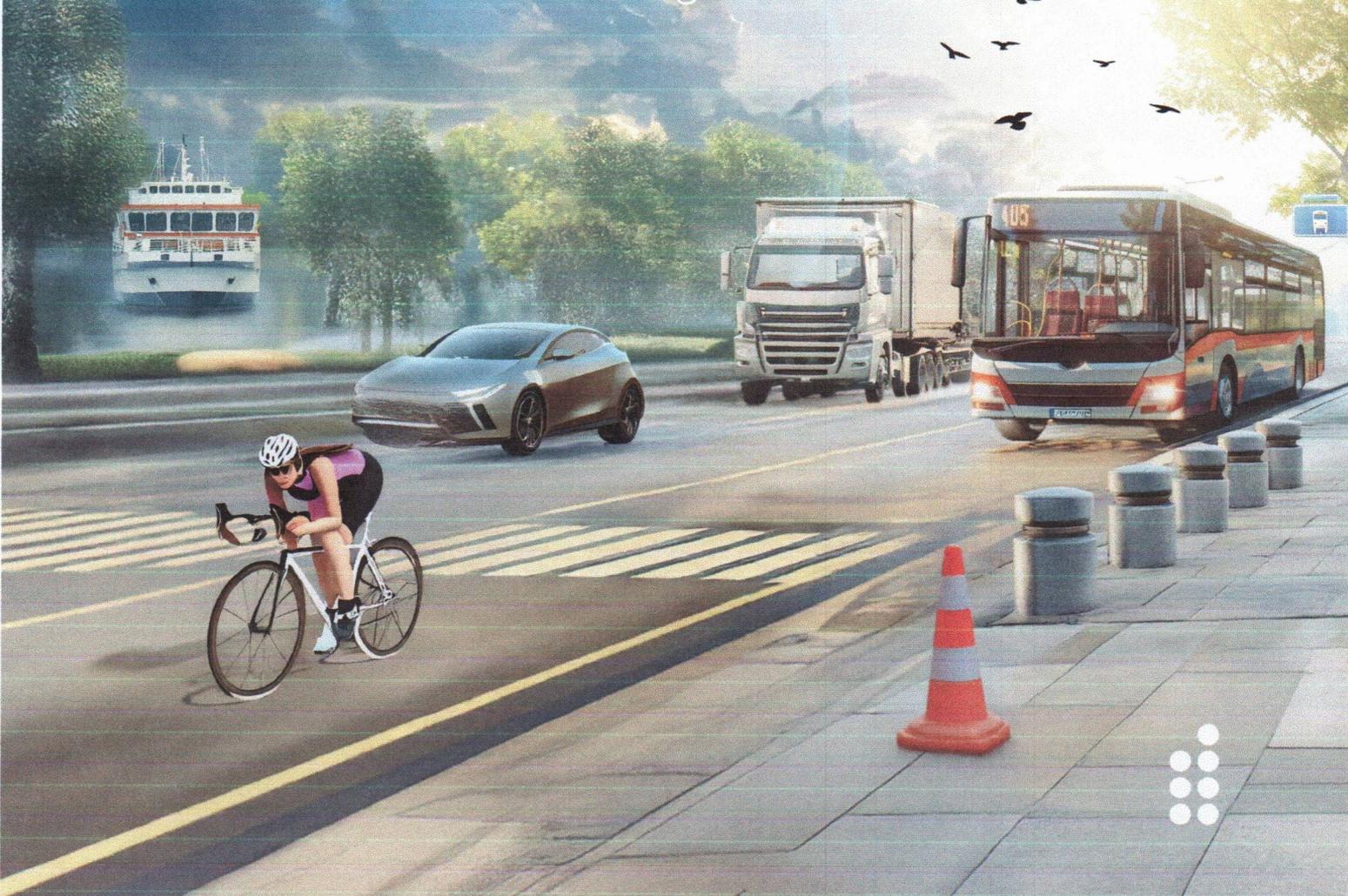
LAMPIRAN



RENCANA KINERJA TAHUNAN

20 25

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat



RENCANA KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6
2.	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	25
		IKK2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	55
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	60
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	16
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	82
4.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

Palembang, 2 Desember 2024

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA SELATAN



NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002



PERJANJIAN KINERJA
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Sumatera Selatan Tahun 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Perjanjian Kinerja
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Sumatera Selatan Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Nur Ida Fitrianti	Penyusun Rencana dan Pelaporan	06/01/2025	
2.	Diperiksa	Tulus Raharjo, A.TD., M.Si.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	06/01/2025	
3.	Disetujui	Tulus Raharjo, A.TD., M.Si.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	06/01/2025	
4.	Disetujui	Yuliana Y.S. Panjaitan	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	06/01/2025	
5.	Disetujui	Milfer Joneliy, S.Kom., M.Si.	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan	06/01/2025	
6.	Disetujui	Herry Saputra, S.SiT., M.Si.	Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	06/01/2025	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurhadi Unggul Wibowo, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Ahmad Yani, A.T.D., M.T

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 06 Januari 2025

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

AHMAD YANI, A.T.D., M.T
NIP. 19650930 199003 1 003

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan

NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurhadi Unggul Wibowo, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Ahmad Yani, A.T.D., M.T

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 06 Januari 2025

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

AHMAD YANI, A.T.D., M.T
NIP. 19650930 199003 1 003

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan

NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7
2.	SK2 Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	25
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	60
3.	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	16
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	82
4.	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5.	SK1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

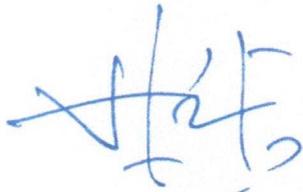
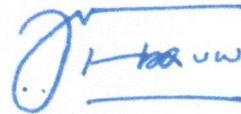
Kegiatan**Anggaran**

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	34.197.678.000,-
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	19.754.451.000,-
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	26.783.621.000,-
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	5.231.690.000,-
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	5.559.179.000,-
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp.	27.053.402.000,-

Disetujui

Palembang, 06 Januari 2025

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera SelatanAHMAD YANI, A.T.D., M.T
NIP. 19650930 199003 1 003NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

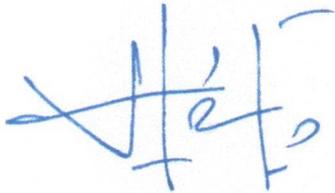
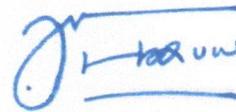
Kegiatan**Anggaran**

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	34.197.678.000,-
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	19.754.451.000,-
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	26.783.621.000,-
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	5.231.690.000,-
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	5.559.179.000,-
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp.	27.053.402.000,-

Disetujui

Palembang, 06 Januari 2025

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera SelatanAHMAD YANI, A.T.D., M.T
NIP. 19650930 199003 1 003NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tulus Raharjo, ATD., M.Si.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Nurhadi Unggul Wibowo, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, *dr* Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

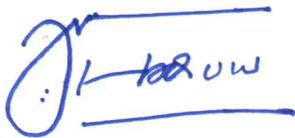
TULUS RAHARJO, ATD., M.Si.
NIP. 19680119 199301 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN TATA USAHA
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

Disetujui

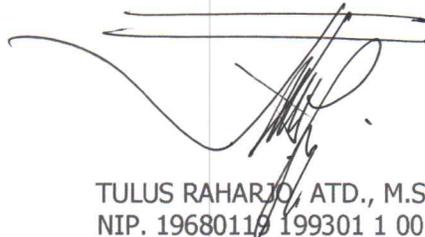
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan



NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

Palembang, 06 Januari 2025

Kepala Sub Bagian Tata Usaha



TULUS RAHARJO, ATD., M.Si.
NIP. 19680116 199301 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Milfer Joneliy, S.Kom., M.Si.

Jabatan : Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Nurhadi Unggul Wibowo, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 06 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan

NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

Pihak Pertama
Kepala Seksi
Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau,
Penyeberangan dan Pengawasan

MILFER JONELIY, S.Kom., M.Si.
NIP.19760215 200701 1 019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI LALU LINTAS JALAN, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.2	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	16
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	90

Disetujui

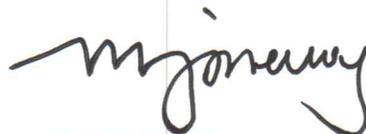
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan



NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

Palembang, 06 Januari 2025

Kepala Seksi
Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau,
Penyeberangan dan Pengawasan



MILFER JONELITY, S.Kom., M.Si.
NIP.19760215 200701 1 019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Herry Saputra, S.SiT., M.Si.

Jabatan : Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Nurhadi Unggul Wibowo, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 06 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan

NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

Pihak Pertama
Kepala Seksi
Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan
Penyeberangan

HERRY SAPUTRA, S.SiT., M.Si.
NIP. 19851025 200902 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI SARANA DAN ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan Jalan Nasional	%	100
		IKK1.3	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	<1000
		IKK7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	82
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	KK5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	90

Disetujui

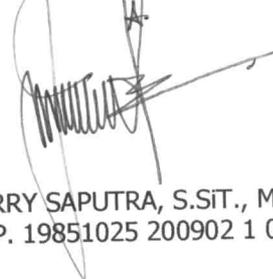
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan



NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

Palembang, 06 Januari 2025

Kepala Seksi
Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan
Penyeberangan



HERRY SAPUTRA, S.Si., M.Si.
NIP. 19851025 200902 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yuliana Y.S. Panjaitan

Jabatan : Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Nurhadi Unggul Wibowo, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, *06* Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan

NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

Pihak Pertama
Kepala Seksi
Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

YULIANA Y.S. PANJAITAN
NIP. 19790701 200112 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI PRASARANA JALAN, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK1.3	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi	Lokasi	7
		IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi	Lokasi	7
SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	25
		IKK2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	60
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	90

Disetujui

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan



NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

Palembang, 06 Januari 2025

Kepala Seksi
Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan



YULIANA Y.S. PANJAITAN
NIP. 19790701 200112 2 005

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												Anggaran	Total Anggaran	Penanggung Jawab			
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100	Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Jalan di Provinsi Sumatera Selatan	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	90	100	4,289,575,000	4,289,575,000	- Seksi Lalin - Seksi Sarana		
		2	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	12,664,171,000	12,664,171,000	- Seksi Prasarana		
		3	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	90	100	3,628,283,000	3,628,283,000	- Seksi Prasarana		
		3	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	2,840,280,000	2,840,280,000	Seksi Prasarana		
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	25	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	12,664,171,000	12,664,171,000	Seksi Prasarana		
		2	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	80	Pelaksanaan Pemenuhan SPM Kapal Angkutan Penyeberangan	6.66	13.33	20	26.66	33.33	40	46.66	53.33	60	66.66	73.33	80	8,800,000	8,800,000	Seksi Prasarana		
3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	1	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	20	40	60	80	80	80	80	80	80	80	80	1,250,000,000	20,186,000,000	Seksi Lalin		
						2	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	0	0	0	0	30	50	80	80	80	80	80	80			1,728,000,000	
						3	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	0	0	0	0	30	50	80	80	80	80	80	80			80	3,360,000,000
						4	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	10	20	30	40	50	70	80	80	80	80	80	80			13,848,000,000	
		2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	16	Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dan Operasional KPBU UPPKB	1.3	2.66	4	5.33	6.66	8	9.33	10.66	12	13.33	14.66	16	3,241,457,000	3,241,457,000	Seksi Lalin		
		3	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000	1	Pekan Nasional Keselamatan Jalan Provinsi Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	250,000,000	250,000,000	Seksi Sarana	
2	Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	107,143,000	107,143,000	Seksi Sarana		
					1	Monitoring Bidang Sarana Angkutan Jalan di Provinsi Sumatera Selatan	0	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	82	11,000,000	11,000,000	Seksi Sarana		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												Anggaran	Total Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		4 Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	82	2 Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Non Statis	0	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	82	75,700,000	75,700,000	Seksi Sarana
					3 Perawatan dan Pengkalibrasian Alat Uji Kendaraan Bermotor	0	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	82	254,300,000	254,300,000	Seksi Sarana
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1 Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan	0	8	16	25	32	40	48	60	68	75	80	90	5,211,890,000	38,538,731,000	- Seksi Lalin - Seksi Sarana - Subbag Tata Usaha
					2 Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan	0	8	16	25	32	40	48	60	68	75	80	90	26,279,820,000		
					3 Pengadaan Public Transport Information System (PTIS)	0	8	16	25	32	40	48	60	68	75	80	90	4,000,000,000		
					4 Pemeliharaan Local Port Service	0	8	16	25	32	40	48	60	68	75	80	90	250,000,000		
					5 Operasional dan Pemeliharaan Tug Boat dan Kapal Patroli	0	8	16	25	32	40	48	60	68	75	80	90	2,669,021,000		
					6 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	0	8	16	25	32	40	48	60	68	75	80	90	128,000,000		
5	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85	1 Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	0	8	16	25	32	40	48	60	68	75	80	85	5,431,179,000	32,484,581,000	Subbag Tata Usaha
					2 Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	0	8	16	25	32	40	48	60	68	75	80	85	27,053,402,000		Subbag Tata Usaha

Palembang, 6 Januari 2025
KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA SELATAN



NURHADI UNGGUL WIBOWO, ST.MT.
NIP. 19711116 199803 1 002

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-1				Realisasi Bulan-1		% Capaian Bulan-1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab						
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output %	Capaian Anggaran %									
								Volume (9)	% (10)	Volume (11)	% (12)	Volume (13)	Volume (14)	(15)	(16)									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)						
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Angkutan Perintis Provinsi Sumsel	Jumlah produksi ritase per bulan	Terpenuhinya pelayanan angkutan perintis yang dapat menjangkau daerah yang belum terdapat pelayanan angkutan umum	8	8%	357,464,583	8%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	- Seksi Lalin - Seksi Sarana					
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Data Realisasi Produksi di Terminal Tipe A	Pelaksanaan Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	7	100%	1,055,347,583	8%	7	79,955,552	100.0%	0.6%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana					
		IKK 1.4	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100	Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru	Data Progres Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pelabuhan	Tersedianya Pelabuhan Sungai Baru	8	100%	302,356,917	8%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana					
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Data Realisasi Produksi di Pelabuhan SDP	Pelaksanaan Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	7	100%	236,690,000	8%	7	43,951,059	100.0%	1.5%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana					
2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	25	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A	2	8%	1,055,347,583	8%	2	79,955,552	100.0%	0.6%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana					
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	60	Pelaksanaan Pemenuhan SPM Kapal Penyeberangan dan Pelabuhan Penyeberangan	Data Produksi Kapal dan Penumpang	Terpenuhinya SPM Kapal Penyeberangan	5	8%	733,333	8%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana					
3	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	1)	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang mendapatkan bantuan teknis	10	7%	104,166,667	8%	10	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin				
							2)	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan									Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
							3)	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan									Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
							3)	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prov. Sumsel	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan									Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	16	Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dan Operasional KPBU UPPKB	Data Pelanggaran UPPKB	Berkurangnya pelanggaran kendaraan <i>Over Dimension and Over Loading (ODOL)</i>	1.3	1%	270,121,417	8%	1.3	45,973,508	100.0%	1.4%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin					
IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000	1)	Pekan Keselamatan Jalan Provinsi Sumatera Selatan	Laporan Kegiatan Pekan Keselamatan Jalan	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan pekan keselamatan transportasi jalan	0	0%	20,833,333	8%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana						
2)	Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini	Laporan Kegiatan Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini	0	0%	8,928,583	8%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana										

		IKK7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	82	1	Monitoring Bidang Sarana Angkutan Jalan di Provinsi Sumatera Selatan	Data Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya standarisasi pengujian kendaraan bermotor	0	0%	916,667	8%	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana	
						2	Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Non Statis	Data Pelaksanaan Perawatan dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya standarisasi pengujian kendaraan bermotor	0	0%	6,308,333	8%	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana	
						3	Perawatan dan Pengkalibrasian Alat Uji Kendaraan Bermotor	Data Pelaksanaan Perawatan dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya standarisasi pengujian kendaraan bermotor		0%	21,191,667	8%	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana	
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1)	Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan	Data Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran	Tersedianya Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	0	0%	434,324,167	8%	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	-Seksi Lain -Seksi Sarana -Subbag TU	
						2)	Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan	Data Progres Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pelabuhan	Tersedianya Pelabuhan 1. Sungai Delta Upang 2. Sungai Salek	0	0%	2,189,985,000	8%	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif		
						3)	Pengadaan Public Transport Information System (PTIS)	Data Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Public Transport Information System (PTIS)	Tersedianya Public Transport Information System (PTIS)	0	0%	333,333,333	8%	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif		
						4)	Pemeliharaan Local Port Service	Laporan Progres Pelaksanaan Pemeliharaan Local Port Service	Tersedianya Local Port Service	0	0%	20,833,333	8%	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif		
						5)	Operasional dan Pemeliharaan Tug Boat dan Kapal Patroli	Data Realisasi Tug Boat dan Kapal Patroli	Operasional dan Pemeliharaan Kapal Patroli	0	0%	222,418,417	8%	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif		
						6)	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	Data Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Perangkat PPID	Tersedianya Perangkat Pengelola Data dan Informasi	0	0%	10,666,667	8%	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif		
5	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85	1)	Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	Data Pelaksanaan Operasional Kantor	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan perkantoran	0	0%	452,598,250	8%	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Subbag Tata Usaha	
						2)	Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	Data Layanan Perkantoran	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan perkantoran	0	0%	2,254,450,167	8%	8	3,362,293,911	100.0%	12.4%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Subbag Tata Usaha

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-2				Realisasi Bulan-2		% Capaian Bulan-2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab					
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran								
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)					
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Angkutan Perintis Provinsi Sumsel	Jumlah produksi ritase per bulan	Terpenuhinya pelayanan angkutan perintis yang dapat menjangkau daerah yang belum terdapat pelayanan angkutan umum	16	17%	714,929,167	17%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	- Seksi Lalin - Seksi Sarana				
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Data Realisasi Produksi di Terminal Tipe A	Pelaksanaan Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	7	100%	2,110,695,167	17%	7	1,174,694,252	100.0%	9.3%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana				
		IKK 1.5	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100	Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru	Data Progres Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pelabuhan	Tersedianya Pelabuhan Sungai Baru	16	100%	604,713,833	17%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana				
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Data Realisasi Produksi di Pelabuhan SDP	Pelaksanaan Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	7	100%	473,380,000	17%	7	321,315,019	100.0%	11.3%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana				
2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	25	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A	4	17%	2,110,695,167	17%	31.56	1,174,694,252	789.0%	9.3%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana				
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	60	Pelaksanaan Pemenuhan SPM Kapal Penyeberangan dan Pelabuhan Penyeberangan	Data Produksi Kapal dan Penumpang	Terpenuhinya SPM Kapal Penyeberangan	10	17%	1,466,667	17%	60.89	0	608.9%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana				
3	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	1)	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang mendapatkan bantuan teknis	20	13%	208,333,333	17%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin			
						2)	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan									0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
						3)	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan									0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
						3)	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prov. Sumsel	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan									0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	16	Operasional Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dan Operasional KPBU UPPKB	Data Pelanggaran UPPKB	Berkurangnya pelanggaran kendaraan <i>Over Dimension and Over Loading (ODOL)</i>	2.6	3%	540,242,833	17%	26	457,097,004	1000.0%	14.1%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin				
1)	Pekan Keselamatan Jalan Provinsi Sumatera Selatan	Laporan Kegiatan Pekan Keselamatan Jalan	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan pekan keselamatan transportasi jalan	0	0%	41,666,667	17%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana									

		IKK 3.5	yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000	2)	Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini	Laporan Kegiatan Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini	0	0%	17,857,167	17%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana	
		IKK7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	82	1	Monitoring Bidang Sarana Angkutan Jalan di Provinsi Sumatera Selatan	Data Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya standarisasi pengujian kendaraan bermotor		14%	1,833,333	17%		0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana	
						2	Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Non Statis	Data Pelaksanaan Perawatan dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya standarisasi pengujian kendaraan bermotor	10	14%	12,616,667	17%	76.50%		0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana
						3	Perawatan dan Pengkalibrasian Alat Uji Kendaraan Bermotor	Data Pelaksanaan Perawatan dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya standarisasi pengujian kendaraan bermotor		14%	42,383,333	17%			0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1)	Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan	Data Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran	Tersedianya Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran		15%	868,648,333	17%	26.61	51,205,000	332.6%	1.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	-Seksi Lalin -Seksi Sarana -Seksi Prasarana -Subbag TU	
						2)	Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan	Data Progres Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pelabuhan	Tersedianya Pelabuhan 1. Sungai Delta Upang 2. Sungai Salek		15%	4,379,970,000	17%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif		
						3)	Pengadaan Public Transport Information System (PTIS)	Data Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Public Transport Information System (PTIS)	Tersedianya Public Transport Information System (PTIS)	8	15%	666,666,667	17%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif		
						4)	Pemeliharaan Local Port Service	Laporan Progres Pelaksanaan Pemeliharaan Local Port Service	Tersedianya Local Port Service		15%	41,666,667	17%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif		
						5)	Operasional dan Pemeliharaan Tug Boat dan Kapal Patroli	Data Realisasi Tug Boat dan Kapal Patroli	Operasional dan Pemeliharaan Kapal Patroli		15%	444,836,833	17%	8	40,200,640	100.0%	1.5%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif		
						6)	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	Data Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Perangkat PPIID	Tersedianya Perangkat Pengelola Data dan Informasi		15%	21,333,333	17%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif		
5	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85	1)	Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	Data Pelaksanaan Operasional Kantor	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan perkantoran	8	14%	905,196,500	17%	20.80	325,760,315	260.0%	6.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Subbag Tata Usaha	
						2)	Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	Data Layanan Perkantoran	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan perkantoran	8	14%	4,508,900,333	17%	20.80	5,617,848,585	100.0%	20.8%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Subbag Tata Usaha	

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-3				Realisasi Bulan-3		% Capaian Bulan-3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
								Volume (9)	% (10)	Volume (11)	% (12)	Volume (13)	Volume (14)	% (15)	% (16)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antar moda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keberintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Angkutan Perintis Provinsi Sumsel	Kumulatif persentase produksi ritase keberintisan angkutan jalan	Terpenuhinya pelayanan angkutan jalan perintis di Provinsi Sumatera Selatan yang dapat menjangkau daerah yang belum terdapat pelayanan angkutan umum	24	25%	1.072.393.750	25%	6,56	1.941.614.955	27,3%	45,3%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin Seksi Sarana
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan	Pelaksanaan Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	7	100%	3.166.042.750	25%	7	3.040.557.986	100,0%	24,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
		IKK 1.5	Persentase Pelaksanaan Keberintisan Angkutan Penyeberangan	%	100	Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru	Kumulatif persentase trip angkutan penyeberangan	Terpenuhinya pelayanan angkutan penyeberangan perintis di Provinsi Sumatera Selatan	24	100%	907.070.750	25%	16,51	1.779.676.000	68,8%	49,1%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Provinsi Sumatera Selatan	Pelaksanaan Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	7	100%	710.070.000	25%	7	592.749.013	100,0%	20,9%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	25	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Jumlah rata-rata persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A	6	25%	3.166.042.750	25%	32,14	3.040.557.986	535,7%	24,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	60	Pelaksanaan Pemenuhan SPM Kapal Penyeberangan dan Pelabuhan Penyeberangan	Jumlah rata-rata persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	15	25%	2.200.000	25%	61,51	0	410,1%	0,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
3	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	1) Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan 2) Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan 3) Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 3) Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prov. Sumsel	Jumlah rata-rata persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Terpasangnya perlengkapan jalan di Kabupaten/Kota yang mendapatkan bantuan teknis perlengkapan jalan	20%	312.500.000	25%	0	0,0%	0,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin		
								Terpasangnya perlengkapan jalan di Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK)	20%	432.000.000	25%	0	0,0%	0,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin		
								Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang membutuhkan pemeliharaan perlengkapan jalan	20%	840.000.000	25%	0	0,0%	0,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin		
								Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi prioritas untuk dipasang perlengkapan jalan	20%	3.462.000.000	25%	0	0,0%	0,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin		
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	16	Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dan Operasional KPBU UPPKB	Jumlah rata-rata persentase angkutan barang yang melakukan pelanggaran dan dilakukan tindakan penilangan di UPPKB yang beroperasi	Tercapainya penurunan pelanggaran <i>Over Dimension and Over Loading (ODOL)</i> pada angkutan barang yang masuk ke UPPKB	4	4%	810.364.250	25%	157,38	685.581.120	-3734,5%	21,2%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-3				Realisasi Bulan-3		% Capaian Bulan-3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000	1)	Pekan Keselamatan Jalan Provinsi Sumatera Selatan	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi keselamatan transportasi jalan	Terlaksananya kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKJ)	0	0%	62.500.000	25%	0	0	0,0%	0,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana
						2)	Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini		Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini	0	0%	26.785.750	25%	0	0	0,0%	0,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana
						1)	Monitoring Bidang Sarana Angkutan Jalan di Provinsi Sumatera Selatan	Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang telah melaksanakan akreditasi Unit Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	Terpenuhinya standarisasi pengujian kendaraan bermotor melalui akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	15	21%	2.750.000	25%	100,00%	0	0,0%	0,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana
		2)	Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Non Statis			15	21%	18.925.000	25%	0	0,0%	0,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana					
		3)	Perawatan dan Pengkalibrasian Alat Uji Kendaraan Bermotor			15	21%	63.575.000	25%	0	0,0%	0,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana					
		IKK7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	82															
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1)	Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan	Ketepatan waktu pelaporan dokumen perencanaan (LKIP, PK, pengisian e-planning dan e-performance)	Terlaksananya pelaporan dokumen perencanaan tepat waktu (LKIP, PK, pengisian e-planning dan e-performance)	16	23%	1.302.972.500	25%	26,50	51.205.000	165,6%	1,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	-Seksi Lain -Seksi Sarana -Subbag TU
						2)	Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan	Laporan Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan (Sungai Delta Upang dan Sungai Salek)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan (Sungai Delta Upang dan Sungai Salek)	16	23%	6.569.955.000	25%	0	0	0,0%	0,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	
						3)	Pengadaan Public Transport Information System (PTIS)	Data Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Public Transport Information System (PTIS)	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Public Transport Information System (PTIS)	16	23%	1.000.000.000	25%	0	0	0,0%	0,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	
						4)	Pemeliharaan Local Port Service	Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Local Port Service (LPS)	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Local Port Service (LPS)	16	23%	62.500.000	25%	0	0	0,0%	0,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	
						5)	Operasional dan Pemeliharaan Tug Boat dan Kapal Patroli	Laporan Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Tug Boat dan Kapal Patroli	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Tug Boat dan Kapal Patroli	16	23%	667.255.250	25%	3,125	79.966.990	19,5%	3,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	
						6)	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	Laporan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	16	23%	32.000.000	25%	0	0	0,0%	0,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	
5	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85	1)	Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	Nilai Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran dan Ketersediaan BMN	Terlaksananya Penilaian Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran dan Tingkat Ketersediaan BMN	16	21%	1.357.794.750	25%	55,00	442.876.190	343,8%	8,2%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Subbag Tata Usaha
						2)	Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)			16	21%	6.763.350.500	25%	55,00	8.602.276.272	100,0%	31,8%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Subbag Tata Usaha



REVISI I PERJANJIAN KINERJA
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Sumatera Selatan Tahun 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi I Perjanjian Kinerja
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Sumatera Selatan Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Nur Ida Fitrianti	Penyusun Rencana dan Pelaporan	11/06/2025	
2.	Diperiksa	Tulus Raharjo, A.TD., M.Si.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	11/06/2025	
3.	Disetujui	Tulus Raharjo, A.TD., M.Si.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	11/06/2025	
4.	Disetujui	Yuliana Y.S. Panjaitan	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	11/06/2025	
5.	Disetujui	Milfer Jonely, S.Kom., M.Si.	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan	11/06/2025	
6.	Disetujui	Herry Saputra, S.SiT., M.Si.	Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	11/06/2025	



REVISI I PERJANJIAN KINERJA
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Sumatera Selatan Tahun 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi I Perjanjian Kinerja
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Sumatera Selatan Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Nur Ida Fitrianti	Penyusun Rencana dan Pelaporan	11/06/2025	
2.	Diperiksa	Tulus Raharjo, A.TD., M.Si.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	11/06/2025	
3.	Disetujui	Tulus Raharjo, A.TD., M.Si.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	11/06/2025	
4.	Disetujui	Yuliana Y.S. Panjaitan	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	11/06/2025	
5.	Disetujui	Milfer Jonely, S.Kom., M.Si.	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan	11/06/2025	
6.	Disetujui	Herry Saputra, S.SiT., M.Si.	Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	11/06/2025	



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurhadi Unggul Wibowo, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 11 Juni 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan

Dr. Drs. AAN SUHANAN M.Si.

NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurhadi Unggul Wibowo, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 11 Juni 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan

Dr. Drs. AAN SUHANAN M.Si.

NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1.	SK2 Meningkatkan konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	4
2.	SK 3 Meningkatkan konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 3.1 Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A	Kegiatan	7
		IKK 3.2 Jumlah terminal tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	7
3.	SK 5 Meningkatkan rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK 5 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	3
		IKK 6 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Trayek	1
4.	SK 6 Meningkatkan rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan sungai dan danau	IKK 7 Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	3
5.	SK 7 Meningkatkan pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 7.2 Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM	Unit	7
		IKK 7.4 Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM	Unit	3
		IKK 7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	6
		IKK 7.6 Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas <i>Event</i> Khusus	Kegiatan	2
6.	SK 8 Meningkatkan Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK 8.2 Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Unit	3
		IKK 8.4 Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Unit	1
		IKK 8.5 Operasional layanan Kapal Kerja sesuai SPM	Unit	1
		IKK 8.6 Operasional dan pemeliharaan pengawasan OTP di	Unit	1

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pelabuhan Penyeberangan		
7.	SK 9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.1 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Kegiatan	7
		IKK 9.2 Jumlah kegiatan pengawasan operasional angkutan barang	Kegiatan	3
		IKK 9.3 Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan	Unit	3
8.	SK 10 Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi <i>active</i> dan <i>passive safety</i>	IKK 10.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Kegiatan	1
		IKK 10.2 Jumlah kegiatan terkait kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan	12
9.	SK 11 Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 11.1 Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis	Unit	5.967
		IKK 11.2 Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman	Lokasi	4
10.	SK 12 Meningkatnya kesadaran & <i>attitude</i> pengguna jalan berkeselamatan	IKK 12.1 Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	150
		IKK 12.2 Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	180
11.	SK 4 Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub	IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3
		IKK 4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1
		IKK 4.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Dokumen	2
		IKK 4.4 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		IKK 4.5 Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	2
		IKK 4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	2
		IKK 4.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	5
		IKK 4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	2
		IKK 4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	1
		IKK 4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	9

Kegiatan

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	34.197.678.000,-
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	19.754.451.000,-
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	26.783.621.000,-
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	5.231.690.000,-
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	5.559.179.000,-
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp.	27.053.402.000,-

Anggaran

Disetujui

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Dr. Drs. AAN SUHANAN M.Si.

Palembang, 11 Juni 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan



NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		IKK 4.5 Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	2
		IKK 4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	2
		IKK 4.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	5
		IKK 4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	2
		IKK 4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	1
		IKK 4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	9

Kegiatan

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	34.197.678.000,-
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	19.754.451.000,-
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	26.783.621.000,-
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	5.231.690.000,-
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	5.559.179.000,-
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp.	27.053.402.000,-

Anggaran

Disetujui

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Dr. Drs. AAN SUHANAN M.Si.

Palembang, 11 Juni 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan



NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

Lampiran I Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
BPTD Kelas II Sumatera Selatan
Nomor :
Tanggal :

Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dengan terjadinya perubahan regulasi Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat sesuai PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, pergantian Pimpinan, perubahan / pergeseran anggaran, serta perubahan beberapa target Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan yang mengacu pada Renstra Ditjen Perhubungan Darat 2025–2029, maka mengakibatkan disesuaikan kembali Perjanjian Kinerja pada Bulan Juni 2025 berdasarkan Revisi DIPA ke-3 tanggal 24 April 2025.

Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan dengan total anggaran sebesar Rp. 118.580.021.000,- (*Seratus Delapan Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*).

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	SK2 Meningkatkan konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	4	- Seksi Sarana AJSDP - Seksi Lalu Lintas JSDPP
2.	SK 3 Meningkatkan konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 3.1 Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A	Kegiatan	7	- Seksi Lalu Lintas JSDPP
		IKK 3.2 Jumlah terminal tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	7	- Seksi Prasarana JSDP
3.	SK 5 Meningkatkan rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK 5 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	3	- Seksi Prasarana JSDP
		IKK 6 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Trayek	1	- Seksi Sarana AJSDP
4.	SK 6 Meningkatkan rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan sungai dan danau	IKK 7 Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	3	- Seksi Prasarana JSDP
5.	SK 7 Meningkatkan pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 7.2 Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM	Unit	7	- Seksi Prasarana JSDP
		IKK 7.4 Jumlah operasional layanan Fasilitas	Unit	3	- Seksi Prasarana JSDP

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penimbangan KB sesuai SPM			
		IKK 7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	6	- Subbag Tata Usaha - Seksi Prasarana JSDP - Seksi Sarana AJSDP - Seksi Lalu Lintas JSDPP
		IKK 7.6 Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas <i>Event</i> Khusus	Kegiatan	2	- Seksi Lalu Lintas JSDPP
6.	SK 8 Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK 8.2 Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Unit	3	- Seksi Prasarana JSDP
		IKK 8.4 Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Unit	1	- Seksi Prasarana JSDP
		IKK 8.5 Operasional layanan Kapal Kerja sesuai SPM	Unit	1	- Seksi Lalu Lintas JSDPP
		IKK 8.6 Operasional dan pemeliharaan pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan	Unit	1	- Seksi Lalu Lintas JSDPP
7.	SK 9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.1 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Kegiatan	7	- Seksi Lalu Lintas JSDPP
		IKK 9.2 Jumlah kegiatan pengawasan operasional angkutan barang	Kegiatan	3	- Seksi Lalu Lintas JSDPP
		IKK 9.3 Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasionalkan untuk mendukung Keselamatan	Unit	3	- Seksi Prasarana JSDP
8.	SK 10 Meningkatnya kepatuhan kendaraan	IKK 10.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun	Kegiatan	1	- Seksi Sarana AJSDP

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	bermotor memenuhi <i>active</i> dan <i>passive safety</i>	Kendaraan sesuai dengan pedoman			
		IKK 10.2 Jumlah kegiatan terkait kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan	12	- Seksi Sarana AJSDP
9.	SK 11 Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 11.1 Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis	Unit	5.967	- Seksi Lalu Lintas JSDPP
		IKK 11.2 Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman	Lokasi	4	- Seksi Lalu Lintas JSDPP
10.	SK 12 Meningkatnya kesadaran & <i>attitude</i> pengguna jalan berkeselamatan	IKK 12.1 Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	150	- Seksi Sarana AJSDP
		IKK 12.2 Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	180	- Seksi Sarana AJSDP
11.	SK 4 Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub	IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	- Subbag Tata Usaha
		IKK 4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1	- Subbag Tata Usaha
		IKK 4.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Dokumen	2	- Subbag Tata Usaha
		IKK 4.4 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen	Kegiatan	3	- Subbag Tata Usaha

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PIC
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
		Perhubungan Darat			
		IKK 4.5 Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	2	- Subbag Tata Usaha
		IKK 4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	2	- Subbag Tata Usaha
		IKK 4.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	5	- Subbag Tata Usaha
		IKK 4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	2	- Subbag Tata Usaha
		IKK 4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	1	- Subbag Tata Usaha
		IKK 4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	9	- Subbag Tata Usaha

Lampiran Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Definisi	Satuan	Target Revisi I PK 2025	Kegiatan	Volume	Sumber Data
1.	SK2 Meningkatkan konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK2.1 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan Definisi: Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan merupakan Layanan Subsidi Perintis Trayek Terminal Simpang Periuk – Simpang 9 Cecar, Terminal Simpang Periuk – Muara Rupit – Simpang Nibung, Terminal Simpang Periuk – Karang Dapo – Rawas Ilir, Terminal Jakabaring – Mariana – Muara Padang.	Trayek	4	Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	4 (empat) trayek di Provinsi Sumsel meliputi: 1. Terminal Jakabaring – Mariana – Muara Padang; 2. Terminal Simpang Periuk – SP. 9 Cecar; 3. Terminal Simpang Periuk – Muara Rupit – Simpang Nibung; 4. Simpang Periuk – Rupit – Karang Dapo – Rawas Ilir.	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Sarana AJSDP • Seksi Lalu Lintas JSDPP
2.	SK 3 Meningkatkan konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK,	IKK 3.1 Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A Definisi: Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap	Kegiatan	7	1. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan; 2. Monitoring Pengendalian	1. Monitoring dan Evaluasi layanan AKAP pada Terminal Tipe A Alang - Alang Lebar; 2. Monitoring dan Evaluasi layanan AKAP pada	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Lalu Lintas JSDPP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Definisi	Satuan	Target Revisi I PK 2025	Kegiatan	Volume	Sumber Data
	KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	Terminal Tipe A merupakan Monitoring dan Evaluasi layanan Antar Kota Antar Provinsi pada Terminal Tipe A Alang - Alang Lebar, Karya Jaya, Kayu Agung, Batu Kuning, Batay, Simpang Periuk dan Betung.			Sarana dan Angkutan; 3. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas; dan 4. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas.	Terminal Tipe A Karya Jaya; 3. Monitoring dan Evaluasi layanan AKAP pada Terminal Tipe A Kayu Agung; 4. Monitoring dan Evaluasi layanan AKAP pada Terminal Tipe A Batu Kuning; 5. Monitoring dan Evaluasi layanan AKAP pada Terminal Tipe A Batay; 6. Monitoring dan Evaluasi layanan AKAP pada Terminal Tipe A Simpang Periuk; dan 7. Monitoring dan Evaluasi layanan AKAP pada Terminal Tipe A Betung;	
		IKK 3.2 Jumlah terminal tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas Definisi: Jumlah terminal tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas merupakan Pembangunan Terminal Penumpang yang menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan Keamanan yang meliputi fasilitas utama dan fasilitas	Unit	7	Pengoperasian 7 (tujuh) Terminal Penumpang Tipe A	7 (tujuh) unit Terminal Tipe A yang beroperasi meliputi: 1. Pengoperasian Terminal Tipe A Alang-alang Lebar; 2. Pengoperasian Terminal Tipe A Karya Jaya; 3. Pengoperasian Terminal Tipe A Kayu Agung; 4. Pengoperasian Terminal Tipe A Batu Kuning; 5. Pengoperasian Terminal Tipe A Batay;	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Prasarana JSDP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Definisi	Satuan	Target Revisi I PK 2025	Kegiatan	Volume	Sumber Data
		penunjang. Pengoperasian Terminal Penumpang meliputi kegiatan Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan operasional Terminal.				6. Pengoperasian Terminal Tipe A Simpang Periuik; dan 7. Pengoperasian Terminal Tipe A Betung.	
3.	SK 5 Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	<p>IKK 5 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas</p> <p>Definisi: Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas merupakan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan sesuai dengan rancangan desain teknis yang telah ditetapkan dan pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan yang dioperasikan untuk melayani angkutan penyeberangan yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan.</p>	Unit	3	Pengoperasian 3 (tiga) Pelabuhan Penyeberangan	3 (tiga) Unit Pelabuhan Penyeberangan meliputi: 1. Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api; 2. Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Sri Menanti; dan 3. Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Karang Baru.	<ul style="list-style-type: none"> Seksi Prasarana JSDP
		<p>IKK 6 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP</p> <p>Definisi: Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP</p>	Trayek	1	Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas Nasional)	1 (satu) Trayek Sri Menanti – Karang Baru	<ul style="list-style-type: none"> Seksi Sarana AJSDP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Definisi	Satuan	Target Revisi I PK 2025	Kegiatan	Volume	Sumber Data
		merupakan layanan subsidi perintis angkutan penyeberangan pada trayek Sri Menanti – Karang Baru.					
4.	SK 6 Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan sungai dan danau	IKK 7 Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas Definisi: Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas merupakan melaksanakan pekerjaan pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai dengan rancangan desain teknis yang telah ditetapkan dan pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang dioperasikan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau di Provinsi Sumatera Selatan.	Unit	3	Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan (Prioritas Nasional)	2 Unit Pelabuhan Sungai yaitu: 1. Pembangunan Pelabuhan Sungai Upang Tahap II; 2. Pembangunan Pelabuhan Sungai Salek Tahap II; dan 3. Pengoperasian Pelabuhan Sungai Lumpur.	<ul style="list-style-type: none"> Seksi Prasarana JSDP
5.	SK 7 Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 7.2 Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM Definisi: Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM merupakan penyelenggaraan	Unit	7	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	7 (tujuh) Unit Terminal Tipe A yang melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terminal meliputi: 1. Pemenuhan SPM di Terminal Tipe A Alang-alang Lebar;	<ul style="list-style-type: none"> Seksi Prasarana JSDP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Definisi	Satuan	Target Revisi I PK 2025	Kegiatan	Volume	Sumber Data
		<p>terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan bermotor umum untuk angkutan lintas batas negara dan/ atau angkutan antarkota antarprovinsi sesuai dengan pedoman bagi penyelenggaraan terminal angkutan jalan dalam memberikan pelayanan jasa kepada seluruh pengguna terminal.</p>				<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemenuhan SPM di Terminal Tipe A Karya Jaya; 3. Pemenuhan SPM di Terminal Tipe A Kayu Agung; 4. Pemenuhan SPM di Terminal Tipe A Batu Kuning; 5. Pemenuhan SPM di Terminal Tipe A Batay; 6. Pemenuhan SPM di Terminal Tipe A Simpang Periuk; dan 7. Pemenuhan SPM di Terminal Tipe A Betung. 	
		<p>IKK 7.4 Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM</p> <p>Definisi: Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM merupakan penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan oleh UPPKB terhadap mobil barang menggunakan alat penimbangan, baik yang terpasang tetap maupun yang dapat dipindahkan sesuai dengan pedoman bagi penyelenggaraan UPPKB dalam melaksanakan</p>	Unit	3	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	<p>3 (tiga) unit layanan fasilitas penimbangan KB sesuai SPM dan beroperasi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan SPM UPPKB Merapi (Beroperasi); 2. Pemenuhan SPM UPPKB Talang Kelapa (Beroperasi); dan 3. Pemenuhan SPM UPPKB Kertapati (Beroperasi). 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Prasarana JSDP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Definisi	Satuan	Target Revisi I PK 2025	Kegiatan	Volume	Sumber Data
		pengawasan dan pengamanan jalan kepada seluruh pengguna UPPKB.					
		<p>IKK 7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok</p> <p>Definisi: Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPTD sebagaimana PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.</p>	Kegiatan	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan; 2. Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan; 3. Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana; 4. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas; 5. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas; dan 6. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan. 	<p>6 (enam) Kegiatan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan; 2. Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan; 3. Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana; 4. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas; 5. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas; dan 6. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Subbag Tata Usaha • Seksi Prasarana JSDP • Seksi Sarana AJSDP • Seksi Lalu Lintas JSDPP
		<p>IKK 7.6 Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas <i>Event</i> Khusus</p> <p>Definisi: Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Event Khusus merupakan kegiatan pengawasan lalu lintas pada waktu tertentu yaitu pada masa angkutan lebaran dan</p>	Kegiatan	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Pengawasan Angkutan Lebaran; dan 2. Monitoring dan Pengawasan Angkutan Natal dan Tahun Baru. 	<p>2 (dua) Kegiatan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Pengawasan Angkutan Lebaran; dan 2. Monitoring dan Pengawasan Angkutan Natal dan Tahun Baru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Lalu Lintas JSDPP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Definisi	Satuan	Target Revisi I PK 2025	Kegiatan	Volume	Sumber Data
		angkutan natal dan tahun baru.					
6.	SK 8 Meningkatnya Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP	<p>IKK 8.2 Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM</p> <p>Definisi: Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM merupakan penyelenggaraan Pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul untuk menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya sesuai dengan persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa.</p>	Unit	3	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	3 (tiga) unit layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM meliputi: 1. Pemenuhan SPM Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api; 2. Pemenuhan SPM Pelabuhan Penyeberangan Sri Menanti; dan 3. Pemenuhan SPM Pelabuhan Penyeberangan Karang Baru.	<ul style="list-style-type: none"> Seksi Prasarana JSDP
		<p>IKK 8.4 Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM</p> <p>Definisi: Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM Merupakan penyelenggaraan Pelabuhan yang digunakan untuk</p>	Unit	1	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	1 (satu) unit Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM yaitu Pemenuhan SPM Pelabuhan Sungai Lumpur.	<ul style="list-style-type: none"> Seksi Prasarana JSDP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Definisi	Satuan	Target Revisi I PK 2025	Kegiatan	Volume	Sumber Data
		melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau sesuai dengan persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa.					
		<p>IKK 8.5 Operasional layanan Kapal Kerja sesuai SPM</p> <p>Definisi: Operasional layanan Kapal Kerja sesuai SPM merupakan Kegiatan Operasional kapal kerja diProvinsi Sumatera Selatan (Operasional dan Pemeliharaan Kapal Patroli).</p>	Unit	1	Operasional dan Pemeliharaan Tug Boat dan Kapal Patroli	1 (satu) Unit Operasional kapal kerja KNP 207 di Provinsi Sumatera Selatan	<ul style="list-style-type: none"> Seksi Lalu Lintas JSDPP
		<p>IKK 8.6 Operasional dan pemeliharaan pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan</p> <p>Definisi: Operasional dan pemeliharaan pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan merupakan Kegiatan Operasional Pengawasan OTP di Provinsi Sumatera Selatan (Pemeliharaan dan Operasional Local Port Service (LPS) Tj. Api-Api).</p>	Unit	1	Pemeliharaan Local Port Service (LPS)	1 (satu) Unit Operasional Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api	<ul style="list-style-type: none"> Seksi Lalu Lintas JSDPP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Definisi	Satuan	Target Revisi I PK 2025	Kegiatan	Volume	Sumber Data
7.	SK 9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.1 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata. Definisi: Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP merupakan kegiatan <i>Ramph Check</i> angkutan AKAP yang dilaksanakan di Terminal Tipe A.	Kegiatan	7	1. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas; dan 2. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas.	7 (tujuh) kegiatan meliputi; 1. Pengawasan Operasional AKAP di Terminal Tipe A Alang-Alang Lebar; 2. Pengawasan Operasional AKAP di Terminal Tipe A Karya Jaya; 3. Pengawasan Operasional AKAP di Terminal Tipe A Kayu Agung; 4. Pengawasan Operasional AKAP di Terminal Tipe A Batu Kuning; 5. Pengawasan Operasional AKAP di Terminal Tipe A Batay; 6. Pengawasan Operasional AKAP di Terminal Tipe A Simpang Periuik; dan 7. Pengawasan Operasional AKAP di Terminal Tipe A Betung.	<ul style="list-style-type: none"> Seksi Lalu Lintas JSDPP
		SK 9.2 Jumlah kegiatan pengawasan operasional angkutan barang Definisi: Jumlah kegiatan pengawasan operasional angkutan barang Merupakan kegiatan pengendalian dan pelaksanaan operasional angkutan barang di UPPKB	Kegiatan	3	Pengoperasian 3 (tiga) UPPKB	3 (tiga) kegiatan pengawasan operasional angkutan barang meliputi: 1. Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang di UPPKB Talang Kelapa; 2. Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang di UPPKB Kertapati; dan	<ul style="list-style-type: none"> Seksi Lalu Lintas JSDPP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Definisi	Satuan	Target Revisi I PK 2025	Kegiatan	Volume	Sumber Data
						3. Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang di UPPKB Merapi.	
		SK 9.3 Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan Definisi: Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan merupakan kegiatan Pembangunan dan/atau pengoperasian fasilitas penimbangan yang digunakan untuk melakukan fungsi pencatatan, pengawasan, dan penindakan Angkutan Barang.	Unit	3	1. Pengoperasian Fasilitas Penimbangan (UPPKB); dan 2. Kerjasama Pengelolaan Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua.	3 (tiga) unit fasilitas penimbangan yang dibangun dan/atau dioperasikan untuk mendukung keselamatan meliputi: 1. Pengoperasian Fasilitas Penimbangan (UPPKB Merapi); 2. Pengoperasian Fasilitas Penimbangan (UPPKB Talang Kelapa); dan 3. Pengoperasian Fasilitas Penimbangan (UPPKB Kertapati).	<ul style="list-style-type: none"> Seksi Prasarana JSDP
8.	SK 10 Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK 10.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman. Definisi: Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman merupakan kegiatan pemeriksanaan fisik rancang bangun kendaraan bermotor	Kegiatan	1	1. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan; dan 2. Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan.	1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> Seksi Sarana AJSDP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Definisi	Satuan	Target Revisi I PK 2025	Kegiatan	Volume	Sumber Data
		dan perawatan dan pengkalibrasian alat uji.					
		<p>IKK 10.2</p> <p>Jumlah kegiatan terkait kalibrasi alat uji berkala di daerah</p> <p>Definisi: Jumlah kegiatan terkait kalibrasi alat uji berkala UPUBKB di daerah merupakan Kegiatan kalibrasi alat uji berkala di Provinsi Sumatera Selatan (Kota Palembang, Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Ilir, Kab. Lahat, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Muara Enim, Kab. Musi Rawas, dan Kab. Ogan Komering Ilir), Pemeliharaan Alat Kalibrasi dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor, dan Perawatan dan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor Non Statis.</p>	Kegiatan	12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan; dan 2. Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan. 	<p>12 (dua belas) kegiatan terkait kalibrasi alat uji berkala di daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala UPUBKB di Kota Palembang; 2. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala UPUBKB di Kabupaten Banyuasin; 3. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala UPUBKB di Kabupaten Musi Banyuasin; 4. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala UPUBKB di Kabupaten Ogan Ilir; 5. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala UPUBKB di Kabupaten Lahat; 6. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala UPUBKB di Kabupaten Ogan Komering Ulu; 7. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala UPUBKB di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; 8. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala UPUBKB di Kabupaten Muara Enim; 9. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala UPUBKB di Kabupaten Musi Rawas; 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Sarana AJSDP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Definisi	Satuan	Target Revisi I PK 2025	Kegiatan	Volume	Sumber Data
						10. Kegiatan kalibrasi alat uji berkala UPUBKB di Kabupaten Ogan Komering Ilir; 11. Pemeliharaan Alat Kalibrasi dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor; dan 12. Perawatan dan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor Non Statis.	
9.	SK 11 Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 11.1 Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis Definisi: Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis merupakan kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan meliputi: - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Pada Ruas Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan; - Pengadaan dan Pemasangan Bantuan	Unit	5.967	1. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional; 2. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional; dan 3. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.	Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun meliputi: 1. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional sebanyak 4.202 Unit; 2. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional sebanyak 719 Unit; 3. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan sebanyak 1.046 Unit.	<ul style="list-style-type: none"> Seksi Lalu Lintas JSDPP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Definisi	Satuan	Target Revisi I PK 2025	Kegiatan	Volume	Sumber Data	
		<p>Teknis Perlengkapan Jalan pada ruas jalan Provinsi Kabupaten Poros Desa di Provinsi Sumatera Selatan;</p> <p>- Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Provinsi Sumatera Selatan.</p>						
		<p>IKK 11.2</p> <p>Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman</p> <p>Definisi: Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman merupakan Kegiatan Pemasangan LRK pada ruas jalan di Sumatera Selatan</p>	Lokasi	4	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) (Prioritas Nasional)	<p>4 (empat) lokasi LRK di Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasangan LRK pada ruas jalan di Kabupaten Banyuasin; 2. Pemasangan LRK pada ruas jalan di Kabupaten Muara Enim; 3. Pemasangan LRK pada ruas jalan di Kabupaten Ogan Komering Ilir; dan 4. Pemasangan LRK pada ruas jalan di Kabupaten Ogan Ilir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Lalu Lintas JSDPP 	
10.	SK 12	Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	IKK 12.1	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	300	Penyelenggaraan Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional).	<p>1 (satu) Promosi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seksi Sarana AJSDP
		<p>IKK 12.1</p> <p>Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda merupakan Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai</p> <p>Definisi: Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda merupakan Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai</p>						

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Definisi	Satuan	Target Revisi I PK 2025	Kegiatan	Volume	Sumber Data
		pedoman pada lokasi yang berbeda di Provinsi Sumatera Selatan.					
		IKK 12.2 Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda Definisi: Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda merupakan Pelaksanaan kegiatan pengajaran Keselamatan LLAJ yang meliputi Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini	Orang	180	Penyelenggaraan Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) (Prioritas Nasional).	1 (satu) Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Seksi Sarana AJSDP
11.	SK 4 Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub	IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat Definisi: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur	Kegiatan	3	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	3 (tiga) kegiatan meliputi: 1. Penyusunan RKAKL Pagu Kebutuhan; 2. Penyusunan RKAKL Pagu Indikatif; dan 3. Penyusunan RKAKL Pagu Alokasi.	<ul style="list-style-type: none"> Subbag Tata Usaha

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Definisi	Satuan	Target Revisi I PK 2025	Kegiatan	Volume	Sumber Data
		<p>penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat merupakan kegiatan yang terkait dengan penyusunan pagu kebutuhan, pagu indikatif dan pagu alokasi.</p>					
		<p>IKK 4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat</p> <p>Definisi: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat menghasilkan dokumen SAKIP pada BPTD Kelas II Sumatera Selatan.</p>	Dokumen	1	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	1 (satu) Dokumen SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> • Subbag Tata Usaha

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Definisi	Satuan	Target Revisi I PK 2025	Kegiatan	Volume	Sumber Data
		<p>IKK 4.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan</p> <p>Definisi: Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kegiatan terkait Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) merupakan kegiatan yang terkait dengan SPIP dan Manajemen Resiko dengan hasil berupa dokumen SPIP dan dokumen manajemen resiko.</p>	Dokumen	2	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	2 (dua) Dokumen meliputi: 1. Dokumen SPIP; dan 2. Dokumen Manajemen Resiko (MR).	<ul style="list-style-type: none"> Subbag Tata Usaha
		IKK 4.4 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	3 (tiga) Kegiatan meliputi; 1. Koordinasi kegiatan dan rencana kerja Ditjenhubdat dan	<ul style="list-style-type: none"> Subbag Tata Usaha

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Definisi	Satuan	Target Revisi I PK 2025	Kegiatan	Volume	Sumber Data
		<p>Definisi: Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat merupakan kegiatan yang terkait dengan Subbag Keuangan/Subbag Tata Usaha.</p>				<p>Pemerintah Daerah diwilayah kerja Provinsi Sumatera Selatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran BPTD Kelas II Sumatera Selatan; dan 3. Bimbingan Teknis MC/Public Speaking. 	
		<p>IKK 4.5 Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan</p> <p>Definisi: Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan, dimana pemeriksaan yang dilakukan menghasilkan beberapa rekomendasi yang tertuang dalam dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan/atau eksternal.</p>	Dokumen	2	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	<p>2 (dua) Dokumen meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut hasil Pemeriksaan Audit Internal; dan 2. Tindak lanjut hasil Pemeriksaan Audit Eksternal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Subbag Tata Usaha
		<p>IKK 4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat</p> <p>Definisi: Kegiatan Pengelolaan Aset /BMN merupakan rangkaian kegiatan penatausahaan aset mulai dari perencanaan aset</p>	Dokumen	2	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	<p>2 (dua) Dokumen meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Pengelolaan BMN; dan 2. Dokumen Penatausahaan BMN. 	<ul style="list-style-type: none"> • Subbag Tata Usaha

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Definisi	Satuan	Target Revisi I PK 2025	Kegiatan	Volume	Sumber Data
		hingga penghapusan aset, dengan tujuan untuk menjaga efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan aset negara. Kegiatan Pengelolaan aset menghasilkan dokumen aset yaitu dokumen pengelolaan aset dan dokumen penatausahaan aset.					
		<p>IKK 4.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat</p> <p>Definisi: Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) merupakan kegiatan yang terkait dengan kehumasan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi, dimana kegiatan ini bertujuan untuk merespon dan menyelesaikan keluhan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat melalui berbagai kanal pengaduan.</p>	Kegiatan	5	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	<p>5 (lima) Kegiatan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Peliputan Kegiatan Pembangunan dan Tusi Keselamatan LLAJSDP; 2. Kegiatan Rebranding dan Penyusunan Profil BPTD dan Satpel BPTD Kelas II Sumatera Selatan; 3. Kegiatan Pelaksanaan Kehumasan dan PPID; 4. FGD Kehumasan dan PPID dengan tema Transportasi; dan 5. Pelatihan dan Sertifikasi Remote Pilot (pelatihan drone). 	<ul style="list-style-type: none"> • Subbag Tata Usaha
		<p>IKK 4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)</p> <p>Definisi:</p>	Kegiatan	2	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	<p>2 (dua) Kegiatan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasional Kantor BPTD Kelas II Sumatera Selatan; dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Subbag Tata Usaha

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Definisi	Satuan	Target Revisi I PK 2025	Kegiatan	Volume	Sumber Data
		Kegiatan Digitalisasi Arsip merupakan kegiatan layanan perkantoran yang bertujuan untuk mengumpulkan sumber informasi berupa dokumen tertulis (surat, naskah berkas dan lainnya) dan/atau dalam bentuk visual, sehingga dapat digunakan sebagai informasi untuk menunjang kegiatan layanan perkantoran.				2. Operasional dan Pemeliharaan Gedung Command Center.	
		IKK4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Definisi: Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa merupakan kegiatan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung operasional perkantoran BPTD Kelas II Sumatera Selatan.	Kegiatan	1	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	1 (satu) kegiatan yaitu Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran BPTD Kelas II Sumatera Selatan	<ul style="list-style-type: none"> Subbag Tata Usaha
		IKK4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja Definisi: Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja merupakan kegiatan yang terkait pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai, peningkatan kompetensi SDM	Kegiatan	9	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	9 (sembilan) Kegiatan meliputi: 1. Pengelolaan Gaji dan Tunjangan Pegawai; 2. Kegiatan Monitoring dan evaluasi Absensi Melalui Fingerprint; 3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> Subbag Tata Usaha

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Definisi	Satuan	Target Revisi I PK 2025	Kegiatan	Volume	Sumber Data
		dan peningkatan motivasi SDM.				Perkantoran dan kepegawaian; 4. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Capacity Building Pegawai; 5. Kegiatan Konsinyering Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja; 6. Kegiatan Bimbingan Teknis E-Kinerja; 7. Kegiatan Sosialisasi Disiplin Pegawai; 8. Kegiatan Sosialisasi Prosedur Kepegawaian; dan 9. Kegiatan Bimbingan Teknis SDM Kehumasan.	

Kegiatan	Anggaran	PIC
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 34.197.678.000,-	<ul style="list-style-type: none"> Seksi Lalu Lintas JSDPP; Seksi Sarana AJSDP; Seksi Prasarana JSDP; dan Subbag Tata Usaha.
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 19.754.451.000,-	
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 26.783.621.000,-	
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 5.231.690.000,-	
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 5.559.179.000,-	
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 27.053.402.000,-	



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Milfer Jonely, S.Kom., M.Si.

Jabatan : Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Nurhadi Unggul Wibowo, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 11 Juni 2025

Pihak Kedua
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan

Pihak Pertama
Kepala Seksi
Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau,
Penyeberangan dan Pengawasan

NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

MILFER JONELY, S.Kom., M.Si.
NIP. 19760215 200701 1 019



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Milfer Jonely, S.Kom., M.Si.

Jabatan : Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Nurhadi Unggul Wibowo, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 11 Juni 2025

Pihak Kedua
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan

NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

Pihak Pertama
Kepala Seksi
Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau,
Penyeberangan dan Pengawasan

MILFER JONELY, S.Kom., M.Si.
NIP. 19760215 200701 1 019

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI LALU LINTAS JALAN, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK2 Meningkatkan konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	4
2.	SK 3 Meningkatkan konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 3.1 Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A	Kegiatan	7
3.	SK 7 Meningkatkan pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	2
		IKK 7.6 Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas <i>Event</i> Khusus	Kegiatan	2
4.	SK 8 Meningkatkan Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK 8.5 Operasional layanan Kapal Kerja sesuai SPM	Unit	1
		IKK 8.6 Operasional dan pemeliharaan pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan	Unit	1
5.	SK 9 Meningkatkan Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.1 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Kegiatan	7
		IKK 9.2 Jumlah kegiatan pengawasan operasional angkutan barang	Kegiatan	3
6.	SK 11 Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 11.1 Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis	Unit	5.967
		IKK 11.2 Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman	Lokasi	4

Disetujui

Palembang, 11 Juni 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan

Kepala Seksi
Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau,
Penyeberangan dan Pengawasan



NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002



MILFER JONELY, S.Kom., M.Si.
NIP. 19760215 200701 1 019

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI LALU LINTAS JALAN, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK2 Meningkatkan konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	4
2.	SK 3 Meningkatkan konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 3.1 Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A	Kegiatan	7
3.	SK 7 Meningkatkan pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	2
		IKK 7.6 Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas <i>Event</i> Khusus	Kegiatan	2
4.	SK 8 Meningkatkan Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK 8.5 Operasional layanan Kapal Kerja sesuai SPM	Unit	1
		IKK 8.6 Operasional dan pemeliharaan pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan	Unit	1
5.	SK 9 Meningkatkan Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.1 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Kegiatan	7
		IKK 9.2 Jumlah kegiatan pengawasan operasional angkutan barang	Kegiatan	3
6.	SK 11 Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 11.1 Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis	Unit	5.967
		IKK 11.2 Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman	Lokasi	4

Disetujui

Palembang, 11 Juni 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan

Kepala Seksi
Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau,
Penyeberangan dan Pengawasan



NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002



MILFER JONELY, S.Kom., M.Si.
NIP. 19760215 200701 1 019



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yuliana Y.S. Panjaitan

Jabatan : Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Nurhadi Unggul Wibowo, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 11 Juni 2025

Pihak Kedua
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan

NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

Pihak Pertama
Kepala Seksi
Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan
Penyeberangan

YULIANA Y.S. PANJAITAN
NIP. 19790701 200112 2 005



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yuliana Y.S. Panjaitan

Jabatan : Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Nurhadi Unggul Wibowo, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 11 Juni 2025

Pihak Kedua
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan

NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

Pihak Pertama
Kepala Seksi
Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan
Penyeberangan

YULIANA Y.S. PANJAITAN
NIP. 19790701 200112 2 005

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI PRASARANA JALAN, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1.	SK 3 Meningkatnya konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 3.2 Jumlah terminal tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	7
2.	SK 5 Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK 5 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	3
3.	SK 6 Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan sungai dan danau	IKK 7 Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	3
4.	SK 7 Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 7.2 Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM	Unit	7
		IKK 7.4 Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM	Unit	3
		IKK 7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	1
5.	SK 8 Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK 8.2 Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Unit	3

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI PRASARANA JALAN, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1.	SK 3 Meningkatnya konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 3.2 Jumlah terminal tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	7
2.	SK 5 Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK 5 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	3
3.	SK 6 Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan sungai dan danau	IKK 7 Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	3
4.	SK 7 Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 7.2 Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM	Unit	7
		IKK 7.4 Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM	Unit	3
		IKK 7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	1
5.	SK 8 Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK 8.2 Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Unit	3

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		IKK 8.4	Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Unit 1
6.	SK 9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.3	Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan	Unit 3

Disetujui

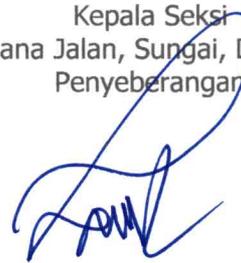
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan



NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

Palembang, 11 Juni 2025

Kepala Seksi
Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan
Penyeberangan



YULIANA Y.S. PANJAITAN
NIP. 19790701 200112 2 005

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		IKK 8.4	Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Unit	1
6.	SK 9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.3	Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan	Unit	3

Disetujui

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan



NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

Palembang, 11 Juni 2025

Kepala Seksi
Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan
Penyeberangan



YULIANA Y.S. PANJAITAN
NIP. 19790701 200112 2 005



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Herry Saputra, S.SiT., M.Si.

Jabatan : Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Nurhadi Unggul Wibowo, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 11 Juni 2025

Pihak Kedua
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan

NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

Pihak Pertama
Kepala Seksi
Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai,
Danau, dan Penyeberangan

HERRY SAPUTRA, S.SiT., M.Si.
NIP. 19851025 200902 1 002



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Herry Saputra, S.SiT., M.Si.

Jabatan : Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Nurhadi Unggul Wibowo, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 11 Juni 2025

Pihak Kedua
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan

NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

Pihak Pertama
Kepala Seksi
Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai,
Danau, dan Penyeberangan

HERRY SAPUTRA, S.SiT.,M.Si.
NIP. 19851025 200902 1 002

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI SARANA DAN ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK2 Meningkatkan konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	4
2.	SK 5 Meningkatkan rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK 6 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Trayek	1
3.	SK 7 Meningkatkan pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	2
4.	SK 10 Meningkatkan kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi <i>active</i> dan <i>passive safety</i>	IKK 10.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Kegiatan	1
		IKK 10.2 Jumlah kegiatan terkait kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan	12
5.	SK 12 Meningkatkan kesadaran & <i>attitude</i> pengguna jalan berkeselamatan	IKK 12.1 Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	150
		IKK 12.2 Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	180

Disetujui

Palembang, 11 Juni 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan

Kepala Seksi
Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai,
Danau, dan Penyeberangan




NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

HERRY SAPUTRA, S.SiT., M.Si.
NIP. 19851025 200902 1 002

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI SARANA DAN ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK2 Meningkatkan konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	4
2.	SK 5 Meningkatkan rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK 6 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Trayek	1
3.	SK 7 Meningkatkan pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	2
4.	SK 10 Meningkatkan kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi <i>active</i> dan <i>passive safety</i>	IKK 10.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Kegiatan	1
		IKK 10.2 Jumlah kegiatan terkait kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan	12
5.	SK 12 Meningkatkan kesadaran & <i>attitude</i> pengguna jalan berkeselamatan	IKK 12.1 Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	150
		IKK 12.2 Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	180

Disetujui

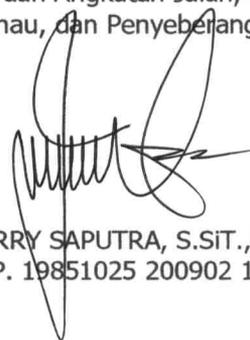
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan



NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

Palembang, 11 Juni 2025

Kepala Seksi
Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai,
Danau, dan Penyeberangan



HERRY SAPUTRA, S.SiT., M.Si.
NIP. 19851025 200902 1 002



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tulus Raharjo, ATD., M.Si.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Nurhadi Unggul Wibowo, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 11 Juni 2025

Pihak Kedua
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

TULUS RAHARJO, ATD., M.Si.
NIP. 19680119 199301 1 001



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tulus Raharjo, ATD., M.Si.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Nurhadi Unggul Wibowo, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 11 Juni 2025

Pihak Kedua
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

TULUS RAHARJO, ATD., M.Si.
NIP. 19680119 199301 1 001

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN TATA USAHA
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK 7 Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	1
2.	SK 4 Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub	IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3
		IKK 4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1
		IKK 4.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Dokumen	2
		IKK 4.4 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3
		IKK 4.5 Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	2
		IKK 4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	2
		IKK 4.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	5
		IKK 4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	2
		IKK 4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	1
		IKK 4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	9

Disetujui

Palembang, 11 Juni 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan

Kepala Sub Bagian Tata Usaha



NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002



TULUS RAHARJO, ATD., M.Si.
NIP. 19680119 199301 1 001

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN TATA USAHA
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK 7 Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	1
2.	SK 4 Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub	IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3
		IKK 4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1
		IKK 4.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Dokumen	2
		IKK 4.4 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3
		IKK 4.5 Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	2
		IKK 4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	2
		IKK 4.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	5
		IKK 4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	2
		IKK 4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	1
		IKK 4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	9

Disetujui

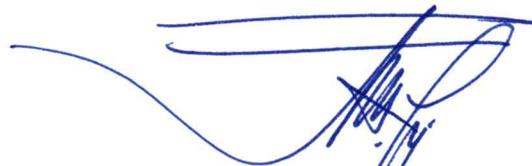
Palembang, 11 Juni 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan

Kepala Sub Bagian Tata Usaha



NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002



TULUS RAHARJO, ATD., M.Si.
NIP. 19680119 199301 1 001

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-4				Realisasi Bulan-4		% Capaian Bulan-4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab						
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output Volume	Realisasi Anggaran Volume	Capaian Output %	Capaian Anggaran %									
								Volume	%	Volume	%	(13)	(14)	(15)	(16)									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)						
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Angkutan Perintis Provinsi Sumsel	Kumulatif persentase produksi ritase keperintisan angkutan jalan	Terpenuhinya pelayanan angkutan jalan perintis di Provinsi Sumatera Selatan yang dapat menjangkau daerah yang belum terdapat pelayanan angkutan umum	32	33%	1.429.858.333	33%	9,39	1.941.614.955	29,3%	45,3%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan monitoring pelaksanaan keperintisan angkutan jalan secara berkala	- Seksi Lalin - Seksi Sarana					
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan	Pelaksanaan Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	7	100%	4.221.390.333	33%	7	3.757.694.872	100,0%	29,7%	Capaian Output sudah Optimal	Melakukan monitoring pelaksanaan operasional Terminal Penumpang Tipe A	Seksi Prasarana					
		IKK 1.5	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100	Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru	Kumulatif persentase trip angkutan penyeberangan	Terpenuhinya pelayanan angkutan penyeberangan perintis di Provinsi Sumatera Selatan	32	100%	1.209.427.667	33%	25	1.779.676.000	78,1%	49,1%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan monitoring pelaksanaan keperintisan angkutan penyeberangan secara berkala	Seksi Sarana					
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Provinsi Sumatera Selatan	Pelaksanaan Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	7	100%	946.760.000	33%	7	778.757.997	100,0%	27,4%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan monitoring pelaksanaan operasional Pelabuhan SDP secara berkala	Seksi Prasarana					
2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	25	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Jumlah rata-rata persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A	6	33%	4.221.390.333	33%	32,89	3.757.694.872	548,2%	29,7%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan monitoring Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A melalui koordinasi ke Satuan Pelayanan Terminal Tipe A secara berkala	Seksi Prasarana					
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	60	Pelaksanaan Pemenuhan SPM Kapal Penyeberangan dan Pelabuhan Penyeberangan	Jumlah rata-rata persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	20	33%	2.933.333	33%	62,11	0	310,6%	0,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan monitoring Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP melalui koordinasi ke Satuan Pelayanan Pelabuhan SDP secara berkala	Seksi Prasarana					
	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	IKK 3.1	%	80	1)	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	Jumlah rata-rata persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Terpasangnya perlengkapan jalan di Kabupaten/Kota yang mendapatkan bantuan teknis perlengkapan jalan	30	27%	416.666.667	33%	0	0,0%	0,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan administrasi melalui koordinasi secara intensif	Seksi Lalin						
					2)	Perbaiki Lokasi Rawan Kecelakaan		Terpasangnya perlengkapan jalan di Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK)											0	0,0%	0,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan administrasi melalui koordinasi secara intensif	Seksi Lalin
					3)	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang membutuhkan pemeliharaan perlengkapan jalan											0	0,0%	0,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan administrasi melalui koordinasi secara intensif	Seksi Lalin

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-4				Realisasi Bulan-4		% Capaian Bulan-4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab		
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output Volume	Realisasi Anggaran Volume	Capaian Output %	Capaian Anggaran %					
								Volume (9)	% (10)	Volume (11)	% (12)	Volume (13)	Volume (14)	% (15)	% (16)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
3	Meningkatnya keselamatan transportasi darat				3)	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prov. Sumsel	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi prioritas untuk dipasang perlengkapan jalan	27%	4.616.000.000	33%	0	0,0%	0,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan administrasi melalui koordinasi secara intensif	Seksi Lalin				
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	16	Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dan Operasional KPBU UPPKB	Jumlah rata-rata persentase angkutan barang yang melakukan pelanggaran dan dilakukan tindakan penilangan di UPPKB yang beroperasi	Tercapainya penurunan pelanggaran <i>Over Dimension and Over Loading (ODOL)</i> pada angkutan barang yang masuk ke UPPKB	5,33	5%	1.080.485.667	33%	12,45	1.019.341.855	-33,6%	31,4%	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring pelanggaran ODOL pada angkutan barang di UPPKB secara berkala uji	Seksi Lalin	
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000	1)	Pekan Keselamatan Jalan Provinsi Sumatera Selatan	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi keselamatan transportasi jalan	Terlaksananya kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKJ)	0	0%	83.333.333	33%	0	0	0,0%	0,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi serta secara intensif	Seksi Sarana
						2)	Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini	0	0%	35.714.333	33%	0	0	0,0%	0,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana	
		IKK7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	82	1)	Monitoring Bidang Sarana Angkutan Jalan di Provinsi Sumatera Selatan	Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang telah melaksanakan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	Terpenuhinya standarisasi pengujian kendaraan bermotor melalui akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	27%	3.666.667	33%	0	0,0%	0,0%	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring pelaksanaan akreditasi UPUBKB secara berkala	Seksi Sarana		
						2)	Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Non Statis	20	27%	25.233.333	33%	82,35%	0	0,0%	0,0%	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi terkait pemeliharaan alat uji	Seksi Sarana		
						3)	Perawatan dan Pengkalibrasian Alat Uji Kendaraan Bermotor	27%	84.766.667	33%	0	0,0%	0,0%	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi terkait perawatan dan pengkalibrasian alat uji kendaraan bermotor	Seksi Sarana				
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1)	Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan	Ketepatan waktu pelaporan dokumen perencanaan (LKIP, PK, pengisian <i>e-planning</i> dan <i>e-performance</i>)	Terlaksananya pelaporan dokumen perencanaan tepat waktu (LKIP, PK, pengisian <i>e-planning</i> dan <i>e-performance</i>)	30%	1.737.296.667	33%	35,25	51.205.000	141,0%	1,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan monitoring progres dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan	-Seksi Lalin -Seksi Sarana -Seksi Prasarana -Subbag TU	
						2)	Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan	Laporan Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan (Sungai Delta Upang dan Sungai Salek)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan (Sungai Delta Upang dan Sungai Salek)	30%	8.759.940.000	33%	0	0	0,0%	0,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan monitoring progres dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan		
						3)	Pengadaan <i>Public Transport Information System (PTIS)</i>	Data Realisasi Pelaksanaan Pengadaan <i>Public Transport Information System (PTIS)</i>	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan <i>Public Transport Information System (PTIS)</i>	25	30%	1.333.333.333	33%	0	0	0,0%	0,0%	Capaian Output Belum Optimal		Melakukan monitoring progres dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan
						4)	Pemeliharaan <i>Local Port Service</i>	Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan <i>Local Port Service (LPS)</i>	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan <i>Local Port Service (LPS)</i>	30%	83.333.333	33%	0	0	0,0%	0,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan monitoring progres dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan		

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-4				Realisasi Bulan-4		% Capaian Bulan-4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output Volume	Realisasi Anggaran Volume	Capaian Output %	Capaian Anggaran %				
								Volume (9)	% (10)	Volume (11)	% (12)	Volume (13)	Volume (14)	(15)	(16)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
					5) Operasional dan Pemeliharaan Tug Boat dan Kapal Patroli	Laporan Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Tug Boat dan Kapal Patroli	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Tug Boat dan Kapal Patroli		30%	889.673.667	33%	3,125	299.691.165	12,5%	11,2%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan monitoring progres dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan		
					6) Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	Laporan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Perangkat Pengelola Data dan Informasi		30%	42.666.667	33%	0	0	0,0%	0,0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan monitoring progres dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan		
5	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85	1) Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	Nilai Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran dan Ketersediaan BMN	Terlaksananya Penilaian Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran dan Tingkat Ketersediaan BMN	25	28%	1.810.393.000	33%	55,00	1.095.982.974	220,0%	20,2%	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring layanan perkantoran secara berkala	Subbag Tata Usaha
					2) Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)			25	28%	9.017.800.667	33%	55,00	10.142.722.189	100,0%	37,5%	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring layanan perkantoran secara berkala	Subbag Tata Usaha	

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam Pk	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-5				Realisasi Bulan-5		% Capaian Bulan-5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antar moda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan Keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Angkutan Perintis Provinsi Sumsel	Kumulatif persentase produksi ritase keperintisan angkutan jalan	Terpenuhinya pelayanan angkutan perintis yang dapat terjangkau daerah yang belum terdapat pelayanan angkutan	40	42%	1,787,322,917	42%	19.19	2,867,655,750	47.98%	66.85%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan monitoring pelaksanaan keperintisan angkutan jalan secara berkala	- Seksi Lalin - Seksi Sarana	
			IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Terminal Penumpang Tipe A	Jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan	Pelaksanaan Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	7	100%	5,276,737,917	42%	7	4,358,174,651	100.00%	34.41%	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring pelaksanaan operasional Terminal Penumpang Tipe A	Seksi Prasarana
			IKK 1.5	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100	Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru	Kumulatif persentase trip angkutan penyeberangan	Terpenuhinya pelayanan angkutan penyeberangan perintis di Provinsi Sumatera Selatan	40	100%	1,511,784,583	42%	50.94	1,779,676,000	127.35%	49.05%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan monitoring pelaksanaan keperintisan angkutan penyeberangan secara berkala	Seksi Sarana
			IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Provinsi Sumatera Selatan	Pelaksanaan Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	6	100%	1,183,450,000	42%	6	926,362,487	100.00%	32.62%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan monitoring pelaksanaan operasional Pelabuhan SDP secara berkala	Seksi Prasarana
2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	25	Operasional Terminal Penumpang Tipe A	Jumlah rata-rata persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A	7	42%	5,276,737,917	42%	7	4,358,174,651	100.00%	34.41%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan monitoring pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A melalui koordinasi ke Satuan Pelayanan Terminal Tipe A secara berkala	Seksi Prasarana	
			IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	60	Pelaksanaan Pemenuhan SPM Kapal Penyeberangan dan Pelabuhan Penyeberangan	Jumlah rata-rata persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	33.33	42%	3,666,667	42%	62.47	0	187.43%	0.00%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan monitoring pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP melalui koordinasi ke Satuan Pelayanan Pelabuhan SDP secara berkala	Seksi Prasarana
3	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	1) Bantuan Teknis Perengkapan Jalan 2) Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan 3) Pemeliharaan Perengkapan Jalan 3) Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan Prov. Sumsel	Jumlah rata-rata persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Terpasangnya perlengkapan jalan di Kabupaten/Kota yang mendapatkan bantuan teknis perlengkapan jalan	50	33%	520,833,333	42%	0	0.00%	0.00%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan administrasi melalui koordinasi secara intensif	Seksi Lalin		
								Terpasangnya perlengkapan jalan di Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK)	0	33%	720,000,000	42%	0	0.00%	0.00%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan administrasi melalui koordinasi secara intensif	Seksi Lalin		
								Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang membutuhkan pemeliharaan perlengkapan jalan	0	33%	1,400,000,000	42%	0	0.00%	0.00%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan administrasi melalui koordinasi secara intensif	Seksi Lalin		
								Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi prioritas untuk dipasang perlengkapan jalan	0	33%	5,770,000,000	42%	0	0.00%	0.00%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan administrasi melalui koordinasi secara intensif	Seksi Lalin		
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB DiJen Perhubungan Darat	%	16	Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dan Operasional KPBU UPPKB	Jumlah rata-rata persentase angkutan barang yang melakukan pelanggaran dan dilakukan tindakan penilangan di UPPKB yang beroperasi	Tercapainya penurunan pelanggaran <i>Over Dimension and Over Loading (ODOL)</i> pada angkutan barang yang masuk ke UPPKB	6.66	7%	1,350,607,083	42%	18.64	712,988,100	-79.88%	22.00%	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring pelanggaran ODOL pada angkutan barang di UPPKB secara berkala di	Seksi Lalin	
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000	1) Pekan Keselamatan Jalan Provinsi Sumatera Selatan	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi keselamatan transportasi jalan	Terlaksananya kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKJ)	0	0%	104,166,667	42%	0	0.00%	0.00%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi serta secara intensif	Seksi Sarana		
						2) Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini	0	0%	44,642,917	42%	0	0.00%	0.00%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana				
IKK7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	82	1) Monitoring Bidang Sarana Angkutan Jalan di Provinsi Sumatera Selatan	Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang telah melaksanakan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UJUBKB)	Terpenuhinya standarisasi pengujian kendaraan bermotor melalui akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UJUBKB)	25	34%	4,583,333	42%	82.35%	0	0.00%	0.00%	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring pelaksanaan akreditasi UJUBKB secara berkala	Seksi Sarana			
				2) Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Non Statis		0	34%	31,541,667	42%	0	0.00%	0.00%	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan persiapan terkait pemeliharaan alat uji	Seksi Sarana					
				3) Perawatan dan Pengkalibrasian Alat Uji Kendaraan Bermotor		0	34%	105,958,333	42%	0	0.00%	0.00%	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi terkait perawatan dan pengkalibrasian alat uji kendaraan bermotor	Seksi Sarana					

4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1)	Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan	Ketepatan waktu pelaporan dokumen perencanaan (LKIP, PK, pengisian <i>e-planning</i> dan <i>e-performance</i>)	Terlaksananya pelaporan dokumen perencanaan tepat waktu (LKIP, PK, pengisian <i>e-planning</i> dan <i>e-performance</i>)	38%	2,171,620,833	42%	38.7	51,205,000	120.94%	0.98%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan monitoring progres dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan	sarana -Seksi Prasarana	
						2)	Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan	Laporan Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan (Sungai Delta Upang dan Sungai Salek)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan (Sungai Delta Upang dan Sungai Salek)	38%	#####	42%	0	0	0.00%	0.00%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan monitoring progres dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan		
						3)	Pengadaan <i>Public Transport Information System</i> (PTIS)	Data Realisasi Pelaksanaan Pengadaan <i>Public Transport Information System</i> (PTIS)	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan <i>Public Transport Information System</i> (PTIS)	38%	1,666,666,667	42%	0	0	0.00%	0.00%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan monitoring progres dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan		
						4)	Pemeliharaan <i>Local Port Service</i>	Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan <i>Local Port Service</i> (LPS)	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan <i>Local Port Service</i> (LPS)	38%	104,166,667	42%	0	0	0.00%	0.00%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif		
						5)	Operasional dan Pemeliharaan Tug Boat dan Kapal Patroli	Laporan Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Tug Boat dan Kapal Patroli	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Tug Boat dan Kapal Patroli	38%	1,112,092,083	42%	38	321,492,210	118.75%	12.05%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan monitoring progres dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan		
						6)	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	Laporan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	38%	53,333,333	42%	0	0	0.00%	0.00%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan monitoring progres dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan		
5	Meningkatnya Birokrasi Dijen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Dijen Perhubungan Darat	Nilai	85	1)	Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	Nilai Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran dan Ketersediaan BMN	Terlaksananya Penilaian Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran dan Tingkat Ketersediaan BMN	32	35%	2,262,991,250	42%	60	1,439,412,110	187.50%	26.50%	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring layanan perkantoran secara berkala	Subbag Tata Usaha
						2)	Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	Ketersediaan BMN		32	35%	#####	6%	60	14,933,588,278	100.00%	55.20%	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring layanan perkantoran secara berkala	Subbag Tata Usaha

MONITORING RENCANA AKSI ATAS REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan- 6				Realisasi Bulan- 6		Capaian Bulan- 6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab		
								Volume (P)	% (T0)	Volume (T1)	% (T2)	Volume (T3)	Realisasi Anggaran Volume (T4)	Volume (T5)	Capaian Anggaran % (T6)					
1.	SK2	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK 2.1	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	4	Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	Kumulatif persentase produksi ritase seperti ritase angkutan jalan	Terpenuhinya pelayanan angkutan perintis yang dapat menjangkau daerah yang belum terdapat angkutan seperti ritase angkutan jalan	4	58%	2.144.787.500	0,5	4	2.867.655.750	100,00%	66,85%	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring pelaksanaan keperintasan angkutan jalan secara berkala	- Seksi Sarana AJSDP - Seksi Lalu Lintas JSDPP
2.	SK 3	Meningkatnya konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & K), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 3.1	Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A	Kegiatan	7	Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas; dan 2. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas.	Jumlah Monitoring pengelolaan dan pengendalian Lalu Lintas	Terpenuhinya Pelayanan AKAP terhadap Terminal Tipe A	7	58%	453.585.000	0,5	7	0	100,00%	0,00%	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring pelayanan AKAP terhadap Terminal Tipe A	- Seksi Lalu Lintas JSDPP
			IKK 3.2	Jumlah terminal tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	7	Pengoperasian 7 (tujuh) Terminal Penumpang Tipe A	Jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan	Terlaksananya Operasional Terminal Penumpang Tipe A	7	58%	6.337.986.500	0,5	7	4.439.955.625	100,00%	35,03%	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring pelaksanaan operasional Terminal Penumpang Tipe A	- Seksi Prasarana JSDP
3.	SK 5	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK 5	Jumlah Pelabuhan penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	3	Pengoperasian 3 (tiga) Pelabuhan Penyeberangan	Jumlah Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Provinsi Sumatera Selatan	Terlaksananya Operasional Pelabuhan Penyeberangan	3	58%	638.058.000	0,5	3	426.481.632	100,00%	33,42%	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring pelaksanaan operasional Pelabuhan SDP secara berkala	- Seksi Prasarana JSDP
			IKK 6	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Trayek	1	Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas Nasional)	Kumulatif persentase trip angkutan penyeberangan	Terpenuhinya pelayanan angkutan penyeberangan perintis di Provinsi Sumatera Selatan	1	58%	1.814.141.500	0,5	1	1.779.676.000	100,00%	49,05%	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring pelaksanaan keperintasan angkutan penyeberangan secara berkala	- Seksi Sarana AJSDP
4.	SK 6	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan sungai dan danau	IKK 7	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	3	Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan (Prioritas Nasional)	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan	Terlaksananya Operasional Pelabuhan Sungai dan Danau	3	58%	13.139.910.000	0,5	1	0	33,33%	0,00%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan monitoring pelaksanaan operasional Pelabuhan SDP secara berkala	- Seksi Prasarana JSDP
5.	SK 7	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 7.2	Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM	Unit	7	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	Jumlah Terminal Tipe A yang melakukan pelayanan sesuai SPM	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum di Terminal Tipe A	7	58%	107.000.000	0,5	7	0	100,00%	0,00%	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A melalui koordinasi ke Satuan Pelayanan Terminal Tipe A secara berkala	- Seksi Prasarana JSDP
			IKK 7.4	Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM	Unit	3	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	Jumlah Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor UPPKB sesuai SPM	Terlaksananya Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor UPPKB sesuai SPM	3	58%	57.415.000	0,5	3	0	100,00%	0,00%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan monitoring pelaksanaan operasional UPPKB secara berkala	- Seksi Prasarana JSDP
			IKK 7.5	Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	6	1. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan; 2. Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan; 3. Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana; 4. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas; 5. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas; dan 6. Pemeliharaan, Operasional dan Angkutan	Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Terlaksananya Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	6	58%	2.615.845.000	0,5	0	0	0,00%	0,00%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi serta secara intensif	- Subbag Tata Usaha - Seksi Prasarana JSDP - Seksi Sarana AJSDP - Seksi Lalu Lintas JSDPP
			IKK 7.6	Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Event Khusus	Kegiatan	2	1. Monitoring dan Pengawasan Angkutan Lebaran; dan 2. Monitoring dan Pengawasan Angkutan Natal dan Tahun Baru	Jumlah Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Event Khusus	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Event Khusus	2	58%	30.000.000	0,5	2	51.205.000	100,00%	85,34%	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi serta secara intensif	- Seksi Lalu Lintas JSDPP
6.	SK 8	Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK 8.2	Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Unit	3	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang beroperasi	Terlaksananya Operasional Layanan Pelabuhan Penyeberangan Sesuai SPM	3	58%	118.500.000	0,5	2	0	66,67%	0,00%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan monitoring pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP melalui koordinasi ke Satuan Pelayanan Pelabuhan SDP secara berkala	- Seksi Prasarana JSDP
			IKK 8.4	Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Unit	1	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	Jumlah Pelabuhan Sungai yang beroperasi	Terlaksananya Operasional Layanan Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai SPM	1	58%	118.500.000	0,5	0	0	0,00%	0,00%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan monitoring pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP melalui koordinasi ke Satuan Pelayanan Pelabuhan SDP secara berkala	- Seksi Prasarana JSDP
			IKK 8.5	Operasional layanan Kapal Kerja sesuai SPM	Unit	1	Operasional dan Pemeliharaan Tug Boat dan Kapal Patroli	Laporan Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Tug Boat dan Kapal Patroli	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Tug Boat dan Kapal Patroli	1	58%	1.334.510.500	0,5	1	330.211.510	100,00%	12,37%	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring progres dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan	- Seksi Lalu Lintas JSDPP
			IKK 8.6	Operasional dan pemeliharaan pengawasan DTP di Pelabuhan	Unit	1	Pemeliharaan Local Port Service (LPS)	Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Local Port Service (LPS)	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Local Port Service (LPS)	1	58%	125.000.000	0,5	0	0	0,00%	0,00%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	- Seksi Lalu Lintas JSDPP
7.	SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.1	Jumlah kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Buskotas	Kegiatan	7	1. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas; dan 2. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas.	Laporan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Buskotas	Terlaksananya Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Buskotas	7	58%	453.585.000	0,5	7	0	100,00%	0,00%	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring progres dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan	- Seksi Lalu Lintas JSDPP
			IKK 9.2	Jumlah kegiatan pengawasan operasional angkutan barang di UPPKB	Kegiatan	3	1. Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang di UPPKB Talang Kelapa; 2. Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang di UPPKB Kotagati; dan 3. Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang di UPPKB Merani	Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang di UPPKB	Terlaksananya Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang di UPPKB	3	58%	1.620.728.500	0,5	3	789.030.086	100,00%	24,34%	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring pelaksanaan operasional UPPKB secara berkala	- Seksi Lalu Lintas JSDPP
			IKK 9.3	Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dipersonalkan untuk mendukung keselamatan	Unit	3	1. Pengoperasian Fasilitas Penimbangan (UPPKB); dan 2. Kerjasama Pengelolaan Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua.	Jumlah UPPKB yang beroperasi	Terlaksananya Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang di UPPKB	3	58%	1.620.728.500	0,5	3	789.030.086	100,00%	24,34%	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring pelaksanaan operasional UPPKB secara berkala	- Seksi Prasarana JSDP
8.	SK 10	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK 10.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisk Rancangan Bangun Kendaraan sesuai Asesam, Asesamam	Kegiatan	1	1. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan; dan 2. Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan	Laporan Kegiatan Monitoring Sarana dan Angkutan	Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan Fisk Rancangan Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	1	58%	403.325.000	0,5	1	0	100,00%	0,00%	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	- Seksi Sarana AJSDP
			IKK 10.2	Jumlah kegiatan terkait kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan	12	1. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan; 2. Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan; 3. Pemeliharaan Alat Kalibrasi dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor; dan 4. Perawatan dan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor Non-Static	Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang telah melaksanakan kalibrasi Alat Kalibrasi Berkala Kendaraan Bermotor Non-Static	Terpenuhinya standarisasi pengujian kendaraan bermotor melalui akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Non-Static	12	58%	568.335.000	0,5	3	0	25,00%	0,00%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan monitoring pelaksanaan akreditasi UPPKB secara berkala	- Seksi Sarana AJSDP
9.	SK 11	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 11.1	Jumlah Perengkapan jalan yang dibangun dan dipersonalkan sesuai dengan spesifikasi	Unit	5.967	1. Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan Prioritas Nasional; 2. Bantuan Teknis Perengkapan Jalan Prioritas Nasional; dan 3. Pemeliharaan Perengkapan Jalan.	Jumlah Perengkapan Jalan yang dipasang di Jalan Prioritas Nasional	Terpasangnya perengkapan jalan di bantuan teknis yang mendapatkan bantuan teknis perengkapan jalan	5967	58%	9.245.987.500	0,5	0	0	0,00%	0,00%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan administrasi melalui koordinasi secara intensif	- Seksi Lalu Lintas JSDPP
			IKK 11.2	Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman	Lokasi	4	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) (Prioritas Nasional)	Jumlah Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) yang diperbaiki	Terpasangnya perengkapan jalan di Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK)	4	58%	847.012.500	0,5	0	0	0,00%	0,00%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan administrasi melalui koordinasi secara intensif	- Seksi Lalu Lintas JSDPP

(1)	(2)	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan- 6				Realisasi Bulan- 6		Capaian Bulan- 6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
								Volume (9)	% (10)	Volume (11)	% (12)	Volume (13)	Volume (14)	% (15)	% (16)				
10.	SK 12	Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	IKK 12.1	Paksaan	150	Penyelenggaraan Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)	Jumlah Masyarakat yang Ter sosialisasi Keselamatan Transportasi Jalan	Terlaksananya Kegiatan Pekan Keselamatan Jalan	150	58%	125.000.000	0,5	0	0	0,00%	0,00%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi serta secara intensif	- Seksi Sarana AJSDP
			IKK 12.2	Pelaksanaan pengajaran keselamatan (LAL) anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada kegiatan	Orang	180	Penyelenggaraan Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) (Prioritas Nasional)	Jumlah Masyarakat yang Ter sosialisasi Keselamatan Transportasi Jalan	Terlaksananya Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) (Prioritas Nasional)	180	58%	53.571.500	0,5	0	0	0,00%	0,00%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi serta secara intensif
11.	SK 4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Kemendhub	IKK 4.1	Kegiatan	3	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	Laporan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	3	58%	1.355.590.000	0,5	2	0	66,67%	0,00%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan monitoring layanan perkantoran secara berkala	- Subbag Tata Usaha
			IKK 4.2	Dokumen	1	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	Laporan Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Terlaksananya Pelaporan Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	1	58%			1	0	100,00%	0,00%	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring layanan perkantoran secara berkala	- Subbag Tata Usaha
			IKK 4.3	Dokumen	2	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Terlaksananya Pelaporan Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	2	58%			2	0	100,00%	0,00%	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring layanan perkantoran secara berkala	- Subbag Tata Usaha
			IKK 4.4	Kegiatan	3	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	3	58%			1	0	33,33%	0,00%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan monitoring layanan perkantoran secara berkala	- Subbag Tata Usaha
			IKK 4.5	Dokumen	2	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	Laporan Pelaksanaan Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	2	58%			2	0	100,00%	0,00%	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring layanan perkantoran secara berkala	- Subbag Tata Usaha
			IKK 4.6	Dokumen	2	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Terlaksananya Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	2	58%			2	0	100,00%	0,00%	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring layanan perkantoran secara berkala	- Subbag Tata Usaha
			IKK 4.7	Kegiatan	5	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	Laporan Pelaksanaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Terlaksananya Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	5	58%			1	0	20,00%	0,00%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan monitoring layanan perkantoran secara berkala	- Subbag Tata Usaha
			IKK 4.8	Kegiatan	2	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Digitalisasi Anasp (Skor)	Terlaksananya Kegiatan Digitalisasi Anasp (Skor)	2	58%			2	70.680.916	100,00%	2,61%	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring layanan perkantoran secara berkala	- Subbag Tata Usaha
			IKK 4.9	Kegiatan	1	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	1	58%			1	0	100,00%	0,00%	Capaian Output Sudah Optimal	Melakukan monitoring layanan perkantoran secara berkala	- Subbag Tata Usaha
			IKK 4.10	Kegiatan	9	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	9	58%			1	16.731.489.491	11,11%	61,85%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan monitoring layanan perkantoran secara berkala	- Subbag Tata Usaha